KOLONEL DRS. NUGROHO NOTOSUSANTO

B2

ICHTISAR SEDJARAH R.I (1945 – SEKARANG)

SERI TEXT-BOOK SEDJARAH ABRI

:-

DEPARTEMEN PERTAHANAN – KEAMANAN
PUSAT SEDJARAH ABRI
1971



22 APR 1975

B2

KOLONEL NUGROHO NOTOSUSANTO

ICHTISAR SEDJARAH R.I (1945 – SEKARANG)

SERI TEXT-BOOK SEDJARAH A B R I

DEPARTEMEN PERTAHANAN - KEAMANAN
PUSAT SEDJARAH ABRI
1971

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 10 Mei 2012
No. Induk : 42444/PN-MUSEUM/'12
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

6.5.76
1212/76

Disusun dengan bantuan Kapten Drs. Tanu Suherly, Kapten Drs. Supardi Rapanoi, Drs. M. Hadijanto dan Drs. Sudarto.

CATATAN REDAKSI:

Sampul, Sambutan dan Pengantar Umum untuk buku ini sudah disiapkan dalam tahun 1971. Oleh karena itu dipakai ejaan lama. Naskahnya sendiri baru dapat dikirim ke percetakan dalam tahun 1975, sesudah ejaan yang disempurnakan berlaku.

SAMBUTAN

WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA DJENDERAL T.N.I. M. PANGGABEAN

Dengan mengutjapkan pudji sjukur kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa, saja menjambut dengan gembira terbitnja SERI TEXT-BOOK SEDJARAH ABRI ini.

Kiranja kita telah menjadari semuanja bahwa setiap Buku Sedjarah ABRI mempunjai Tiga Fungsi. Pertama adalah fungsi edukatif-historis, jakni agar daripadanja setiap Anggota ABRI dapat mempeladjari proses-proses dan tokoh-tokoh perdjuangan ABRI sedjak masa pra-Kemerdekaan, masa Kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang, sebagai bekal-pengetahuan dan bekal-kerdja jang sangat penting artinja bagi penunaian tugas kewadjiban kita semua dimasa mendatang.

Kedua adalah fungsi pewarisan setjara sosiologis, artinja ialah bahwa dengan Buku Sedjarah itu ABRI dapat mempunjai sarana jang lebih njata untuk dapat mewariskan kepada Generasi Muda sekarang maupun kepada generasi-generasi jang akan datang — apa jang telah diperdjuangkan oleh ABRI pada masa-masa jang lampau. Terutama ABRI mempunjai kewadjiban untuk mewariskan kepada Generasi Muda, bukan hanja pengetahuan mengenai rentetan peristiwa jang terdjadi setjara kronologis, melainkan dan terutama djuga mewariskan semangat dan djiwa perdjuangan jang ada pada setiap peristiwa bersedjarah itu.

Ketiga adalah fungsi komunikatif-integratif, jakni fungsi sebagai media komunikasi dan media integrasi, baik antara Anggota ABRI sesamanja, maupun dalam hubungannja dengan Rakjat, dengan masjarakat luas.

Ini penting sekali artinja, karena sedjarah djuga mempunjai misi komunikasi dan misi integrasi, dalam arti bahwa sedjarah selain harus dapat dikenal dan diresapi baik oleh para „pelaku" maupun para „penontonnja", sedjarah djuga harus dapat mempersatukan, mengintegrasikan kedua potensi dalam masjarakat itu.

Ketiga fungsi inilah jang harus kita pegang teguh dalam setiap penulisan sedjarah, dan dalam setiap usaha Pembinaan Sedjarah Perdjoangan ABRI.

Sudah barang tentu Buku-buku Sedjarah jang diterbitkan dalam rangka SERI TEXT-BOOK ini belumlah sempurna. Djustru ini mendjadi tugas kewadjiban kita, untuk masih terus menjempurnakan dan mengembangkan nilai-nilainja.

Harapan saja tidak lain adalah, pergunakan Buku-buku Sedjarah ini sebaik-baiknja dikalangan jang luas, tidak hanja dilembaga-lembaga pendidikan ABRI – di AKABRI, SESKO-SESKO dan LEMHANNAS – tetapi sebar-luaskan pula dikalangan masjarakat.

Demikian pula, terus tingkatkan mutu SERI TEXT-BOOK SEDJARAH ABRI ini.

Djakarta, 14 September 1971.

MENTERI NEGARA/WAKIL PANGLIMA
ANGKATAN BERSENDJATA

M. PANGGABEAN
DJENDERAL TNI

PENGANTAR UMUM

Gagasan bagi penjusunan Seri Text-Book Sedjarah HANKAM/ ABRI ini untuk pertama kalinja kami adjukan setjara resmi pada Rapat Dinas Sedjarah HANKAM/ABRI, tanggal 20 April 1968. Rapat Dinas itu dihadiri oleh Kepala Pusat Sedjarah ABRI (waktu itu Lembaga Sedjarah HANKAM), Dinas Sedjarah Angkatan Darat (pada waktu itu Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat), Dinas Sedjarah Angkatan Laut (pada waktu itu Direktorat Sedjarah dan Perpustakaan Angkatan Laut), Biro Budaja dan Sedjarah/Pusat Hubungan Masjarakat Angkatan Udara, dan Biro Sedjarah Direktorat LITBANG POLRI (pada waktu itu Pusat Sedjarah Angkatan Kepolisian). Gagasan itu kami adjukan dalam rangka penjusunan Kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI jang integral bagi semua lembaga pendidikan perwira ABRI. Gagasan tersebut diterima baik dan schema kurikulum jang kami adjukan disempurnakan sehingga mentjapai bentuk sebagaimana jang tertjantum pada semua text-book dalam seri ini.

Keputusan Rapat Dinas tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Staf HANKAM, Major Djenderal M.M. Rachmat Kartakusuma pada tanggal 9 Mei 1968 dengan surat keputusan No. : KEP/B/183/1968. Untuk lebih mematangkan persiapan2 bagi pelaksanaan Projek, maka pada tanggal 21 - 22 April 1969 diselenggarakan Rapat Kerdja Kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI jang dihadiri oleh utusan2 dari AKABRI, Lembaga2 Pendidikan Landjutan Perwira, (seperti SEKUAL SEKKAU dan PTIK), SESKO-SESKO dan LEMHANNAS. Bahwa Rapat Kerdja itu dianggap penting oleh Pimpinan Departemen HANKAM, dibuktikan dengan kenjataan, bahwa Rapat Kerdja itu dibuka sendiri oleh Kepala Staf HANKAM jang baru, Letnan Djenderal Soemitro.

Rapat Kerdja itu menghasilkan saran2 untuk silabus dan sekaligus isi daripada text-book jang akan disusun. Dan segera sesudah itu Projek Penulisan Text-Book Sedjarah HANKAM/ABRI dimulai dengan Surat Keputusan Kepala Staf HANKAM tanggal 10 Djuli 1969 No. : PRIN/E/4/VII/1969.

Titiktolak gagasan menjusun rentjana kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI jang integral, mulai dari pendidikan-pendidikan pembentukan perwira (AKABRI) sampai kepada SESKO-2, dan bahkan sampai kepada LEMHANNAS, adalah dalam rangka meletakkan dasar2 bagi tradisi moril dan intelektuil bagi seluruh ABRI. Ketika gagasan itu ditjetuskan, perdjuangan untuk mentjapai

integrasi ABRI sedang mentjapai tahap menentukan. Sehingga pikiran para pedjabat HANKAM pada waktu itu ditudjukan kepada usaha-usaha untuk memperkuat semangat integrasi, terutama integrasi mental.

Pada waktu itu telah pula timbul suatu masalah jang hingga kini dianggap penting, jakni masalah pergantian generasi didalam pimpinan ABRI dari generasi 1945 kepada generasi baru, generasi lulusan AKABRI. Pimpinan ABRI jang sekarang, jang berasal dari generasi 1945 menginginkan, agarsupaja nilai-nilai jang baik dari perdjuangan mereka dapat disampaikan kepada generasi jang berikutnja. Hal itu kiranja perlu demi kontinuitas dan stabilitas didalam pelaksanaan Perdjuangan Nasional selandjutnja. Terutama dalam rangka penghajatan Dwifungsi ABRI setjara tepat.

Untuk dua tudjuan tersebut, jakni tudjuan memperkuat semangat integrasi ABRI dan tudjuan meneruskan nilai-nilai jang berharga dari perdjuangan 1945, kami anggap *Sedjarah* merupakan wahana jang paling efektif. Suatu kurikulum sedjarah jang integral bagi seluruh ABRI, jang disusun setjara sistematis mulai dari pendidikan perwira jang paling bawah sampai kepada jang paling atas, apalagi jang diperlengkapi dengan text-booknja jang sesuai, akan dapat memberikan landasan bagi semangat perdjuangan 1945 jang mudah-mudahan dapat berlangsung untuk selama-lamanja. Dengan demikian djelas, bahwa Projek Text-Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini tidak dimaksudkan sebagai suatu usaha routine belaka, melainkan sebagai suatu usaha historis-kreatif jang dapat ikut menentukan wadjah ABRI untuk masa-masa jang mendatang.

Hambatan-hambatan bagi terlaksananja Projek Text -Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini tidaklah ketjil. Pertamakali kami menjadari, bahwa projek text-book sedjarah jang disusun setjara konsepsionil dan integral sematjam ini, barulah untuk pertama kalinja ini diadakan dalam kehidupan Republik Indonesia. Untuk pendidikan umum sekalipun, belum pernah diadakan penjusunan text-book sedjarah setjara sistematis dan integral. (Baru dua tahun sesudah dilantjarkan Projek Text-Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini, kami mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan & Kebudajaan Mashuri supaja diadakan penulisan text-book sedjarah nasional bagi pendidikan umum mulai dari Sekolah Dasar sampai kepada Perguruan Tinggi, karena kini sarananja nampak lebih tersedia berupa tenaga ahli dan dana. Usul itu beliau terima baik

dan pada achir tahun 1970 telah mulai dilaksanakan oleh Panitia Penjusunan Buku Standard Sedjarah Nasional Indonesia).

Kedua kalinja kami menjadari, bahwa tenaga-tenaga jang memiliki keahlian jang sama besarnja pada bidang sedjarah dan sekaligus pada bidang HANKAM adalah sangat langka. Diantara tenaga jang sangat sedikit djumlahnja jang kebetulan menguasai kedua bidang itu dengan tjukup, lebih sedikit lagi jang menguasai kemahiran mengarang. Sehingga dapat dibajangkan, betapa sulitnja untuk menjusun suatu team jang terdiri dari tenaga-tenaga jang mempunjai kemampuan pada tiga bidang sekaligus, jakni bidang sedjarah, bidang HANKAM dan bidang mengarang. Achirnja telah tersusun suatu team jang anggota-anggotanja sedikit-banjak memenuhi tiga sjarat tersebut lagi pula representatif bagi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Karena beratnja tanggungdjawab jang harus dipikul, maka team pelaksana Projek Penulisan Text-Book Sedjarah HANKAM/ ABRI itu diketuai oleh Kepala Pusat Sedjarah ABRI (dulu Lembaga Sedjarah HANKAM) sendiri dengan kepala-kepala Dinas / Biro Sedjarah Angkatan dan POLRI sebagai wakilnja. (Ketjuali Angkatan Darat jang karena kesulitan protokoler menundjuk seorang perwira lain).

Dalam kenjataannja, pelaksanaan Projek itu berlangsung lebih kurang 2 tahun.mulai tanggal 1 Djuli 1969 hingga kepada tanggal 1 Maret 1971. Sesungguhnja waktu itu terlalu lama untuk sesuatu crash program sematjam ini. Tetapi hal itu tak dapat dihindarkan, karena semua anggota Team adalah pedjabat jang tidak dibebaskan dari tugasnja, sehingga setiap saat dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas lain. Segalanja itu menundjukkan betapa besar kesulitan-kesulitan jang harus diatasi, sebelum 24 djudul ini dapat turun dari pers dalam bentuk buku dan dipersembahkan kepada masjarakat. Kami menjadari, bahwa hasilnja adalah djauh dari memuaskan, tetapi merupakan hasil maksimal mengingat kondisi jang njata.

Seri ini terbagi atas empat kelompok : Kelompok A mengandung buku untuk LEMHANNAS, kelompok B untuk SESKO-SESKO, kelompok C untuk lembaga-lembaga pendidikan landjutan perwira (SUSLAPA, SEKUAL, SEKKAU, PTIK) dan kelompok - D untuk AKABRI. Sudah barangtentu pengelompokan itu disesuaikan dengan kurikulum jang setjara resmi telah diterima baik oleh semua lembaga pendidikan jang bersangkutan.

Semoga para pembina pendidikan perwira ABRI dapat menggunakan text-book – text-book ini dan sekaligus mengembangkannja sehingga dari waktu kewaktu dapat dilakukan penjempurnaan dan penulisan kembali berupa edisi-edisi baru.

Djakarta, 1 Maret 1971

KEPALA PUSAT SEDJARAH ABRI,

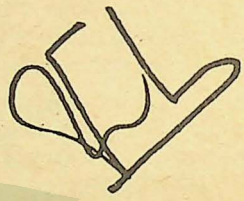

DRS. NUGROHO NOTOSUSANTO
KOLONEL TIT.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN iii
PENGANTAR UMUM v

BAB I : PERANG KEMERDEKAAN

A. MASA AWAL 1

1. Proklamasi dan penataan Rumahtangga Negara 1
2. Menyiapkan dan melaksanakan pembelaan Negara .. 4
3. Langkah-langkah pertama di bidang diplomasi 5

B. AGRESI MILITER I DAN MADIUN 10

1. Agresi Militer I 10
2. Renville 13
3. Pemberontakan PKI Madiun 19

C. AGRESI MILITER II DAN KMB 31

1. Agresi Militer II 31
2. Diplomasi ke dalam dan ke luar 35
3. Menuju pengakuan kedaulatan 41

BAB II : DEMOKRASI LIBERAL

A. INDONESIA DI BAWAH RIS 45

1. Dari sistim federal kembali ke sistim kesatuan 45
2. Kabinet silih berganti 48
3. Pemilihan Umum I 53

B. MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS NASIONAL 62

1. Menghadapi bom-waktu kolonial 62
2. Menumpas DI/TII 67
3. Menumpas PRRI/Permesta 73

C. KITA DAN DUNIA 81

1. Melaksanakan politik bebas-aktif 81
2. Mengemban tugas PBB 82
3. Konferensi Asia-Afrika 85

BAB III : DEMOKRASI TERPIMPIN

A. EXPERIMEN OTOKRASI 86

1. Kembali ke UUD '45 86
2. Penyelewengan politik 88
3. Salah-urus dan kemerosotan sosial-ekonomi 93

B. DIPLOMASI DAN KONFRONTASI

1. Politik luar negeri Nefo 94
2. Pembebasan Irian Barat 95
3. Dwikora 100

C. DOMINASI PKI 105

1. Memberi angin kepada PKI 105
2. Kampanye (PKI dan pendukungnya) mempersiapkan G.30.S./PKI 109
3. Pengkhianatan G30S/PKI 113

BAB IV : ORDE BARU

A. DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU 125

1. Kesaktian Pancasila 125
2. Aksi-aksi Tritura 127
3. Surat Perintah 11 Maret 1966 129

B. MEMULAI PEMBINAAN ORDE BARU 131

1. Meletakkan landasan Orde Baru 131
2. Membina integrasi ABRI 135
3. Memupuk persahabatan dengan semua bangsa 141

BIBLIOGRAFI 144

I. PERANG KEMERDEKAAN

A. MASA AWAL

1. Proklamasi dan penataan rumahtangga Negara

Sekalipun dirahasiakan, namun berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, melalui saluran tak resmi diketahui juga di Indonesia, terutama oleh pemuda-pemuda yang bekerja pada kantor berita Domei. Dari mulut ke mulut berita itu beredar di kalangan kaum Pergerakan Nasional. Pada saat yang genting itu Sukarno dan Hatta, dua tokoh utama pada waktu itu, sedang dalam perjalanan pulang dari Dalat, Viet Nam, memenuhi undangan Marsekal Terautji untuk membicarakan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia yang pernah dijanjikan Jepang pada waktu sebelumnya. Sewaktu tiba di tanah air mereka belum mengetahui samasekali tentang penyerahan Jepang itu. Usaha golongan muda untuk meyakinkan tokoh-tokoh tersebut dan mendesak agar supaya segera memproklamasikan kemerdekaan, gagal, dan dari sini timbullah perbedaan pendapat.

Kedua golongan (golongan tua yang diwakili oleh Sukarno — Hatta dan golongan muda) sependapat mengenai satu hal, yaitu kemerdekaan harus diproklamasikan, tetapi berbeda pendapat mengenai waktu dan isi proklamasi. Golongan tua yang telah banyak memakan asam-garam politik tidak mudah terpancing untuk melakukan tindakan terburu-buru. Mereka menghendaki segala sesuatunya dilandasi oleh perhitungan yang matang dan pemikiran yang rasionil. Bagi golongan ini kekuatan Jepang masih harus diperhitungkan, di samping kemungkinan datangnya reaksi yang keras dari pihak Sekutu; mereka terlebih dulu harus yakin, Jepang betul-betul sudah menyerah. Sebaliknya golongan muda berpendapat lain. Bagi mereka yang penting yalah bertindak lebih dahulu, sebab mereka yakin bahwa kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang, apabila hal itu memang diperlukan, cukup tersedia. Perbedaan pandangan itu terlihat dalam penculikan yang dilakukan golongan muda terhadap Sukarno — Hatta dibawa ke Rengasdengklok, dan dalam perdebatan-perdebatan yang timbul antara kedua golongan tersebut

di hari-hari menjelang Proklamasi. Ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi itupun menjadi kenyataan, terlihat bahwa pengaruh golongan tua masih dominan.

Berita Proklamasi itu segera diketahui di sekitar Jakarta melalui pamflet-pamflet yang disebarkan para pemuda atau dituliskan pada tembok-tembok rumah. Penyiarannya melalui radio baru berhasil dilakukan kira-kira jam 19.00 sore itu, sebab gedung kantor radio sejak pagi harinya dijaga ketat oleh Jepang. Ketika keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Undang-undang Dasar, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka di kawasan Asia Tenggara ini telah berdiri sebuah negara merdeka. Pembentukan departemen-departemen dan provinsi-provinsi serta pengangkatan pejabat-pejabat untuk mengepalai masing-masing departemen dan provinsi itu yang diputuskan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, merupakan langkah lanjutan untuk mengisi aparat pemerintahan. Dalam sidang yang sama diputuskan pula untuk membentuk tentara kebangsaan sebagai aparat pertahanan, tetapi berdasarkan pertimbangan politik, dalam sidang berikutnya keputusan itu diubah. Yang dibentuk hanyalah Badan Keamanan Rakyat sebagai bahagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945 bersama-sama dengan pengumuman terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Partai Nasional Indonesia.

Berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

Kabinet pertama yang diresmikan pada tanggal 2 September 1945 tidak berusia lama karena pada bulan November 1945 telah terjadi perubahan sistim pemerintahan dengan diselenggarakannya sistim parlementer. Pada tanggal 14 November kabinet presidensiil di bawah pimpinan Presiden Sukarno diganti oleh kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan

Sjahrir (Kabinet Sjahrir I). Sebelumnya Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin berhasil menyusun kekuatan golongannya (sosialis) dalam KNI Pusat dengan jalan membentuk Badan Pekerja. Pada bulan Maret 1946 Kabinet Sjahrir jatuh, tetapi kemudian Sjahrir ditunjuk lagi oleh Presiden Sukarno untuk membentuk Kabinet baru. Dalam bulan itu juga telah terbentuk Kabinet Sjahrir II. Oposisi terhadap golongan Sjahrir — Sjarifuddin dipimpin oleh tokoh Komunis "nasional" Tan Malaka yang membentuk suatu front dengan nama Persatuan Perjuangan. Pada akhir bulan Maret 1946 itu golongan Tan Malaka menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir, tetapi keesokan harinya telah dibebaskan dalam keadaan selamat. Kelanjutan dari peristiwa penculikan tersebut pada tanggal 3 Juli 1946 oleh golongan Tan Malaka dilakukan percobaan mengganti pemerintahan dengan jalan memaksa Presiden Sukarno. Percobaan itu gagal dan para pelakunya diajukan ke depan pengadilan.

Pada bulan November 1945 itu pula telah terjadi perubahan sistim kepartaian dari sistim satu partai menjadi sistim banyak partai. Sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 telah terbentuk partai-partai politik sebagai cendawan di musim hujan. Dengan perubahan sistim pemerintahan sesungguhnya telah terjadi penyelewengan dari UUD 1945, dan telah diikuti oleh sistim demokrasi liberal, yang nantinya akan semakin berkembang sejak Pengakuan Kedaulatan.

Setelah penunjukkan para gubernur, pemerintahan daerah di Sumatra dan Jawa mulai berjalan. Di Sumatra diangkat Mr. Teuku Moh. Hassan, di Jawa Barat Sutardjo Kertohadikusumo, di Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro sedangkan di Jawa Timur diangkat K.R.M.T. Surjo. Adapun keempat gubernur yang lain tidak berhasil menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, karena daerahnya masing-masing telah dikuasai oleh aparat kolonial Belanda dengan bantuan angkatan perang Sekutu. Demikianlah Ir. Pangeran Moh. Noor (Kalimantan), Dr.G.S.S.J. Ratu Langie (Sulawesi), Mr. Latuharhary (Maluku) dan I.G.Ketut Pudja (Sunda Kecil) terpaksa mengatur pemerintahannya dari Jawa. Hanya gubernur Sulawesi yang berhasil mendarat di daerahnya, tapi kemudian ditangkap oleh kekuasaan kolonial dan dibuang ke Irian.

2. *Menyiapkan dan melaksanakan pembelaan Negara*

Sejak diucapkannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda mengorganisasi dirinya dalam pelbagai badan perjuangan untuk membela kemerdekaan baik pada bidang politik maupun pada bidang fisik-militer. Di Jakarta pelbagai badan perjuangan itu dikoordinasi oleh sebuah Komite van Aksi yang bermarkas di Jalan Menteng Raya 31. Dalam waktu singkat di-pelbagai tempat di Indonesia telah terbentuk badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Pemuda Republik Indonesia di Aceh, Pemuda Republik Indonesia Andalas di Sumatra Utara, Pemuda Andalas di Sumatra Barat, Hisbullah dan Sabilillah, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, dan masih banyak lagi di Jawa. Telah terbentuk pula pelbagai organisasi pemuda dari pelbagai daerah seperti Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), dan lain-lain.

Sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah telah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai aparat penjaga keamanan setempat di pelbagai daerah. Karena perkiraan bahwa kekuatan fisik pihak Republik tidak mencukupi, Pemerintah menitik beratkan strategi perjuangan berlandaskan diplomasi. Sesuai dengan strategi itu Pemerintah tidak mau segera membentuk sebuah tentara, untuk tidak membangkitkan permusuhan dari pihak kekuatan-kekuatan asing yang pada saat itu ada di Indonesia. Karena itu Pemerintah hanya membentuk BKR-BKR yang tidak mempunyai markas besar di Pusat. Pada umumnya para pemuda tidak sepakat dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut; sebagian membentuk badan-badan perjuangan sebagai alat perjuangan, sebagian lagi memasuki BKR-BKR di daerahnya masing-masing, juga sebagai alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Dengan kedua alat perjuangan tersebut para pemuda berhasil merebut kekuasaan dari aparat-aparat Jepang di daerahnya masing-masing dan dengan demikian menegakkan kemerdekaan di pelbagai pelosok tanahair. Sudah jelas bahwa para pemuda itu menganggap dirinya pejuang dan banyak di antara mereka telah gugur di dalam pertempuran-pertempuran awal melawan Jepang dan kemudian melawan pasukan-pasukan Serikat (Inggris) dan NICA (Belanda).

Setelah situasi itu berjalan 1¾ bulan, Pemerintah merasa bahwa tidak mungkin suatu negara tegak tanpa sesuatu aparat keamanan, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pembentukan sebuah Angkatan Perang, yakni Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan pembentukan TKR itu, BKR-BKR di pelbagai daerah ditransformasi menjadi TKR. Dengan demikian dalam waktu singkat telah tersusun formasi-formasi TKR di pelbagai daerah di Jawa dan Sumatra, termasuk TKR Laut dan TKR Jawatan Penerbangan. Dalam waktu yang hampir bersamaan telah diangkat pula seorang Kepala Kepolisian Negara, yakni R.S. Sukanto Tjokrodiatmodjo, sedangkan untuk menyusun markas besar TKR ditunjuk Oerip Soemohardjo. Dalam suatu konferensi besar TKR tanggal 12 November 1945 telah terpilih Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar, sedangkan Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo terpilih sebagai Kepala Staf. Tanggal 18 Desember 1945 Jenderal Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.

Sementara itu telah berkecamuk pertempuran di pelbagai tempat di Indonesia untuk menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang hendak menghancurkan Republik Indonesia. Demikianlah dikenal pertempuran-pertempuran Surabaya, Lima Hari Semarang, Ambarawa, Cibadak, Bandung, Palembang, Medan Area, Krueng Panjoe dan lain-lain. Sesudah terbentuknya Markas Besar TKR di Yogya, dilakukan penyusunan organisasi tentara, 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra. Pada bulan Juni 1947, diadakan penyatuan antara Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan badan-badan perjuangan dan laskar-laskar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

3. Langkah-langkah pertama di bidang diplomasi.

Kekuatan asing yang harus dihadapi oleh Republik Indonesia setelah berhasil menegakkan kedaulatannya pada puing-puing kekuasaan Jepang adalah pasukan-pasukan Serikat. Yang ditugaskan oleh Serikat untuk menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang adalah Komando Asia Tenggara *(Southeast Asia Command)* di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu, Mount-

batten membentuk suatu komando khusus yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang mempunyai tiga divisi. Tugas daripada AFNEI di Indonesia adalah melaksanakan perintah Gabungan Kepala Staf Serikat yang diberikan kepada SEAC, di antaranya yalah :

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat.
3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan Serikat.

Dalam kenyataannya AFNEI hanya bertugas di Sumatra dan Jawa, sedangkan daerah Indonesia selebihnya dipasrahkan pendudukannya kepada angkatan perang Australia.

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat ini disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Serikat/Inggris ini datang membawa orang-orang NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)* yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi minimal curiga, maximal bermusuhan. Situasi dengan cepat merosot menjadi buruk sekali, setelah NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, Bandung, telah memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi. Agaknya Christison telah memperhitungkan bahwa usaha pasukan-pasukan Serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Karenanya Christison berunding dengan Pemerintah RI dan mengakui de fakto Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Dan sejak adanya pengakuan de fakto terhadap Pemerintah RI dari Panglima AFNEI itu, masuknya pasukan Serikat ke wilayah RI diterima

dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI, karena menghormati tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pasukan-pasukan Serikat dan karena penegasan Christison bahwa ia tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia. Namun kenyataannya adalah lain : di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Serikat seringkali terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak RI. Hal ini disebabkan karena pasukan-pasukan Serikat/Inggris itu tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Seperti yang terjadi di kota Jakarta sendiri, beberapa orang anggota pimpinan nasional diteror bahkan meningkat sampai kepada percobaan pembunuhan. Di Surabaya, Magelang, Ambarawa, Semarang, Medan pecah pertempuran-pertempuran antara pasukan-pasukan Serikat dengan pemuda-pemuda Indonesia.

Pihak Inggris merasa berkepentingan untuk mempertemukan pihak Indonesia dan pihak Belanda. Panglima AFNEI Letnan Jenderal Christison memprakarsai pertemuan antara pembesar-pembesar RI dan pihak Belanda. Prakarsa itu kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Inggris yang mendesak kepada pemerintah Belanda supaya mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Karena pihak Belanda tergantung kepada Inggris, mereka terpaksa menuruti anjuran Inggris itu dan dimulailah serangkaian perundingan pendahuluan dengan seorang penengah Inggris, yakni mula-mula Archibald Clark Kerr yang kemudian Lord Inverchapel. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. van Mook menyampaikan statement politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 pasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah :

1. Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki self-government di dalam lingkungan kerajaan Nederland.
2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
3. Sebelum dibentuknya commonwealth akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.

4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Usul balasan Republik baru disampaikan pada tanggal 12 Maret 1946 dan berisi antara lain :

1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungjawab Pemerintah RI.
3. Federasi Indonesia — Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
4. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Belanda harus membantu Pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
6. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Meskipun pihak Indonesia sudah mundur jauh sekali dari Proklamasi 17 Agustus 1945, namun pihak Belanda merasa belum puas dengan konsepsi Indonesia sebagai landasan untuk berunding. Setelah beberapa kali penjajagan antara Kabinet Sjahrir dengan Dr. H.J. van Mook yang mewakili pemerintah kolonial Hindia Belanda, diselenggarakan perundingan resmi dengan pemerintah kerajaan Belanda di negeri Belanda. Perundingan itu diadakan di Hooge Veluwe pada tanggal 14 — 25 April 1946 dan mengalami kegagalan.

Selama perundingan-perundingan berjalan terus, Dr. H.J. van Mook mengambil langkah-langkah untuk menyusun suatu struktur negara federal yang dikendalikan oleh Belanda. Untuk itu diadakan serangkaian pertemuan antara pelbagai pejabat pemerintah kolonial bangsa Indonesia yang daerahnya diduduki oleh Belanda. Demikian diselenggarakan konferensi Malino pada

tanggal 15 – 25 Juli 1946, konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946 dan konferensi Denpasar. Dalam pada itu Belanda secara terus-menerus mendatangkan divisi-divisinya dari negeri Belanda ke Indonesia. Pihak Inggris yang berkeinginan untuk secepat-cepatnya mengundurkan diri dari Indonesia tetap menawarkan jasa-jasa baiknya dan pada bulan Agustus 1946 mengirimkan Lord Killearn untuk menjadi penengah. Setelah melakukan pelbagai pertemuan pendahuluan akhirnya pada tanggal 10 November 1946 dibuka perundingan formil bertempat di Linggajati (sebelah selatan Cirebon) yang berhasil mencapai suatu naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal yang antara lain berisi :

- Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara, berdasarkan federasi, dinamai Negara Indonesia Serikat.
- Pemerintah NIS akan tetap bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia – Belanda.

Setelah terjadi perdebatan yang sengit baik di dalam masyarakat luas maupun dalam lingkungan KNIP, persetujuan Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Sekalipun naskah Persetujuan telah ditandatangani, hubungan Indonesia – Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa fasal persetujuan, menjadi pangkal perselisihan. Apalagi pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan pada tanggal 12 Februari 1947, seminggu sebelum naskah ditandatangani. Perbedaan tafsiran mengenai Linggajati berpusat kepada kedudukan Republik Indonesia dalam masa peralihan sebelum terbentuknya negara Federal. Pihak Republik beranggapan bahwa ia merupakan partner yang sederajat dengan pihak Belanda dalam pembentukan Negara Federal tersebut. Sebaliknya pihak Belanda menganggap bahwa dalam masa peralihan merekalah satu-satunya pihak yang berdaulat di Indonesia. Perbedaan tafsiran itu akhirnya oleh pihak Belanda hendak dipecahkan dengan kekerasan.

B. AGRESI MILITER I DAN MADIUN

1. Agresi Militer I

Penghentian tembak-menembak dan perundingan Linggajati telah meluangkan jalan bagi timbang-terima antara Inggris dan Belanda. Dalam iklim tidak ada perang itu Belanda melancarkan ofensif militer dan politik. Negara Indonesia Timur terbentuk dan kemudian Daerah Istimewa Kalimantan Barat sebagai lawan politik bagi RI. Politik non kooperasi sudah runtuh di daerah-daerah Malino berkat pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Westerling di Sulawesi Selatan. Begitu pula perlawanan Nusatenggara lumpuh setelah Belanda berhasil menghancurkan Resimen Sunda Kecil di bawah pimpinan Ngurah Rai.

Besarnya biaya operasi militer Belanda di Indonesia telah mempertipis kas Negeri Belanda yang keadaan ekonominya sudah buruk. Bagi Belanda makin cepat persoalan Indonesia diselesaikan makin baik. Selain tekanan ekonomi, terdapat pula tekanan dari golongan politik, yang menghendaki penyelesaian masalah Indonesia secara cepat. Dalam hubungan tersebut maka Perdana Menteri I.J.M. Beel dan Menteri Seberang Lautan Belanda J.A. Jonkman telah datang ke Jakarta pada pertengahan Mei 1947 guna mengadakan konsultasi dengan Komisi Jenderal.

Untuk mempercepat usahanya, maka Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 telah mengajukan sebuah nota yang bersifat ultimatif, yang harus dijawab oleh RI dalam waktu 14 hari. Bunyi nota tersebut sebagai berikut :

1. Membentuk pemerintah sementara bersama.
2. Mengeluarkan uang bersama dengan pembentukan badan bersama yang menentukan nilai uang itu terhadap nilai uang asing.
3. Menuntut pengiriman beras dengan segera dari daerah-daerah Indonesia lainnya ke daerah-daerah yang menderita kekurangan makanan.
4. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama di seluruh Indonesia dan di daerah-daerah Republik yang diperlukan, dengan bantuan Belanda.

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT

5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas import dan export.

Tanggal 19 Juni 1947 Perdana Menteri Sjahrir menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Rupanya Sjahrir telah bertindak terlalu jauh sehingga menimbulkan protes dari partai-partai antara lain Masyumi, PNI, PKI dan Parkindo. Begitu pula Kabinet dalam sidangnya pada tanggal 26 Juni 1947 melancarkan resolusi-resolusi yang menyebabkan jatuhnya kabinet Sjahrir. Pada tanggal 3 Juli 1947 terbentuk kabinet baru di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin.

Kepada Pemerintah dan rakyat Amerika, Amir Sjarifuddin menyerukan supaya berusaha mencegah terjadinya agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan dalam nota kepada Belanda, Amir menyatakan menyetujui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, mengakui adanya seorang wakil mahkota Belanda, menolak gendarmerie bersama dan sebagai gantinya menyetujui pembentukan sebuah direktorat bersama. Belanda dalam nota balasannya tanggal 15 Juli 1947 tetap menuntut gendarmerie bersama dan menyatakan bahwa sebelum tanggal 17 Juli 1947 RI harus menghentikan segala permusuhannya terhadap Belanda. Nota itu diikuti keesokan harinya dengan ultimatum bahwa nota tanggal 15 Juli itu harus dijawab RI dalam waktu 32 jam. RI meminta agar batas waktu ditangguhkan 24 jam. Belanda menolak permintaan tersebut.

RI menyampaikan juga jawabannya pada tanggal 17 Juli 1947, yang disampaikan oleh Amir Sjarifuddin melalui RRI Yogyakarta; van Mook menyatakan bahwa jawaban itu tidak memuaskan. Pada tanggal 20 Juli 1947 pemerintah Belanda memberi kuasa kepada van Mook "untuk mengambil tindakan seperlunya" terhadap RI.

Serangan Belanda terhadap delta Brantas dalam bulan Maret 1947 meyakinkan Belanda bahwa mereka sudah dapat mengukur kekuatan RI. Berdasarkan perkiraan itu dan dengan berhasilnya mengisolasi RI melalui pembentukan negara-negara boneka di luar Jawa dan Sumatra, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangannya secara serentak. Di Jawa Ba-

rat Belanda memulai serangannya dari Jakarta, Bogor dan Bandung, terus bergerak ke seluruh daerah Jawa Barat dengan Divisi C/7 Desember. Divisi B bergerak dari Bandung ke Cirebon, Semarang, Tegal, Purwokerto dan Cilacap di Jawa Tengah. Di Jawa Timur serangan dimulai dari Surabaya dengan mengerahkan Divisi A yang merupakan gabungan dari Brigade Marinir. Selain itu mereka juga melakukan operasi amphibi di Semenanjung Jawa Timur.

Hampir seluruh kota-kota di Jawa diserang dan ditembaki dari udara. Untuk menyerang Sumatra, Belanda mengerahkan 3 brigade. Serangan dimulai dari Medan dan seterusnya menyerang seluruh Sumatra Timur dengan brigade Z. Untuk merebut Padang dan sekitarnya digerakkan Brigade U sedang Brigade Y menduduki Palembang, Bengkulu dan Jambi.

Menghadapi agresi Belanda Pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan suatu rencana di bidang militer yaitu :

1. RI telah menganut sistim pertahanan rakyat total yang berintikan TNI.
2. Dekrit Presiden 5 Mei 1947 isi pokoknya antara lain : TRI dan pelbagai laskar disatukan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Pimpinan Angkatan Perang di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman mengadakan rapat di Yogyakarta untuk menyusun suatu pertahanan yang disebut dengan istilah *Wehrkreise*. Menurut penciptanya, Jenderal Nasution, yalah *Wehrkreise* diartikan kurang lebih : bahwa setiap lingkungan daerah harus berswadaya untuk mempertahankan daerahnya masing-masing dengan mengintegrasikan semua tenaga dan materiil serta bahan-bahan yang ada dalam lingkungan-lingkungan itu sendiri.

Gerakan tentara Belanda dalam agresi militer pertama ini, pada mulanya dicoba dihadapi oleh alat-alat perjuangan kita secara frontal. Rencana ini pada dasarnya secara konsepsionil didasarkan pada pengertian adanya "daerah musuh" dan "daerah kita," yang jelas terpisah oleh suatu garis pertempuran serta tutup-menutup, sambung-menyambung. Konsepsi linier ini dianut secara umum sampai ke Markas Tertinggi. Bahkan di se-

panjang garis demarkasi yang memisahkan daerah penguasaan Tentara Belanda dengan daerah-daerah Republik sebelum persetujuan Linggajati dibangun perbentengan dengan meniru konsepsi 'ala "Maginot Linie," dengan menggunakan pill-box dan parit-parit yang diperkuat. Dalam konsepsi ini tidak dipikirkan cara untuk menyatukan dan mengintegrasikan potensi perjuangan seluruhnya. Tidak ada konsepsi yang menunjuk cara mengikutsertakan kekuatan seluruhnya secara bulat.

Sistim linier tanpa dukungan persenjataan yang cukup itu dengan mudah dihancurkan oleh Belanda. Atau di mana pertahanan TNI cukup kuat, Belanda menghantamnya dari belakang. Dengan demikian maka garis pertahanan RI menjadi terpotong-potong dan kekuatannya tersebar. Setelah mengalami kegagalan dengan sistim linier pimpinan TNI memerintahkan menggunakan sistim *Wehrkreise*. Konsepsi strategi ini dilengkapi dengan taktik gerilya berdasarkan dalil-dalil :

1. Di mana musuh kuat, kita menyingkir atau mundur untuk menghemat tenga.
2. Di mana musuh lelah kita imbangi dengan serangan.
3. Di mana musuh lemah kita serang.

Pasukan TNI yang tersebar pada pukulan pertama itu berusaha mencari kontak kembali dan membangun daerah pertahanan baru. Dengan cara demikian, lama-kelamaan gerakan Belanda dapat ditahan hanya terbatas di kota-kota atau jalan-jalan raya tetapi di luar itu TNI-lah yang berkuasa.

2. *Renville.*

Agresi militer Belanda itu menimbulkan reaksi di luar negeri. Tanggal 30 Juli 1947 wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan permintaan supaya soal Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan supaya kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak dan selanjutnya supaya diadakan arbitrage untuk mencari jalan damai. Penghentian tembak-menembak itu diumumkan oleh pihak RI dan Belanda di Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1947. Dengan demikian secara resmi berakhirlah agresi militer Belanda yang pertama. Tetapi

dalam kenyataannya Belanda masih terus melakukan perluasan wilayah. Batas terakhir daripada perluasan wilayah itu, oleh Belanda dituntut sebagai garis demarkasi, yang dikenal dengan nama "garis van Mook." Garis van Mook adalah semata-mata garis khayal yang ditarik dari batas terakhir pasukannya berhenti. Penguasaan daerah-daerah itu bertujuan untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan selanjutnya.

Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk komisi konsuler yang anggota-anggotanya terdiri daripada konsul jenderal. Komisi konsuler diketuai oleh konsul jenderal Amerika Dr. Walter Foote dan beranggotakan konsul jenderal Cina, konsul jenderal Belgia, konsul jenderal Perancis, konsul jenderal Inggris dan konsul jenderal Australia. Komisi konsuler ini kemudian diperkuat dengan personalia militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, komisi konsuler menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah penghentian tembak menembak dirasakan tidak memuaskan. Belum ada tindakan yang praktis untuk menyelesaikan masalah penghentian tembak-menembak untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh.

Sementara itu Dewan Keamanan PBB tetap mengadakan sidang-sidangnya untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia — Belanda sebagai lanjutan dari penghentian tembak-menembak. Dalam sidang tanggal 26 Agustus 1947 berhasil diperoleh suatu kompromi antara usul Amerika Serikat dan usul Uni Sovyet. Dalam sidang ini wakil Uni Sovyet mengusulkan supaya dibentuk komisi Dewan Keamanan terdiri atas 11 negara yang akan mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak di Indonesia. Usul itu disetujui oleh 7 negara, 2 negara blanco sedangkan Inggris menggunakan hak vetonya sehingga usul Uni Sovyet dibatalkan. Akhirnya Amerika Serikat mengusulkan supaya Dewan Keamanan membentuk komisi jasa baik yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara yang masing-masing ditunjuk oleh Belanda dan Republik, sedangkan kedua negara

ini akan menunjuk negara ketiga. Ketiga negara ini akan menjadi perantara dalam pertikaian Indonesia — Belanda. Komisi ini kemudian terkenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN).

Kabinet Republik dalam sidangnya tanggal 6 September telah memutuskan untuk meminta kepada pemerintah Australia supaya menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Sementara itu Belanda memilih Belgia sebagai anggota. Pada tanggal 19 September, Australia dan Belgia telah memilih Amerika Serikat sebagai negara ketiga dalam Komisi Tiga Negara.

Oleh Pemerintahnya masing-masing telah ditetapkan wakilnya yang duduk dalam Komisi tersebut yaitu Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, Australia diwakili oleh Richard Kirby sedangkan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Pada tanggal 27 Oktober KTN tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaannya.

KTN mengadakan pertemuan di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa tugas mereka di Indonesia yalah membantu menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Karena itu mereka harus berusaha mencari jalan untuk mendekatkan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik yang akan dijadikan dasar perundingan waktu mendatang. Dalam memecahkan persoalan militer KTN dapat mengambil inisiatif, sedangkan dalam memecahkan persoalan politik boleh memberikan usul saja tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

Persoalan pertama yang timbul adalah persoalan tempat berunding. Belanda mengusulkan Jakarta, tetapi ditolak RI dengan alasan kurang menguntungkan karena di samping kemerdekaan untuk menyatakan pendapat tidak ada, jawatan-jawatan Republik tidak berjalan lagi setelah diadakan agresi militer Belanda. Republik menginginkan suatu tempat di luar daerah kekuasaan Belanda. KTN kemudian mengusulkan sebuah kapal untuk berunding. Setelah usul KTN disetujui oleh Republik dan Belanda, kemudian diminta kepada Wakil Amerika Serikat agar disediakan sebuah kapal.

Sambil menunggu kedatangan kapal, telah timbul perbedaan pendapat mengenai masalah apa yang akan didahulukan,

politik atau militer. Belanda beranggapan agar perundingan militer didahulukan; sedangkan pihak Republik beranggapan bahwa perundingan militer dan politik tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu untuk melaksanakan penghentian permusuhan sesuai dengan putusan Dewan Keamanan PBB tanggal 1 November 1947, maka Pemerintah Republik pada tanggal 5 November telah membentuk Panitia Istimewa yang diketuai oleh Dr. J. Leimena dengan anggota-anggota terdiri dari pejabat sipil dan militer. Komisi tehnis Belanda diketuai oleh Van Vredenburgh. Sebagai penghubung, KTN membentuk Komisi Penghubung yang diketuai oleh Kolonel Myers. Demikianlah maka diadakan serangkaian pertemuan pendekatan antara Republik dengan Belanda.

Perundingan mengenai masalah militer mengalami kesulitan-kesulitan karena masing-masing pihak saling curiga-mencurigai. Pihak Republik minta agar tempat-tempat yang sejak tanggal 1 Agustus diduduki oleh Belanda dikembalikan, agar status Jakarta ditetapkan seperti sebelum agresi Belanda.

Guna menghadapi persiapan perundingan politik, kedua pihak telah menyiapkan susunan delegasinya masing-masing. Delegasi Republik yang dibentuk pada tanggal 6 Oktober 1947 dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo. Dalam delegasi ini Belanda mengikut-sertakan wakil-wakil negara-negara bagian sebagai anggota. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat *Renville* di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah melalui proses pendekatan antara delegasi Indonesia dan Belanda, akhirnya kedua belah pihak menerima saran-saran yang diajukan KTN, antara lain berisi ketentuan-ketentuan : 1. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak sepanjang "garis van Mook." 2. Hal ini segera diikuti dengan perjanjian perletakan senjata dan membentuk daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones). Persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dan terkenal dengan nama Perjanjian Renville itu terdiri atas 3 bagian yaitu :

1. Persetujuan Gencatan Senjata (10 pasal)
2. 12 pasal prinsip-prinsip politik
3. 6 pasal prinsip tambahan dari KTN

Perjanjian itu menempatkan RI pada posisi yang bertambah sulit. Wilayah RI semakin sempit, dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Kesulitan itu ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda secara ketat. Sebagai akibat persetujuan Renville, 35.000 anggota Divisi Siliwangi harus dihijrahkan dari Jawa Barat, ke daerah Jawa Tengah. Sesuai dengan isi persetujuan, ditentukan bahwa pemindahan pasukan dilakukan dalam jangka waktu 21 hari terhitung dari saat penandatanganan Perjanjian Renville. Perjalanan hijrah dilakukan dengan dua jalan melalui laut dan darat. Melalui laut pasukan-pasukan dikumpulkan di pelabuhan Cirebon, kemudian dengan kapal laut diangkut menuju pelabuhan Rembang di Jawa Tengah. Melalui darat pasukan-pasukan dikumpulkan di stasiun Parujakan (Cirebon) dan kemudian dengan kereta api diberangkatkan menuju Gombong di Jawa Tengah. Dengan adanya perintah harus meninggalkan Jawa Barat, di kalangan prajurit timbul rasa marah, atau usul minta berhenti sebagai protes terhadap pelaksanaan hijrah. Hal ini terjadi karena telah ada jalinan batin yang erat antara TNI dengan rakyat setempat. Sebenarnya ketika ultimatum "garis van Mook" yang diajukan Belanda pada tanggal 9 Januari 1948 dibicarakan oleh Pemerintah di Yogyakarta, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Mayor Jenderal Didi Kartasasmita sebagai penasehat militer delegasi Republik tidak dapat menerima ultimatum ini. Para politikus sebaliknya menerima tuntutan itu. Sebagai akibat diterimanya "garis van Mook," maka daerah Republik di Jawa tinggal bagian ujung barat (Banten), Jawa Tengah dengan dikurangi kota-kota pelabuhan di tepi pantai utara, sebagian Madura serta ujung timur dari Jawa Timur. Karena Pemerintah dianggap terlalu murah menaksir Angkatan Perangnya sendiri, maka Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo mengundurkan diri sebagai protes.

Di Jawa Timur, jumlah tentara yang ditarik tidak sebesar jumlah yang dihijrahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ber-

dasarkan persetujuan Renville, daerah Republik di Jawa Timur meliputi keresidenan-keresidenan Madiun, Kediri, sebagian Surabaya, Bojonegoro dan daerah Malang Selatan. Pasukan-pasukan Republik di daerah Malang dan Besuki harus ditarik ke daerah Republik. Karena Malang Selatan termasuk daerah RI maka pasukan dari Malang Utara pindah ke Malang Selatan. Pasukan-pasukan yang berada di Besuki ditarik ke daerah RI di Blitar, Purwosari dan Kediri. Jumlah pasukan yang ditarik ± 6000 orang. Di Sumatra karena sedikitnya pasukan Republik di daerah Belanda, maka pemindahan pasukan hanya terdapat sekitar Palembang. Mereka ditarik ke daerah Lubuk Linggau dan Keresidenan Lampung.

Pada waktu perintah hijrah dikeluarkan, di Jawa Barat terdapat pasukan-pasukan Hisbullah dan Sabilillah yang tidak mau mentaati perintah tersebut. Kekuatan mereka berada di perbatasan Majalengka — Tasikmalaya dipimpin oleh Kamran dan Oni. Mereka kemudian menemui Kartosuwirjo, salah seorang pemimpin Islam yang telah mencita-citakan pembentukan Darul Islam sejak ia aktif dalam partai PSII tahun 1935. Dengan ditariknya pasukan TNI keluar dari daerah Jawa Barat, tempat mereka diisi oleh gerakan "Darul Islam" (DI) di bawah Kartosuwirjo. Pada mulanya rakyat yang ditinggalkan TNI menyambut baik gerakan Kartosuwirjo, karena merasa kurang senang ditinggalkan oleh TNI. Gerakan ini pada mulanya memang berjuang melawan Belanda dengan didasari fanatisme keagamaan. Tetapi ketika Persetujuan Renville ditandatangani, mereka juga menentang Republik, dengan mengemukakan dalih bahwa Pemerintah RI telah menjual rakyat Jawa Barat kepada Belanda.

Politik hijrah yang digariskan oleh kaum politik, khususnya kaum sosialis dan komunis itu menimbulkan akibat-akibat serius di bidang ekonomi dan pertahanan. Ke daerah RI yang sudah sempit itu harus dimasukkan puluhan ribu pasukan hijrah. Hal itu berarti menambah beban pembiayaan di daerah yang ekonomis sudah parah itu. Pengosongan kantong-kantong gerilya berarti menghancurkan potensi pertahanan sendiri yang dengan susah payah telah dibangun pada masa sebelumnya. Dengan Renville semakin sempurnalah kepungan Belanda terhadap RI.

3. Pemberontakan PKI Madiun.

Perjanjian Renville menimbulkan pertentangan politik di dalam negeri. Masyumi dan PNI menarik diri dari kabinet karena mereka tidak dapat menerima persetujuan tersebut. Karena kehilangan pendukung utamanya, akhirnya Amir Sjarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948 mengembalikan mandat kepada Presiden. Oleh Presiden Sukarno kemudian ditunjuk Drs. Moh. Hatta sebagai formatur kabinet baru. Hatta yang sebelumnya telah mendapatkan dukungan Masyumi dan PNI mencoba mendekati kelompok Sayap Kiri (Sosial dan Komunis) karena ia ingin membentuk kabinet yang mendapat dukungan luas. Usahanya itu tidak berhasil, karena Sayap Kiri menuntut pos-pos inti seperti jabatan menteri pertahanan dan menteri dalam negeri.

Hatta tak mungkin memberikannya, karena Masyumi dan PNI tidak ingin adanya kabinet yang didominasi oleh Sayap Kiri. Hatta sebenarnya sudah menawarkan empat pos kursi menteri pada mereka (seperti juga pada PNI dan Masyumi), tetapi Sayap Kiri telah meminta sepuluh kursi. Sementara itu di pihak Sayap Kiri sendiri terjadi perpecahan antara grup Sjahrir yang ingin menyokong Hatta dengan grup Amir Cs yang menolak. Sebagai akibatnya terjadilah perpecahan antara pengikut-pengikut Amir yang komunistis dengan pengikut-pengikut Sjahrir yang beraliran sosialis kanan.

Pada tanggal 29 Januari 1948 kabinet presidensiil Hatta diumumkan tanpa wakil-wakil Sayap Kiri duduk di dalamnya. Kelompok Amir meneruskan oposisi dan pada tanggal 26 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Solo yang terdiri dari Partai Sosialis (grup Amir), Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Sobsi. FDR menuntut supaya pemerintah membatalkan perjanjian-perjanjian Linggajati dan Renville pada hal golongan mereka sendiri yang membuat perjanjian-perjanjian itu ketika duduk di dalam pemerintahan! Mereka juga menuntut agar perundingan-perundingan yang diadakan dengan pihak Belanda dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan serta mengusulkan agar pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tanpa kompensasi. Program mereka mirip

dengan program Persatuan Perjuangan Tan Malaka, di samping pengaruh dari Konferensi Pemuda Asia Tenggara yang diselenggarakan di Kalkuta dari tanggal 19 — 26 Februari 1948. Indonesia dalam konferensi itu diwakili oleh Suripno dan Fangiday. Konferensi itu rupa-rupanya telah membahas petunjuk-petunjuk dari Gerakan Komunis Internasional yang telah merumuskan garis keras terhadap "blok Barat." Menyinggung tentang masalah perjuangan pemuda-pemuda Indonesia akan melanjutkan perjuangan sampai kemerdekaan penuh tercapai walaupun terdapat persetujuan-persetujuan antara pemerintah Belanda dan Indonesia di bawah tekanan Komisi Tiga Negara. Garis "keras" Zhdanov yang menggantikan garis "lunak" Dimitrov yang terdahulu ini kemudian ditrapkan di Indonesia oleh FDR. Sementara itu, Hatta yang menyadari bahwa adalah merupakan hal yang tidak sehat apabila Angkatan Perang terlalu dipengaruhi oleh golongan politik tertentu, dalam hal ini oleh golongan Amir cs menjalankan politik rasionalisasi di kalangan Angkatan Perang. Adapun aspek politiknya adalah memotong-motong garis Amir di kalangan Angkatan Perang dan laskar-laskar bersenjata. Karena itu politik rasionalisasi ditentang oleh golongan kiri, sekalipun rencana semula berasal dari golongan tersebut. Dengan perkembangan selanjutnya mulai pertengahan tahun 1948 mereka mulai menyusun rencana perebutan kekuasaan (atau menurut istilah mereka : Menginjak tingkatan perjuangan militer baru). FDR telah membagi rencananya menjadi dua yaitu melalui jalan parlementer (politik) serta melalui non-parlementer.

Dalam bidang politik selain menggunakan cara-cara parlementer, mereka juga melancarkan agitasi-agitasi serta demonstrasi-demonstrasi. Dengan datangnya Musso yang dinilai mereka sebagai pemimpin komunis yang berwenang mengadakan perubahan-perubahan, maka akhirnya PKI telah menerima konsepsi rumusan Musso : "Jalan Baru untuk Republik Indonesia." Dalam konsepsinya itu ditegaskan bahwa dunia telah terpecah dua, yaitu blok kapitalis-imperalis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti-imperialis, di bawah pimpinan Uni Sovyet. Karena sifat perjuangan Indonesia anti imperialis, maka Indonesia harus berada di pihak Rusia.

Menurut Musso, PKI telah melakukan kesalahan-kesalahan prinsipiil, karena tidak cepat dapat menangkap perubahan situasi yang terjadi setelah Proklamasi. Orang-orang komunis (ilegal) setelah Proklamasi tidak langsung mendirikan partai komunis yang memimpin revolusi, malah mendirikan 3 partai Marxis, yaitu partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh dan PKI. Adanya ketiga partai tersebut membuat kader-kader PKI tidak dapat berkonsentrasi secara penuh. Akibatnya timbul kelemahan-kelemahan organisatoris. Kaum komunis Indonesia menurut Musso terlalu membesar-besarkan kekuatan imperalis dan mengecilkan kekuatan tenaga anti-imperialis yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Di kalangan pemuda, PKI dinilai kuat, tetapi karena Pesindo bukan organisasi front PKI, akibatnya propaganda PKI di kalangan pemuda terhalang. Untuk memperkokoh persatuan, diusulkannya agar diadakan fusi antara PKI, Partai Buruh dan Partai Sosialis menjadi PKI, sehingga keruwetan-keruwetan organisasi dapat dihindarkan. Orang-orang yang bersimpati pada PKI tetapi segan memasuki partai tersebut, ditampung dalam Lembaga Indonesia — Uni Sovyet. Selanjutnya dikoreksi pula oleh Musso munculnya "reformis" seperti Sjahrir dengan semboyan : "Bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, tetapi kemenangan politik." Menurut pendapatnya kaum komunis telah membiarkan berkembangnya ideologi sesat itu. Dinyatakannya bahwa revolusi nasional Indonesia sudah menjadi bagian dari revolusi proletar dunia yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Bagi revolusi nasional Indonesia tidak ada pilihan kecuali berpihak pada kekuatan anti-imperialis.

Kesalahan lain yalah ketidak-mengertian kaum komunis Indonesia atas perubahan kekuatan politik di Asia. Penduduk-an Uni Sovyet atas Mancuria menyebabkan Amerika, Inggris dan Australia lebih bersatu. Berlawanan dengan yang semestinya, di Indonesia diberikan konsesi-konsesi pada kaum imperialis dengan Linggajati dan Renville. Karena kesalahan itulah Amir Sjarifuddin meletakkan jabatan tetapi hal itu memberikan kemungkinan masuknya kekuatan borjuis dalam pemerintahan. Golongan ini sempat menjalankan penghapusan hak-hak demokrasi "seperti pemogokan dan demonstrasi." Dianjurkan oleh Musso agar kaum komunis mengorganisasi rakyat

serta merubah haluan politik pemerintah. Demikianlah akhirnya kaum komunis menolak persetujuan Renville/Linggajati yang mereka bikin sendiri. Penolakan itu dibela dengan alasan bahwa persetujuan-persetujuan itu bila dipraktekkan akan mewujudkan negara yang pada hakekatnya sama saja dengan jajahan. Sementara itu hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet dituntut terus. Sasaran lain dari agitasi Musso yalah persoalan pemerintahan yang dianggapnya terlalu "berbau penjajahan." Hal itu terutama ditujukan pada bidang-bidang pemerintahan dalam negeri, kepolisian, pengadilan dan ketentaraan serta aparat vital lainnya.

Gagasan yang terpenting dari Musso dalam rangka "grand strategy" PKI yalah: Pertama tentang pembentukan front Nasional maka dihimpun kekuatan-kekuatan komunis dan non komunis yang dipimpin oleh PKI. Kedua ia ingin merubah organisasi PKI menjadi partai Marxis-Leninis yang tunggal. Ketiga menyesuaikan garis partai dengan garis keras dari Komintern (Komunis Internasional). Gagasan pertama tentang front nasional dilontarkan dalam bentuk diskusi dengan partai-partai beberapa hari setelah ia tiba di Yogya. Dalam diskusi ini Musso menyatakan bahwa kesalahan revolusi Indonesia adalah karena bersifat defensif. Kesalahan strategis ini harus segera diperbaiki. Tentang front nasional dikatakan, bahwa tahap pertama semua partai harus mengadakan pendekatan pemikiran untuk kemudian membentuk komite untuk mendirikan front nasional (FN). Anggota-anggota partai tadi kemudian secara individuil memasuki FN. Dengan demikian FN berakar di bawah. Juga golongan-golongan yang tidak berpartai boleh memasuki FN.

Sementara itu Pemerintah mulai mengadakan ofensif terhadap PKI. Tindakan pertama adalah pelepasan Tan Malaka dan tawanan-tawanan politik golongannya pada pertengahan September 1948. Sebagai pendukung kelompok Tan Malaka sejak tanggal 6 Juni 1948 di Surakarta berdiri organisasi Gerakan Revolusi Rakyat (GRR), kelompok yang mengumandangkan orientasi nasionalistis antara lain : "Selama Kedaulatan Negara Kesatuan RI atas seluruh Indonesia belum dikenal oleh seluruh dunia, adalah tidak mungkin untuk memainkan peranan dalam kekacauan-kekacauan internasional (perang dingin)." Tenaga-tenaga anti FDR makin bertambah kuat, meskipun FDR di bawah pimpinan

Musso telah menempuh garis politik radikal seperti yang dicita-citakan Tan Malaka dahulu. Sebenarnya dalam beberapa hal idee grup GRR dengan FDR bersamaan, tetapi karena soal-soal prinsipiil (GRR, Komunis nasional, sedang FDR berorientasi pada Moskwa), mereka saling bermusuhan.

Untuk memperbanyak jumlah anggota PKI yang sudah ada, dalam rencana ditambah dari Partai Sosialis dan Buruh masing-masing kira-kira 30.000 orang lagi. Di kalangan Partai Sosialis dan buruh idee-idee peleburan, relatif tidak ditentang, karena elemen-elemen non-komunis kepada partai telah memisahkan diri dan membentuk PSI dan Partai Buruh Merdeka.

Dalam dokumen yang berhasil disita di rumah Amir Sjarifuddin, tercantum bahagian yang menyebutkan bahwa Solo akan dijadikan sebagai daerah "wild west," maksudnya daerah kacau. Hal itu dimaksudkan agar perhatian Pemerintah,-tertuju ke Solo, dan sementara itu PKI dapat memusatkan kegiatan yang sesungguhnya di Madiun. Di Solo akan ditempatkan pasukan yang kuat agar kekuasaan de fakto daerah itu berada di tangan mereka. Di Solo pada waktu itu terdapat beberapa kesatuan TNI dan laskar. Resminya daerah itu ada di bawah kekuasaan Divisi IV Panembahan Senopati dengan panglimanya Kolonel Sutarto. Dalam suasana politik yang tegang dan kacau, pasukan-pasukan tersebut mudah dipengaruhi oleh salah satu golongan. Selain terdapat kesatuan-kesatuan yang pro-PKI yakni laskar Pesindo, kesatuan yang anti-PKI, yaitu Barisan Banteng yang pro Tan Malaka dan pasukan Tentara Laut RI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Jadau yang pro PKI, terdapat pula pasukan Tentara Pelajar di bawah Achmadi dan kesatuan-kesatuan Siliwangi yang dihijrahkan sebagai akibat Renville.

Usaha PKI-Musso mempengaruhi kesatuan-kesatuan tentara hijrah/Siliwangi tidak berhasil. Oleh karena itu dengan adanya kesatuan-kesatuan Siliwangi di Solo merupakan rintangan yang paling besar terhadap rencananya untuk mengacau dan menguasai daerah Solo. Mulai timbul ketegangan-ketegangan antara pasukan-pasukan Divisi IV/Panembahan Senopati dengan kesatuan-kesatuan tentara hijrah. Dalam situasi yang demikian tiba-tiba pada tangal 2 Juli 1948 terjadi pembunuhan atas diri Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV/Panembahan Senopati oleh orang yang tidak di-

kenal. Pihak Panembahan Senopati menduga pembunuhnya adalah anggota Siliwangi. Sehingga ketegangan makin memuncak yang kemudian meletus menjadi insiden bersenjata. Kontak senjata terjadi di Tasikmadu: pasukan dari Brigade Jadau yang pro PKI menyerang Batalyon Rukman dari Siliwangi. Pihak penyerang dapat dipukul mundur dan kemudian peristiwa tersebut dapat diselesaikan oleh pihak atasan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan pada bulan Agustus 1948 Batalyon Rukman dirembeskan kembali ke Jawa Barat.

Insiden-insiden bersenjata yang timbul di Solo merupakan rencana strategis PKI-Musso yang sedang mempercepat persiapan terakhir untuk melakukan pemberontakan. Pada tanggal 13 September 1948 mulai jam 10.00 pagi terjadi lagi serangan yang dilancarkan terhadap Kompi Oking Batalyon Umar/Siliwangi yang berkedudukan di Solo Balapan oleh pasukan dari Divisi IV/Panembahan Senopati. Kompi Komir yang berkedudukan di Kleco segera memberi bantuan dan ketika sampai di pasar Srambatan mereka dihadang oleh pasukan Brigade VII/TLRI. Pertempuran mulai berlangsung dari jam 13.00 hingga jam 18.30. Kompi Komir berhasil memukul mundur pihak lawan ke jurusan Tirtonadi, Jebres dan Lawean. Gerakan Kompi Komir dilanjutkan menuju Solo Balapan untuk memberikan bantuan terhadap Kompi Oking yang sedang dikepung. Pertempuran baru berhenti pada jam 02.00.

Sementara itu pada tanggal 1 September 1948 terjadi penculikan terhadap dr. Muwardi pemimpin GRR (Gerakan Revolusi Rakyat) oleh kesatuan Pesindo yang pro PKI. Maka pada tanggal 15 September 1948 mulai jam 18.00 meletus pertempuran antara pasukan Pesindo dengan Barisan Banteng yang kemudian melebar ke luar kota. Untuk mengatasi ketegangan-ketegangan di Solo itu, di ibukota RI Yogyakarta dilakukan pembicaraan-pembicaraan antara Panglima Besar Soedirman, Kolonel Nasution dan Komandan CPM Kolonel Gatot Subroto. Dalam pembicaraan itu diusulkan agar Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi gubernur militer daerah istimewa Surakarta dengan kekuasaan penuh untuk menumpas kerusuhan-kerusuhan. Wilayah kekuasaannya juga meliputi Semarang, Pati dan Madiun.

Setelah disetujui oleh Presiden dan Kabinet, kemudian

Presiden mengumumkan keadaan perang di Surakarta serta mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur Militer di Surakarta dengan tugas mendamaikan dan merasionalisasi pasukan-pasukan. Segera Gubernur Militer Gatot Subroto mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada semua pihak yang saling bertentangan. Dalam pengumuman No. 1 diminta agar supaya tembak-menembak segera dihentikan selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948 jam 12.00. Selain itu, para komandan pasukan yang sedang bermusuhan tadi diperintahkan menghadap Gubernur Militer di kantor keresidenan Surakarta untuk menyatakan kesetiaannya kepada Pemerintah RI. Selanjutnya mereka menerima perintah-perintah dan instruksi-instruksi guna mengembalikan keadaan menjadi normal. Perintah tersebut juga berlaku terhadap komandan-komandan yang sedang berada di luar kota. Kepada mereka diberikan kesempatan sampai tanggal 21 September jam 21.00. Bila dalam waktu yang ditentukan ternyata tidak mengindahkan maklumat tersebut, dianggap memberontak terhadap Pemerintah RI dan akan dilakukan tindakan keras. Pengumuman Gubernur Militer ternyata tidak mereka hiraukan, bahkan PKI-Musso melanjutkan dan meningkatkan permusuhan antara pasukan-pasukan yang ada.

Sementara kerusuhan-kerusuhan dikobarkan di Surakarta, PKI tidak melupakan sasaran utamanya yaitu keresidenan Madiun. Di daerah ini dilakukan teror terhadap rakyat. Hampir di setiap desa terjadi perampokan, penculikan dan pembunuhan terhadap penduduk yang anti-PKI. Hal itu dimaksudkan agar di kalangan rakyat timbul rasa tidak percaya terhadap Pemerintah.

Setelah masa proloog dianggap selesai, maka pada tanggal 18 September 1948 PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Setelah seluruh kota mereka kuasai, pada jam 14.00 siang pada hari itu FDR memproklamasikan berdirinya "Sovyet Republik Indonesia." Proklamasi disiarkan oleh tokoh komunis yang menjabat Wakil Walikota Madiun, Supardi. Kemudian Supardi mengangkat Kolonel Djokosujono menjadi "Gubernur Militer" Madiun. Mereka berhasil menguasai Madiun yang dianggap sebagai daerah yang dibebaskan. Dengan memakai radio "Gelora Pemuda" pimpinan pemberontak melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat.

Adapun kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk mendukung pemberontakan ini yalah kesatuan Pesindo di bawah pimpinan Sumarsono, sebagian dari pasukan slagorde Divisi VI Jawa Timur, sebagian pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Djokosujono dan sebahagian lagi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumantri dan Letnan Kolonel Dahlan. Dengan kekuatan tersebut di atas mereka berhasil menyergap pasukan-pasukan yang setia kepada Pemerintah. Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, Markas Polisi Militer dan asrama Polisi mereka kuasai setelah terlebih dahulu melucuti pasukan-pasukan yang mengawal tempat-tempat tersebut. Sesudah itu dilucuti pula Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Genie Pelajar (TGP).

Esok harinya tanggal 19 September 1948, FDR membentuk pemerintahan baru dan sebuah front nasional dengan anggota-anggota terdiri dari Sobsi, PKI, Partai Buruh, Pesindo. Letnan Kolonel Sumantri diangkat sebagai Wakil Komandan Teritorial, Indarto menjadi Wakil Residen dan Purba sebagai Walikota.

Dalam serangkaian pidato radio tanggal 20 September 1948 Djokosujono mengatakan bahwa bahagian yang terpenting daripada revolusi Indonesia yalah membersihkan Tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner dan kolonial. Musso menuduh Sukarno — Hatta menjalankan politik kapitulasi dan hendak menjual tanah air kepada kaum imperialis. Suripno menyatakan bahwa gerakan Madiun bukanlah perampasan kekuasaan, tetapi hanya suatu usaha pembersihan terhadap kaum reaksioner.

Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dalam pidato radionya Presiden Sukarno mengajak rakyat untuk memilih antara Sukarno-Hatta atau Musso, untuk bertindak tidak ragu-ragu. Markas Besar Angkatan Perang segera mengadakan rapat untuk menyusun rencana operasi penumpasan. Tindakan lain juga dilakukan yalah pembredelan dan pelarangan terbit berkala komunis seperti *Patriot*, *Bintang Merah*, *Revolusioner* dan *Suara Ibukota*. Para pemimpin redaksinya ditangkap. Penangkapan juga dilakukan di markas besar Pesindo dan Sobsi.

Reaksi terhadap pidato Presiden ternyata positif. Partai-partai kecuali FDR memberikan sokongan dan kekuasaan penuh

kepada Presiden untuk menumpas pemberontakan dalam waktu tiga bulan. Setelah menerima kepercayaan itu, Pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Penangkapan dilakukan antara lain terhadap Tan Ling Djie, Maruto Darusman dan Ngadiman.

Untuk menghadapi pemberontakan itu secara militer, maka Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai daerah istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat menjadi Gubernur Militer. Sejumlah oknum Angkatan Perang yang terlibat dalam pemberontakan itu dipecat karena berkhianat terhadap negara.

Sementara itu pemerintahan pemberontak yang dibentuk di Madiun itu pada tanggal 20 September telah mengumumkan program nasionalnya. Isi pokok program itu yalah antara lain perombakan aparat pemerintahan, serta mengadakan nasionalisasi perusahaan, pabrik, bank, dan lain-lain. Setelah nampak bahwa pemberontak tidak memperoleh dukungan nasional, mereka mulai menjilat ludah kembali. Hal itu nampak pada pidato radio Amir Sjarifuddin tanggal 23 September 1948. Dalam pidato itu ditegaskan bahwa mereka tidak berontak, undang-undang dasar RI tetap diakui, begitu pula bendera Merah Putih tetap mereka akui sebagai bendera kebangsaan.

Sebenarnya FDR membuat perhitungan bahwa 35 persen dari tentara berada di pihak mereka. Ketika pemberontakan mereka lancarkan ternyata perhitungan mereka meleset. Inti kekuatan mereka di Madiun terdiri dari batalyon-batalyon : Musjofa (Madiun), Mursid (Saradan), Darmintoadji (Ngawi), Pandjang Djokoprijono (Ponorogo), Abdurrachman dan Maladi Jusuf (Ponorogo dan Sumoroto). Umumnya mereka adalah bekas Pesindo yang kemudian tergabung dalam Brigade Dachlan. Kekuatan mereka di Jawa Tengah adalah Komando Pertempuran Panembahan Senopati (Surakarta) kecuali Brigade V di bawah Mayor Slamet Rijadi yang tetap setia kepada Pemerintah RI.

Pemerintah RI mengalami kesulitan, karena sebagian besar pasukan yang ada, terikat garis demarkasi menghadapi Belanda. Pasukan-pasukan yang dapat dikerahkan terutama terdiri dari Kesatuan Reserve Umum Divisi III Siliwangi yang berjumlah 2 brigade (Sadikin dan Kusnoutomo). Dari Jawa Timur pasukan-pasukan yang dikerahkan terdiri dari Brigade Surachmad berkekuatan 3 batalyon. Karena Panglima Besar Jenderal Soedirman

Laksamana Atmadji, Letnan Kolonel Kusnandar dan Letnan Kolonel Dachlan. Setelah Madiun jatuh pada tanggal 1 Oktober pihak pemberontak merencanakan perlawanan gerilya dari basis pertahanan yang telah mereka persiapkan di lereng gunung Wilis. Usaha ini tidak berhasil mereka laksanakan karena cepatnya gerakan pasukan-pasukan Siliwangi, sehingga bagi pemberontak tidak ada kesempatan untuk berkonsolidasi. Juga basis pertahanan mereka di Dungus yang merupakan pusat amunisi dan gudang senjata telah diduduki oleh Batalyon Sabaruddin. Dengan jatuhnya Dungus maka rencana pertahanan yang telah mereka atur gagal. Di Dungus diketemukan 60 mayat. Ponorogo berhasil direbut TNI pada tanggal 2 Oktober 1948. Setelah Dungus dan Ponorogo jatuh, maka tokoh-tokoh pemberontak mencoba untuk menghindar bersama pasukannya. Mereka melakukan gangguan-gangguan terhadap jalan Madiun — Solo. Musso melarikan diri ke selatan, tetapi di kampung Sumandang (Ponorogo) ia berhasil ditembak mati.

Dari barat dikerahkan 5 kesatuan, yaitu Batalyon Daeng, Achmad Wiranatakusumah, Sambas, Nasuhi dan Brigade Kusnoutomo, semuanya dari Kesatuan Reserve Umum Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin ditambah dengan Batalyon Sumadi dari Panembahan Senopati serta Kompi gabungan Hizbullah dan Barisan Banteng di bawah Kapten Lucas. Kepada pimpinan operasi diperintahkan untuk merebut Madiun dalam waktu 7 hari. Perlengkapan pasukan minim sekali. Mengingat peralatan komunikasi sangat terbatas, seperti tidak adanya radio, kendaraan bermotor, maka inisiatif komandan sangat menentukan. Bahan makanan dan amunisi terbatas, sedang sistim pengangkutan dilakukan dengan cikar. Mereka berjalan beriring melalui Plaosan dan Gorang-gareng ke Madiun. Mereka berjalan dengan membentuk formasi beriring sepanjang 3 — 5 km untuk mengesankan bahwa mereka merupakan pasukan yang besar. Khusus kepada Brigade Kusnoutomo ditugaskan untuk mengadakan pengamanan di daerah Surakarta, Pati dan Semarang.

Setelah berjalan enam hari sejak tanggal 25 September, sampailah mereka di kota Madiun pada tanggal 30 September. Dalam gerakannya ternyata mereka hanya mengalami serangan kecil-kecilan. Kota Madiun telah ditinggalkan oleh satuan-satuan

pemberontak sehari sebelumnya. Dari arah Ngawi dan Purwodadi satuan-satuan Siliwangi membantu pasukan-pasukan Sunarto untuk membebaskan Cepu, karena pasukan Sunarto dalam keadaan terjepit melawan satuan-satuan pemberontak yang dibantu oleh 12000 orang buruh bersenjata yang pro PKI.

Cepu menjadi kota rebutan antara pasukan-pasukan yang setia kepada RI melawan pasukan-pasukan Laskar Minyak (Sobsi). Pertempuran yang terjadi di Cepu adalah pertempuran untuk menguasai pabrik minyak. Selama 7 hari pabrik minyak ini berganti tangan empat kali. Cepu berhasil diduduki pada tanggal 5 Oktober 1948.

Dengan berhasilnya Madiun direbut kembali dan terbunuh atau tertangkapnya tokoh-tokoh pemberontak, maka secara fisik pemberontak PKI Madiun berhasil ditumpas. Tetapi dikarenakan RI segera pula diharuskan menghadapi agresi militer II Belanda, operasi-operasi teritorial dan justisionil belum sempat dilakukan. Akibatnya ialah bahwa banyak pemimpin dan kader PKI yang lolos dan kelak dapat melakukan petualangan lagi dengan G.30.S/PKI.

C. AGRESI MILITER II DAN KMB

1. *Agresi Militer II*

Pertentangan politik yang tajam di tanahair antara golongan yang pro dan yang anti persetujuan Renville, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang dan pembentukan Negara Indonesia Serikat, yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan Madiun telah digunakan oleh pihak Belanda guna menyusun kekuatan untuk menyerbu RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara pihak RI dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) selalu menemui jalan buntu, karena pihak Belanda mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin dapat diterima oleh RI. Masalah pokoknya adalah :

- Perbedaan penafsiran mengenai "garis van Mook" sebagai garis demarkasi antara daerah-daerah yang termasuk daerah Republik dengan daerah-daerah yang diduduki Belanda.
- Pembentukan Pemerintah interim Negara Indonesia Serikat.

Jalan keluar untuk mengatasi kemacetan itu sebenarnya telah dirintis oleh usul Du Bois-Critchley yakni wakil Amerika Serikat dan Australia di dalam KTN. Sementara itu wakil Amerika Serikat dipanggil kembali oleh pemerintahnya, dan digantikan oleh Merle Cochran. Cochran mengajukan usul baru untuk mengatasi kemacetan itu. Usul itu pada dasarnya tidak berbeda dari usul Du Bois, hanya Cochran mendahulukan pembentukan pemerintahan interim daripada pembentukan konstituante sebagaimana yang diusulkan oleh Du Bois-Critchley.

Jalan buntu untuk berunding masih belum dapat ditembus. Pihak RI tetap berpegang pada usul Du Bois-Critchley dan beranggapan bahwa perundingan baru dapat dimulai setelah pihak Belanda menjamin imunitas diplomasi pihak Indonesia. Sebaliknya pihak Belanda menuduh bahwa keadaan militer di Jawa semakin buruk, dan jumlah pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan pihak Republik semakin meningkat. Tanpa melalui KTN, PM Hatta mengadakan pendekatan politis baru dengan van Mook. Kedua belah pihak mengadakan perundingan langsung dengan KTN sebagai saksi. Pada tanggal 27 November 1948 delegasi Belanda datang ke Indonesia yang terdiri dari Menteri Seberang Lautan Mr.E.M.J.A. Sassen, Menteri Luar Negeri D.U. Stikker, dan Wakil Pemerintah Agung Belanda L. Neher. Perundingan dilangsungkan di Kaliurang antara PM Hatta dan delegasi Belanda secara langsung tanpa pengawasan KTN. Perundingan ini tidak berhasil mempertemukan pendapat yang prinsipiil bertentangan. PM Hatta menyatakan bahwa sebab terhentinya perundingan yalah karena perselisihan masalah prinsip. Setelah gagalnya perundingan pada tanggal 9 Desember 1948 Pemerintah RI mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian RI :

1. Pemerintah RI mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati pendirian Belanda.
2. Petunjuk yang diberikan kepada Menteri Belanda terbatas pada penjajagan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian lewat perundingan.
3. Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan mem-

bentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa berunding dengan RI di bawah pengawasan KTN terlebih dahulu.

Dua hari kemudian, tanggal 11 Desember 1948, KTN juga menerima nota dari pemerintah Belanda, yang isinya antara lain :

1. Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerjasama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata.
2. Pendirian RI terhadap Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok-pokok azasi persetujuan Renville, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang tak dapat dipertahankan, di mana ada dua tentara saling berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah.
3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak ada harganya RI menerima naskah persetujuan yang direncanakan oleh KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai dasar perundingan.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah Federal.

Sebagai penutup dari nota tersebut Pemerintah Belanda menyatakan bahwa perundingan di bawah KTN tidak berfaedah karena pada hakekatnya RI tidak mau mengakui adanya perjanjian gencatan senjata dan persetujuan Renville.

Kemudian pada tanggal 13 Desember 1948 PM Hatta meminta kepada KTN agar diadakan kembali perundingan dengan pihak Belanda dengan syarat "kesediaan pihak RI mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda selama masa peralihan." Pada hari itu juga Belanda menjawab bahwa perundingan tidak akan diadakan lagi dan akhirnya pada tanggal 18 Desember 1948 jam 23.30 Dr.Beel Wakil Tinggi Mahkota Belanda, menyampaikan kepada delegasi Indonesia dan KTN bahwa Belanda tidak mengakui lagi dan tidak terikat lagi oleh persetujuan Renville. Usaha delegasi Indonesia untuk menyampaikan berita itu ke Yogya

tidak berhasil, sebab hubungan telepon sudah diputuskan oleh Belanda. Sehingga karenanya pemimpin-pemimpin RI di Yogya tidak mengetahui adanya pernyataan politik Belanda demikian itu.

Keesokan harinya tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi Belanda mulai melancarkan serangan menyerbu daerah RI. Melalui operasi lintas-udara pasukan baret hijau Belanda diterjunkan di pinggir kota Yogya. Dalam waktu yang singkat pangkalan udara Maguwo telah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Belanda. Di daerah-daerah lain pasukan Belanda bergerak melintasi semua garis demarkasi dan berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya.

Dalam suasana yang genting pada hari itu juga dilakukan sidang kabinet yang dihadiri juga oleh beberapa pembesar TNI. Sidang kabinet mempertimbangkan dua kemungkinan :

— Presiden dan Wakil Presiden/Perdana Menteri mengungsi ke luar kota Yogya, tetapi harus dikawal oleh satu batalyon tentara. Ternyata tentara yang akan mengawal itu tidak ada karena tentara yang ada di Yogya sudah keluar semua.

— Tetap tinggal di kota dan membiarkan diri ditawan Belanda, tetapi dekat dengan KTN.

Sidang memutuskan bahwa pimpinan negara serta pejabat-pejabat pemerintah tetap tinggal di kota dan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran) yang pada waktu itu sedang bertugas di Sumatra, melalui radiogram diberikan mandat untuk memimpin Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatra. Bahkan jika Mr. Sjafruddin tidak berhasil membentuk PDRI, kepada Mr. Maramis (Menteri Keuangan) yang sedang berada di India, L.N. Palar dan Dr. Sudarsono diberi pula kuasa untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia di India. Walaupun radiogram terlambat diterima, PDRI berhasil dibentuk dan Mr. Maramis ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.

Begitulah Presiden, Wakil Presiden beserta sejumlah pembesar RI termasuk Kepala Staf Angkatan Udara S.Suryadarma yang tidak meninggalkan kota ditawan oleh Belanda. Presiden, Wakil Presiden, Mr. Asaat, Mr.A. Gaffar Pringgodigdo, H.A. Salim, Mr. Ali Sastroamidjojo, Komodor Suryadarma diasingkan ke

Bangka. Kemudian Presiden, Sutan Sjahrir, H.A. Salim dipindahkan ke Brastagi dan yang terakhir di Prapat.

Karena berhasil menduduki Yogyakarta, Belanda dengan lantang menyatakan bahwa RI beserta TNI-nya telah hancur. Tetapi tanpa disadari, serangan terhadap RI itu membawa konsekwensi-konsekwensi politik yang besar. Di dalam negeri, beberapa negara boneka antara lain negara Indonesia Timur dan negara Pasundan melancarkan protes. Di luar negeri Dewan Keamanan PBB bersidang untuk membicarakan agresi Belanda itu. Amerika Serikat melakukan pula tekanan-tekanan ekonomi dengan ancaman akan menghentikan bantuan keuangan terhadap negeri Belanda. Perobahan sikap Amerika dipengaruhi oleh tindakan RI menumpas pemberontakan PKI. Hal itu meyakinkan Amerika bahwa Pemerintah RI ternyata tidak berkiblat kepada komunisme. Reaksi internasional dan kemampuan TNI melancarkan serangan gerilya, menyebabkan Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya.

Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949. Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua anggota yakni :

a. hentikan permusuhan.

b. bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.

c. memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Sementara itu TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah selesai dengan konsolidasinya dan sudah mulai memberikan pukulan-pukulan kepada tentara Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda : kawat-kawat telepon diputuskan, jalan kereta api dirusak dan bahkan konvoi-konvoi Belanda di siang hari diserang. Karena itu pihak Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah didudukinya. Dengan demikian manpower-nya habis terpaku pada ribuan pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan suatu medan gerilya yang luas. Setelah pasukan-pasukannya tersebar di luar kota-kota yang didudukinya, TNI mulai menyerang kota-kota

itu sendiri. Serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (sekarang Presiden) Soeharto dengan berhasil didudukinya kota itu selama enam jam, dengan terang-benderang membuktikan kepada dunia bahwa TNI jauh daripada hancur, bahkan masih mempunyai kemampuan memukul. Juga jelas dari laporan-laporan yang masuk, bahwa inisiatif sudah beralih dari pihak tentara Belanda ke pihak TNI. Kini TNI-lah pihak yang menyerang dan pihak Belanda yang bertahan.

2. *Diplomasi ke dalam dan ke luar.*

Jalan buntu di bidang militer dibarengi dengan ancaman Amerika Serikat untuk mencabut bantuan Marshall Plan, akhirnya memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara kepada pengakuan kedaulatan negara Indonesia di wilayah bekas Hindia-Belanda. Pada bulan pertama tahun 1949, karena didesak oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Supomo, salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville, untuk berunding. Undangan diterima dan merupakan pertemuan yang pertama sejak tanggal 19 Desember 1948. Pertemuan Dr. Drees dengan pemimpin-pemimpin Indonesia itu tidak diumumkan. Pertemuan yang sama diadakan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang terdiri atas Mr. Djumhana serta Dr. Ateng, dengan Presiden Sukarno serta Wakil Presiden Moh. Hatta. Bijeenkomst voor Federaal Overleg adalah musyawarah antara "negara-negara bagian" bikinan Belanda. Hasil pertemuan itu tidak pernah diumumkan, tetapi Mr. Moh. Roem pemimpin delegasi Republik kemudian menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat diawasi oleh Komisi PBB apabila telah mencapai tingkatan formil, tetapi jelas dari perkembangan selanjutnya bahwa telah terjadi pendekatan antara RI dan BFO. Pada tanggal 13 Februari Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya, bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya Pemerintah RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB. Keinginan Wakil

Presiden Moh. Hatta ini kemudian disetujui dan didukung oleh BFO.

Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis oleh pihak Belanda bahwa pada dasarnya pemimpin-pemimpin RI bersedia berunding, maka pada tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan niatnya akan melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 12 Maret 1949, guna membicarakan masalah Indonesia dan syarat-syarat penyerahan kedaulatan, serta pembentukan Uni Indonesia – Belanda. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota untuk menemui Bung Karno yang bersama beberapa pembesar RI lainnya ditawan di Bangka, guna menyampaikan maksud pemerintah Belanda. Drs. Koets pergi ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1949. Kedatangannya di Bangka ini juga untuk menjelaskan maksud pemerintah Belanda dan mengundang Bung Karno untuk menghadiri KMB di Den Haag. Isi penjelasan yang disampaikan kepada Bung Karno adalah :

1. Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag, guna membahas "penyerahan" kedaulatan yang dipercepat.
2. Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah "penyerahan" kedaulatan.
3. Tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogya, dinyatakan bahwa hal itu mungkin dilaksanakan.

Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO, dan menegaskan akan perlunya kedudukan Pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selesai pertemuan itu pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1949, Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota, yang berisi penolakan menghadiri KMB kecuali dengan syarat yaitu :

– pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan;

– kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan terganggu.

Dari pihak BFO dikeluarkan pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap pada pendirian semula, yakni :

— supaya Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.

— komisi PBB untuk Indonesia agar membantu melaksanakan resolusi.

— RI memerintahkan gencatan senjata.

Dari pihak Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 dikirimkan kawat kepada Pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan kedua belah pihak. Komisi PBB akan memberikan bantuan terhadap :

1. tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2, yakni menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian pemimpin RI ke Yogyakarta.
2. menetapkan tanggal waktu serta syarat untuk mengadakan KMB di Den Haag agar dapat diselenggarakan selekasnya.

Dengan adanya petunjuk dari Dewan Keamanan dan adanya pendekatan politis antara pihak RI dan Belanda, maka pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan RI — Belanda. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah : Dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof.Mr.Dr.Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.J.H.van Royen dengan anggota-anggotanya : Mr.N.S.Blom, Mr.A.S.Jacob, Dr.J.J.van der Velde dan 4 orang penasehat.

Merle Cochran yang memimpin perundingan ini sekali lagi menyatakan bahwa perundingan tersebut diselenggarakan atas inisiatif pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949. Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan pendirian RI yakni menuntut, bahwa perundingan ini lebih dahulu menyetujui pengembalian Pemerintah RI ke Yogya-

karta. Dengan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan bagi delegasinya untuk mengambil keputusan bagi soal-soal lainnya. Delegasi Belanda bersedia mendahulukan perundingan mengenai syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, tetapi tiap kewajiban yang mengikat yang mungkin timbul dalam perundingan harus ditunda sampai tercapainya persetujuan tentang perintah penghentian tembak-menembak dan membuat perjanjian mengenai waktu dan syarat KMB di Den Haag. Sesudah perundingan pertama ini, jalannya perundingan sangat lamban dan masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya. Sementara itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara, pemimpin Pemerintah Darurat RI menyatakan setuju terhadap pernyataan Mr. Moh. Roem dalam perundingan menghadapi delegasi Belanda. Sebenarnya yang dituntut oleh RI bukanlah pengembalian Sukarno — Hatta ke Yogyakarta, akan tetapi pengembalian Pemerintah RI disertai dengan pengakuan dari Pemerintah Belanda terhadap status RI yang mempunyai daerah kekuasaan tertentu.

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April Drs. Moh. Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informil dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan oleh Merle Cochran. Pada tanggal 25 April diadakan pertemuan informil pertama antara Drs.Moh.Hatta dengan ketua delegasi Belanda Dr. van Royen. Hasil perundingan ini tidak diumumkan, namun Hatta menyatakan bahwa pertemuan informil itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Perundingan yang semacam itu, juga dilakukan oleh ketua delegasi RI dengan ketua delegasi Belanda sebanyak dua kali, yakni tanggal 28 April dan 4 — 5 Mei 1949. Kiranya perundingan ini dapat memberikan harapan untuk tercapainya persetujuan, karena itu komisi PBB bersikap menunggu ma angnya perundingan informil ini.

Pada dasarnya Pemerintah Belanda ah setuju tentang pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dengan syarat harus dibarengi dengan perintah penghentian per g gerilya. Masalah ini dapat diatasi, tetapi masalah yang lain a adalah mengenai luasnya daerah kekuasaan RI agak seret. P tunjuk dari Bangka

kepada delegasi RI menghendaki dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan dan pengembalian daerah RI (menurut persetujuan Renville) secara berangsur-angsur. Petunjuk dari Bangka lebih menekankan pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta sekalipun hanya memiliki daerah seluas lima mil persegi sebagai langkah permulaan. Tetapi delegasi RI menganggap bahwa wilayah lima mil persegi adalah sangat berbahaya bagi keamanan. Delegasi RI menuntut daerah seluas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk lapangan terbang Maguwo dan batas selatan Samudra Indonesia. Pihak Belanda sebaliknya menafsirkan resolusi Dewan Keamanan tentang pengembalian Pemerintah RI ke kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya, adalah seluas lima mil persegi; mereka juga menolak menyerahkan lapangan udara Maguwo (sekarang lapangan Udara Adisucipto).

Berkat usaha keras dari Cochran, anggota Komisi PBB dari Amerika Serikat, pada tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai persetujuan. Pada jam 17.00 dibacakan pernyataan kedua delegasi dalam sidang formil yang diselenggarakan oleh Komisi PBB. Pernyataan ketua delegasi RI Moch. Roem atas nama Presiden Sukarno dan wakil Presiden Moh. Hatta, menyatakan kesanggupan mereka sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 serta petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan :

1. pengeluaran perintah kepada "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
2. kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Selanjutnya ketua delegasi Belanda Dr. van Royen membacakan pernyataannya yang berisi antara lain :

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan satu panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk :

a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya Pemerintah RI.

b. mempelajari dan memberikan nasehat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi keresidenan Yogyakarta.

3. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.

4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

5. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Pada konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang bagaimana cara-cara mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat.

3. Menuju Pengakuan Kedaulatan.

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem — Royen, Pemerintah Darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya persetujuan Roem — Royen adalah Masyumi. (Mr. Roem adalah pemimpin Masyumi). Dr. Sukiman selaku ketua umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI. Sedang Mr. Sujono Hadinoto, ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan bahwa persetujuan Roem — Royen merupakan suatu langkah ke arah tercapainya

penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia. Akhirnya kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa persetujuan Roem — Royen sekalipun masih kurang memuaskan, tetapi merupakan langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia — Belanda. Pihak Angkatan Perang sebaliknya menyambut adanya persetujuan itu dengan perasaan curiga. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1949 memperingatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Pernyataan yang sama untuk mempertegas Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah merupakan taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan militer. Pada pokoknya dari kalangan Angkatan Perang tidak terdapat kepercayaan akan berhasilnya perundingan karena menurut pengalaman dengan Linggajati, Renville dan lain-lain, perundingan atau persetujuan dengan Belanda dianggap selalu merugikan perjuangan.

Sebagai tindak lanjut daripada persetujuan Roem — Royen pada tanggal 22 Juni diadakan perundingan formil antara RI, BFO dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley. Hasil perundingan adalah :

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan. Pada tanggal 24 Juni 1949 keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh Tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI sepenuhnya menguasai keadaan di daerah itu.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.
3. Konferensi Meja Bundar diusahakan akan diadakan di Den Haag.

Hasil permusyawaratan yang dicapai ini akan dicantumkan dalam sebuah memorandum. Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.00, diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Pada

kesempatan itu Mr. Sjafruddin mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.

Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka, dimulai lagi. Yang akan dibahas dalam perundingan itu yalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19 — 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia, akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden.
3. Akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan :

1. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
2. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB dan Territoriale Bataljons.
3. Pada permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah-masalah pelaksanaan pokok-pokok per-

setujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Simatupang, Mr. Sumardi. Sedang Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag, Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949. Hasil yang paling pokok adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat akhir bulan Desember 1949. Di samping itu juga diputuskan persetujuan pokok mengenai keuangan, ekonomi, budaya dan lain-lain. Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Khusus mengenai militer, persetujuan KMB memutuskan antara lain ketentuan-ketentuan pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya, pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda.

Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949 dan berakhir pada tanggal 14 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Sukarno. Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember (keesokan harinya) Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya pada tanggal

23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan. Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. E.M.J.A. Sassen dan ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan terhadap RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, bersama-sama membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan. Maka secara formil Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh sesuatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Barat). Dengan demikian berakhirlah secara resmi Perang Kemerdekaan Indonesia.

II. DEMOKRASI LIBERAL

A. INDONESIA DI BAWAH RIS.

1. Dari sistim federal kembali ke sistim kesatuan

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 Nopember 1949 di Den Haag maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ini terdiri dari 16 negara bagian dan daerah yang berdiri sendiri, yaitu :

a. Republik Indonesia.
b. Kalimantan Barat
c. Indonesia Timur
d. Madura
e. Banjar
f. Bangka
g. Belitung
h. Dayak Besar
i. Jawa Tengah
j. Jawa Timur
k. Kalimantan Tenggara
l. Kalimantan Timur
m. Pasundan
n. Riau.
o. Sumatra Timur
p. Sumatra Selatan.

Masing-masing negara bagian mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia (secara de facto mempunyai wilayah meliputi Jawa, Sumatra dan Madura) yang mempunyai daerah yang terluas dan penduduk yang terbanyak yaitu Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Sebagai kepala negara RIS terpilih Ir. Sukarno. Sedangkan Drs. Moh. Hatta kemudian diangkat sebagai perdana menteri dari kabinet RIS. Anggota-anggota Kabinet RIS yaitu : Anak Agung Gde Agung, Hamengku Buwono IX, Prof. Mr. Supomo, Arnold Mononutu, Mr. Sjafruddin Prawira-

negara, Ir. Djuanda, Ir. H. Laoh, Mr. Wilopo, Mr. Mohd. Kosasih Purwanegara, Dr. Abu Hanifah, K.H. Wachid Hasjim, Dr. J. Leimena, Sultan Hamid II, Mr. Mohd. Roem, Dr. Suparmo.

Kabinet ini merupakan "zaken-kabinet" (yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung Negara Kesatuan RI dan hanya 2 orang yang mendukung sistim federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Sehingga gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Lebih-lebih karena dasar pembentukan negara federal itu sangat lemah, tidak ada ikatan ideologi yang kuat atau tujuan kenegaraan yang jelas. Menurut kenyataan negara federal ini adalah ciptaan Belanda dan bukan kehendak rakyat negara-negara bagian itu. Pada umumnya rakyat merasakan bahwa pembentukan negara bagian federal ini hanyalah sebagai alat Belanda untuk tetap berkuasa di Indonesia. Negara-negara bagian federal itu juga tidak mempunyai kekuatan militer sendiri yang dapat dipakai untuk mempertahankan negerinya. Kekuatan militer yang ada hanyalah pasukan-pasukan Belanda (bekas tentara NICA yang belum sempat dipulangkan) yang terdiri dari pasukan KL (Koninklijk Leger : Tentara Kerajaan) dan KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger : Tentara Kerajaan Hindia Belanda).

Selain menghadapi dan menyelesaikan soal-soal perongrongan terhadap RIS, Kabinet Hatta juga harus menyelesaikan banyak masalah lain yang menyangkut soal ekonomi, sosial dan hubungan luar negeri. Masalah-masalah yang timbul ini merupakan beban yang berat bagi sesuatu negara baru yang lahir dengan suatu Perang Kemerdekaan. Sebagai akibat perang, banyak prasarana yang hancur dan keadaan ekonomi pada umumnya buruk. Pemerintah harus menghadapi inflasi dan defisit dalam anggaran belanjanya. Semuanya ini harus segera ditanggulangi, sebab rakyat sudah lama menderita akibat penjajahan dan perang. Untuk mengatasi inflasi ini Pemerintah menjalankan suatu tindakan dalam bidang keuangan yang drastis yaitu mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas

dipotong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena oleh peraturan ini tapi Pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Di samping soal keuangan ini, perekonomian juga dapat diperbaiki, terutama dengan meningkatnya perdagangan bahan mentah seperti karet ke luar negeri. Neraca perdagangan luar negeri semakin meningkat akibat meletusnya perang Korea, sehingga pendapatan negara Indonesia bertambah.

Selain soal ekonomi, Pemerintah juga harus menyelesaikan soal di bidang kepegawaian dan di bidang militer. Sebagai akibat selesainya perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena akan menjadi beban bagi keuangan negara. Mereka ini perlu mendapat penampungan bila diadakan rasionalisasi. Menghadapi masalah ini Pemerintah mencoba membuat usaha-usaha pembangunan untuk mereka yang terkena rasionalisasi dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajaran dalam pusat-pusat pendidikan yang memberi pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karier baru. Juga dilakukan usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian masalah ini belum seluruhnya dapat diselesaikan.

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dengan negara-negara Barat daripada dengan negara komunis. Hubungan dengan negeri Belanda diperbaiki karena diharapkan Belanda akan menyerahkan Irian Barat kembali ke Indonesia, paling lambat satu tahun setelah KMB.

Konstitusi RIS membuka kesempatan untuk membentuk Negara kesatuan menurut keinginan rakyat. Atas desakan pergerakan rakyat, maka DPR-RIS segera mempergunakan kesempatan untuk mengubah susunan ketatanegaraan. Semua negara dan daerah bahagian satu persatu gugur oleh DPR dan gerakan rakyat itu. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan RI dan RIS untuk membentuk Negara Kesatuan RI.

Setelah rancangan konstitusi RI 1950 disahkan oleh Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta dan Senat serta DPR di Jakarta, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 rancangan UUD ditandatangani oleh Presiden Sukarno. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan diumumkan ter-

bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UUD 1950 ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa kedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah berbentuk parlementer. Jadi berbeda dengan UUD 1945 di mana pemerintah berbentuk Presidensiil dan kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh MPR.

Dalam sistim demokrasi parlementer ini kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai politik; partai-partai politik inilah yang memerintah berdasarkan perbandingan kekuatan dalam parlemen. Jadi negara dengan sistim demokrasi parlementer itu dalam prakteknya adalah negara yang dikuasai oleh partai-partai politik. Partai-partai politik yang menonjol pada masa itu antara lain Masyumi, PNI, NU, PSII, Murba, IPKI, Perti, Parkindo, Partai Katholik dan beberapa partai kecil lainnya.

2. *Kabinet silih-berganti.*

Dalam negara kesatuan RI ini, Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi. Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah. Sehingga rata-rata setiap setahun sekali terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut yalah Kabinet Natsir (September 1950 — Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 — Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 — Juni 1953) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 — Juli 1955). Dari sini tampak bahwa dengan dijalankannya demokrasi parlementer bentuk Eropa Barat, khususnya Belanda, di mana kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistim banyak partai, kestabilan Negara sukar didapat. Dengan mudahnya Parlemen dapat menjatuhkan kabinet bila partai oposisi dalam Parlemen kuat. Oleh karena tiap-tiap kabinet tidak berumur panjang, maka programnya tidak sempat dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan banyak masalah baik di bidang politik, sosial-ekonomi maupun keamanan. Banyak urusan Negara yang terkatung-katung atau terbengkalai.

Kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 merupakan kabinet koalisi. Inti kabinet ini adalah dari partai Masyumi, di samping itu ter-

dapat juga anggota-anggota yang non partai. Kabinet ini termasuk yang kuat formasinya karena anggota-anggotanya banyak dikenal oleh masyarakat dan ahli pada bidangnya masing-masing. Di antara program-programnya yang penting yalah :

1. menggiatkan usaha mendapat keamanan dan ketentraman.
2. mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
4. memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
5. mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

Program Kabinet Natsir tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. PNI sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta dalam kabinet karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kemudian keluarlah mosi Hadikusumo (PNI) yang isinya tentang pencabutan PP No. 39 tahun 1950 mengenai pembentukan DPRDS dan DPRS. Kabinet berpendapat bahwa mosi ini tidak dapat dijalankan dikarenakan alasan juridis-formil dan politis. Sedangkan DPR menerima baik mosi Hadikusumo tersebut.

Karena di dalam DPR saat itu Masyumi dan PNI adalah partai-partai yang terkuat, maka rakyat menghendaki supaya kedua partai ini membentuk suatu kabinet baru. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tahun 1951 maka sejak 21 Maret 1951 kabinet Natsir didemissionerkan, sambil menunggu kabinet baru dibentuk.

Presiden Sukarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Ia berusaha membentuk kabinet yang terkuat dalam DPR saat itu. Tetapi usaha Mr. Sartono menemui kegagalan dan pada tanggal 18 April 1951 ia mengembalikan tugasnya kepada Presiden. Presiden Sukarno pada hari itu juga menunjuk 2 orang formateur baru yaitu Sidik Djojosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman Worjosandjojo (Masyumi) untuk membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas dalam waktu

5 hari. Akhirnya setelah diadakan perundingan baru pada tanggal 26 April diumumkan susunan kabinet yang baru dengan Dr. Sukiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menterinya.

Program Kabinet Sukiman ini yang penting di antaranya yalah soal :

1. Keamanan : akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
2. Sosial ekonomi : mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
3. mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
4. Politik luar negeri : menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak soal yang mendapat tantangan dalam parlemen maupun dari Masyumi dan PNI sendiri. Yang menjadi sebab jatuhnya kabinet Sukiman yalah ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi, tehnik dan persenjataan dari Amerika Serikat pada Indonesia atas dasar Mutual Security Act 1951 (MSA). Persetujuan ini ditafsirkan bahwa Indonesia telah memasuki blok Barat (AS), yang berarti bertentangan dengan program kabinet yaitu mengenai pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. Dengan jatuhnya kabinet Sukiman ini sudah barang tentu program kabinet yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Setelah kabinet Sukiman didemisionerkan sejak tanggal 23 Februari 1952 berdasarkan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1952, maka selanjutnya Presiden Sukarno pada tanggal 1 Maret 1952 menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) sebagai formatur. Dasar yang diminta oleh Presiden untuk kabinet yang baru ini yalah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari Parlemen. Usaha kedua formatur tersebut untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan menduduki kursi-kursi kabinet.

Pada tanggal 19 Maret 1952 kedua formatur itu menyerahkan mandatnya kepada Presiden, kemudian Presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur yang baru. Dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya.

Program kabinet ini terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk Konstituante, DPR serta DPRD, kemakmuran, perburuhan, pendidikan rakyat dan keamanan. Sedang program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia. Karena mengingat kegagalan-kegagalan kabinet yang digantikannya maka Mr. Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk melaksanakan program itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kesukaran-kesukaran yang dihadapinya tidaklah sedikit. Di antara kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikannya yalah timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Di Sumatra terjadi peristiwa Tanjung Morawa yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah Pusat. Sedangkan di Sulawesi timbul peristiwa yang berhubungan dengan tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh Pusat kepada daerah. Daerah merasa kecewa mengingat sumbangan yang mereka berikan kepada Pusat dari hasil export daerahnya jauh lebih besar daripada imbalan yang dikembalikan oleh Pusat kepada daerah. Di samping itu timbul keretakan-keretakan dalam kabinet itu sendiri. Pemerintah daerah menuntut diperluasnya hak-hak otonomi. Kemudian timbullah perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan seperti Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Makasar. Mengingat keadaan ini akan membahayakan kehidupan negara kesatuan maka Presiden mengeluarkan Surat Keputusan No. 99 tahun 1953 mendemisionerkan kabinet Wilopo mulai tanggal 3 Juni 1953. Kemudian Presiden menunjuk Mr. Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru.

Setelah mengalami masa krisis yang agak lama (58 hari) akhirnya kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan kabinet

terakhir sebelum pemilihan umum I dan terkenal dengan nama kabinet Ali I atau kabinet Ali-Wongso. Kabinet ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953 berdasarkan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1953. Dalam kabinet ini Mr. Wongsonegoro menjabat sebagai wakil Perdana Menteri I. Masyumi sebagai partai terbesar kedua dalam Parlemen tidak turut serta dalam kabinet Ali I dan sebagai gantinya muncul Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan politik baru.

Adapun program Kabinet Ali I yalah :

1. Program Dalam Negeri meliputi soal Keamanan, Pemilihan Umum, Kemakmuran dan Keuangan, Organisasi Negara, Perburuhan dan perundang-undangan.
2. Menyelesaikan kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah RI secepat mungkin.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia.
4. Menyerahkan kebijaksanaan Pemerintah kepada Parlemen, jika kabinet tidak mampu menyelesaikan perselisihan politik.

Dalam melaksanakan Program ini kabinet Ali I mengalami rintangan-rintangan terutama mengenai masalah keamanan di daerah-daerah. Di antaranya dilakukan oleh golongan extrim kanan seperti DI-TII di bawah pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat, Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Di samping itu Kabinet Ali I juga menghadapi persoalan-persoalan lain, baik soal dalam negeri maupun soal luar negeri. Salahsatu persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan yalah persiapan pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada pertengahan tahun 1955. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada tanggal 31 Mei 1954 dan diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk Parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk Konstituante akan diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dengan adanya pengumuman ini kampanye yang dilakukan oleh partai-partai semakin meningkat. Mereka masing-masing berusaha untuk mendapatkan suara

yang terbanyak dengan mengadakan kampanye sampai ke pelosok-pelosok desa.

3. *Pemilihan Umum I.*

Pemilihan umum ini telah diselenggarakan di masa kabinet Burhanuddin Harahap. Tujuan Pemilihan Umum ini untuk :

a. Memilih anggota Parlemen, yang pelaksanaannya pada tanggal 29 September 1955.

b. Memilih anggota Konstituante, yang pelaksanaannya pada tanggal 15 Desember 1955.

Hasil pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR oleh Panitia Pemilihan Indonesia menunjukkan kekalahan partai-partai Pemerintah.

Kampanye-kampanye Pemilihan Umum yang dilancarkan partai-partai memperbesar perpecahan di dalam masyarakat. Issue yang dilontarkan Presiden Sukarno bahwa ada suatu pihak yang ingin menjadikan Indonesia negara Islam, telah pula menimbulkan perdebatan di kalangan partai-partai. Masing-masing partai mempropagandakan dirinya yang terbaik sejarahnya, pemimpin-pemimpin maupun simbul-simbulnya, dan memburuk-burukkan partai lawan, umpamanya tuduhan PKI bahwa antara Masyumi dengan Darul Islam ada hubungannya. Masyumi menjawab PKI tidak setia pada revolusi Indonesia dan sifatnya anti Tuhan. Selanjutnya tuduhan PKI adalah bahwa PNI adalah partai priyayi dan NU adalah partai santri, tetapi PKI adalah partai rakyat.

Dalam propaganda itu program-program partai kurang didiskusikan. Dalam propaganda itu masing-masing partai mempergunakan wewenangnya dalam pemerintahan untuk kepentingan masing-masing. Sedangkan PKI mendapat bantuan besar dari golongan Cina dan luar negeri.

Hasil dari pemilihan umum ini memperlihatkan gambaran daerah-daerah pengaruh masing-masing partai dan separuh dari para pemilih memberikan suaranya kepada partai-partai Islam. Yang menonjol adalah munculnya NU dan PKI sebagai partai-partai besar, di samping Masyumi dan PNI. Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum ini merupakan suatu prestasi pada bidang administrasi dan organisasi di samping menandakan kemampuan kita sebagai bangsa yang modern.

Keberhasilan Kabinet Ali I merencanakan pemilihan umum juga tidak dapat menolong memperpanjang umur kabinetnya. Salahsatu masalah berat yang dihadapi Pemerintah adalah masalah administrasi negara yang belum tersusun baik, sehingga menimbulkan korupsi dan birokrasi di mana-mana. Begitu merajalelanya korupsi dan birokrasi ini sehingga Kabinet Ali I memerlukan untuk membentuk Kementerian Urusan Kesejahteraan Negara yang bertujuan untuk memberantas hal-hal buruk ini. Usaha ini gagal bahkan korupsi makin menggila. Dalam memperbaiki administrasi negara ini Indonesia antara lain telah menerima bantuan dari Colombo Plan untuk melatih pegawai-pegawai negeri.

Dalam bidang ekonomi-moneter dijumpai berbagai sistim import-export dan peraturan yang berbelit-belit. Terkenal pada masa kabinet Ali I adanya lisensi istimewa, yang menyebabkan makin meluasnya inflasi pada tahun 1954 dan 1955.

Semasa kabinet Wilopo terjadi Peristiwa 17 Oktober yang menyangkut TNI-AD. Karena masalah intern TNI-AD diperdebatkan di DPRS ketegangan memuncak. TNI-AD menganggap DPRS telah melakukan intervensi politik ke dalam tubuhnya. Hal ini membangkitkan kembali sentimen terhadap golongan politik bekas kolaborator dengan Belanda. Perasaan TNI menjadi sangat tersinggung, dan masalah ini menjadi sangat sensitif pada waktu itu. Dianggap bahwa kalau Parlemen hendak mengadakan koreksi terhadap TNI, tidak demikian caranya. Sebahagian besar mereka adalah bekas orang federal yang tidak pernah turut serta merasakan pahit-getirnya Perang Kemerdekaan. Karena situasi kritis itu beberapa orang panglima tentara dan teritorium, dipanggil ke Jakarta.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadilah demonstrasi rakyat yang menuntut dibubarkannya Parlemen. Demonstrasi bergerak menuju gedung Parlemen, memasuki gedung dan kemudian bergerak menuju Istana menuntut agar Parlemen segera dibubarkan, diganti dengan Parlemen yang baru. Presiden Sukarno di hadapan para demonstran itu menyatakan bahwa ia menolak membubarkan Parlemen karena ia bukan diktator. Dan yang berdemonstrasi hanya rakyat Jakarta yang dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara demokrasi, rakyat harus memilih dan menyempurnakan sendiri Parlemen, melalui pemilihan

umum. Penolakan untuk membentuk Parlemen yang baru juga dinyatakan Presiden di hadapan KSAD, WKSAD, para Panglima Tentara dan Teritorium seluruh Indonesia dan KSAP yang datang menghadap ke Istana pada hari itu juga.

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan peristiwa politik dan militer sebagai akibat daripada proses transisi yang kompleks, dan merupakan salahsatu matarantai yang kritik di dalam perkembangan politik pada tahun-tahun sehabis Perang Kemerdekaan. Pada waktu itu terdapat dua kekuatan politik di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Republiken dan Federalis. Antara keduanya tidak tercapai kombinasi yang harmonis, dan tidak bersikap bijaksana terhadap Angkatan Perang, karena diliputi oleh suasana liberalisme.

Penyelesaian masalah 17 Oktober itu sampai berlarut-larut. Suasana pro dan kontra menimbulkan krisis di kalangan Angkatan Darat. Akhirnya para perwira Angkatan Darat berpendapat, bahwa masa krisis harus segera diakhiri setelah masalah itu terkatung-katung tanpa penyelesaian selama 28 bulan. Pada tanggal 21 — 25 Februari 1955 diadakan "Rapat Collegiaal" (Raco) Perwira Angkatan Darat di Yogyakarta. Rapat tersebut membahas tiga masalah pokok :

1. Keutuhan dan persatuan Angkatan Darat.
2. Penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.
3. Pembangunan Angkatan Darat.

Raco itu menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia. Piagam itu ditandatangani oleh 20 orang perwira senior Angkatan Darat. Dengan ditandatangani Piagam Yogyakarta itu telah selesailah masalah peristiwa 17 Oktober di kalangan Angkatan Darat.

Sesudah diadakan rapat keutuhan Angkatan Darat dan menghasilkan Piagam Yogyakarta, antara pihak Angkatan Darat dan Pemerintah tetap tidak tercapai kesepakatan pendapat mengenai penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952. Oleh karena itu Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Bambang Sugeng mengajukan permohonan kepada Pemerintah agar dibebaskan dari jabatannya sebagai KSAD. Pemerintah kemudian membahas persoalan Angkatan Darat dan permohonan berhenti Kolonel Bambang

Sugeng. Dalam sidang kabinet tanggal 11 Mei 1955 diputuskan bahwa Pemerintah menerima baik permohonan berhenti tersebut. Selama jabatan KSAD belum terisi pimpinan Angkatan Darat diserahkan kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis.

Untuk mengisi kekosongan jabatan KSAD diputuskan untuk mengangkat Kolonel Bambang Utojo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya, calon utama yang diajukan oleh Pemerintah di samping Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Sudirman dari TT V/Brawijaya. Pemerintah mengutus Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri ke Palembang menanyakan kesediaan Kolonel Bambang Utojo untuk menjabat KSAD. Bambang Utojo bersedia dan pelantikan akan dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 1955. Sementara itu pihak pimpinan Angkatan Darat tidak dapat menerima keputusan Pemerintah. WKSAD Kolonel Zulkifli Lubis menginstruksikan kepada segenap anggota Angkatan Darat untuk tidak menghadiri pelantikan Kolonel Bambang Utojo. Pelantikan tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1955 di Istana Merdeka, tetapi diboikot oleh seluruh panglima Tentara dan Teritorium sekalipun mereka berada di Jakarta. Dari pihak Angkatan Darat yang hadir hanyalah Kolonel Sungkono sebagai pejabat dari Kementerian Pertahanan.

Dengan terjadinya peristiwa itu Pemerintah men-schor Kolonel Zulkifli Lubis, dan memerintahkan Kolonel Mursito untuk menjabat WKSAD, tetapi ia menolak. Sore hari tanggal 27 Juni 1955 itu WKSAD mengadakan rapat di Markas Besar Angkatan Darat, dihadiri oleh semua panglima TT, kecuali Panglima TT VI/Kalimantan, Kolonel Sadikin yang sedang mengikuti perjalanan Wakil Presiden ke Kalimantan. Dalam rapat itu WKSAD menerangkan bahwa tindakan-tindakan yang diambilnya semata-mata untuk memelihara keutuhan Angkatan Darat serta memutuskan menolak schorsing sebagai WKSAD. Juga menolak mengadakan serahterima dengan KSAD yang baru Kolonel Bambang Utojo. Kemudian rapat itu dilanjutkan pada tanggal 2 Juli 1955 di MBAD.

Sehubungan dengan lowongnya jabatan KSAD, rapat menyatakan bahwa Wakil KSAD mengambil inisiatif untuk mengajukan kepada Pemerintah syarat militaire leiderschap untuk

seorang KSAD sesuai dengan kedudukan pejabat tersebut yang harus mempunyai syarat-syarat kepemimpinan yang perlu untuk menyelamatkan pembangunan Angkatan Darat.

Demikian pernyataan yang dibuat sebagai hasil daripada rapat di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 9 Juli WKSAD mengeluarkan perintah harian yang berisi bahwa TNI telah kemasukan rongrongan politik, sebab politikus memandang bahwa penyelenggaraan pertahanan dan Angkatan Perang hanya dilihat dari sudut penempatan orang-orang belaka. Justru penempatan yang tidak selektif membuka kemungkinan masuknya unsur-unsur politik ke dalam tubuh Angkatan Perang. Perintah harian itu dikeluarkan berhubungan dengan akan diadakannya perundingan antara pihak Angkatan Darat dengan Pemerintah.

Sebaliknya Jenderal Bambang Utojo selaku KSAD dalam menanggapi peristiwa itu berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan yang terjadi dalam Angkatan Darat, sebaiknya para perwira senior Angkatan Darat (KSAD, WKSAD, para panglima TT, kepala-kepala direktorat) bersama-sama mengundurkan diri.

Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kalut yang sedang dihadapi oleh Angkatan Darat itu, pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 5 Juli 1955 mengirimkan utusan menghadap KSAD Jenderal Bambang Utojo. Utusan itu terdiri dari Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Sungkono dan Kolonel Azis Saleh. Dalam pertemuan itu Jenderal Bambang Utojo menjelaskan bahwa ia bersedia mengundurkan diri asal dengan hormat. Juga menyarankan agar hal ini dirundingkan dengan Pemerintah.

Sebagai penjelasan tingkat pertama, Angkatan Darat tetap pada pendiriannya, yakni :

1. Agar Mayor Jenderal Bambang Utojo dengan sukarela mengundurkan diri sebagai KSAD.
2. Agar Pemerintah memberhentikan dengan hormat Mayor Jenderal Bambang Utojo dari jabatannya sebagai KSAD.
3. Agar Pemerintah mengangkat KSAD baru.
4. Supaya Pemerintah mencabut schorsing WKSAD.

Dalam perundingan dengan Pemerintah, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menerima tuntutan Angkatan Darat dengan syarat agar Bambang Utojo yang melaksanakan serah-terima

dengan KSAD baru. Pada tanggal 18 Juli 1955 Angkatan Darat dengan resmi menyatakan menolak tawaran Pemerintah, tetapi pihak Pemerintah berdasarkan Surat Menteri Pertahanan No. Rah/2943/55 dan No. Rah/2944/1955 telah membatalkan schorsing terhadap WKSAD Zulkifli Lubis.

Berhubung dengan terjadinya peristiwa 27 Juni tersebut, pihak Parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah. Mosi diajukan oleh Zainal Baharuddin dan kawan-kawannya (B.M. Diah, Margono Djojohadikusumo, Mr.T.M.Hasan, A.N. Hadjarati). Mosi tidak percaya itu diterima oleh Parlemen dan diikuti oleh pengunduran diri Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumamantri dan penarikan menteri-menteri PSII. Kemudian pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden.

Setelah kabinet Ali-Wongso bubar maka pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan nama 3 orang formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Ketiga orang formatur itu yalah Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Assaat (non-partai). Pada waktu itu Presiden Sukarno sedang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
Kabinet baru ini bertugas untuk :

1. mengembalikan kewibawaan Pemerintah, yakni kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
2. melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya Parlemen baru.

Ketiga formatur ini mencapai persetujuan akan menempatkan Hatta sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Tetapi timbul kesukaran karena Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Karena soal ini timbul pertentangan pendapat antara PNI dan Masyumi; masing-masing saling menolak rencana yang diajukan. Formatur mengajukan usul agar Presiden mengumumkan bahwa Hatta non aktif sebagai Wakil Presiden selama menjadi Perdana Menteri. Setelah tugasnya selesai kembali sebagai Wakil Presiden. Usul ini ditolak oleh PNI dan mengusulkan agar Parlemen mengeluarkan resolusi yang memungkinkan Hatta sebagai warganegara memimpin kabinet parlementer. Usul ini ditolak oleh Masyumi, dan Sukiman diinstruksikan untuk mengembalikan

mandatnya. Pada tanggal 3 Agustus 1955 ketiga orang formatur mengembalikan mandatnya.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil PM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini tapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk di dalamnya. Sedang formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tak dapat dihindarkan. Akhirnya Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dan didominasi oleh Masyumi.

Adapun program Kabinet Burhanuddin Harahap yalah :

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerja-sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas aktif menuju perdamaian.

Program Kabinet Burhanuddin Harahap ini tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan imbangan kekuatan partai-partai yang diwakili dalam Parlemen setelah Pemilihan Umum, dibentuklah kabinet parlementer Ali Sastroamidjojo ke II pada tanggal 24 Maret 1956. Pengharapan rakyat bahwa sesudah diselenggarakannya pemilihan umum akan didapat kestabilan politik dan pemerintahan yang kuat, ternyata meleset. Kabinet Ali hanya dapat bekerja penuh selama satu tahun kemudian menyerahkan mandatnya pada bulan Maret 1957 sebagai akibat kegagalannya untuk mengadakan reshuffle kabinet secara integral.

Keadaan politik dan situasi umum dalam negeri, terutama keadaan yang kompleks dalam Angkatan Perang menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan daerah yang dipimpin oleh pihak militer setempat. Di Sumatra Tengah berdiri Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956, di Sumatra Utara berdiri Dewan Gajah pada tanggal 22 Desember 1956, di Sumatra Selatan berdiri Dewan Garuda, di Kalimantan Selatan berdiri Dewan Lambung Mangkurat dan di Sulawesi berdiri Dewan Perjuangan Semesta (Permesta).

Dalam keadaan yang hangat itu Presiden melontarkan pendapat bahwa segala kesulitan yang sedang dihadapi negara bersumber pada terdapatnya banyaknya partai-partai sehingga merusak persatuan bangsa. Untuk menyelamatkan maka Presiden mengajukan suatu konsepsi Demokrasi Terpimpin. Konsepsi ini dapat tantangan dari berbagai pihak. Bahkan Wakil Presiden Moh. Hatta kemudian mengundurkan diri dan menyerang konsepsi Presiden Sukarno sebagai langkah ke arah diktatur.

Dalam bulan Februari 1957, Presiden Sukarno memanggil semua pejabat sipil dan militer serta semua pimpinan partai ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu Presiden menjelaskan konsepsi untuk struktur pemerintahan negara yang baru. Presiden bermaksud untuk membongkar semua sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia yang berlaku waktu itu, yang menurut pendapatnya bersumber pada demokrasi liberal (Barat), dan menggantikannya dengan sistim baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu prinsip gotong-royong, mufakat dan musyawarah. Dua hal pokok dalam konsepsinya itu adalah :

- dibentuknya Kabinet Gotong-royong terdiri dari wakil dari semua partai ditambah dengan golongan fungsionil.
- dibentuknya Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung), yang beranggotakan wakil-wakil dari pada golongan fungsionil dalam masyarakat, yang fungsinya memberi nasehat kepada Kabinet, baik diminta atau tidak.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merobah susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah suatu hal yang harus diserahkan kepada Majelis Konstituante yang kompeten.

Suasana tegang timbul setelah propaganda untuk melaksanakan konsepsi Presiden (berpusat di Ibukota), mendapat tantangan dari daerah-daerah sehingga mengakibatkan gerakan daerah semakin memuncak dan semakin meluas. Suasana tegang dan hangat makin menguasai kehidupan politik di Ibukota. Kabinet tidak dapat lagi menguasai keadaan dan jatuh pada bulan Maret 1957.

Keadaan negara yang tidak stabil lagi menyebabkan Presiden mengumumkan Keadaan Darurat Perang (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia. Setelah Suwirjo gagal membentuk Kabinet baru, Presiden Sukarno kemudian membentuk Kabinet Gotong-Royong (yang berupa kabinet extra-parlementer). Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Oleh beberapa pemimpin di antaranya Hatta diusulkan pada Presiden supaya membentuk sebuah Kabinet Presidensiil melalui DPR, tetapi ditolak.

Gerakan-gerakan daerah semakin kuat dan berkobar. Akibat situasi politik yang tidak stabil, keadaan ekonomi dan keuangan menjadi kacau. Kabinet kemudian mencoba mengatasi dua persoalan pokok yang sedang dihadapi, yaitu keadaan negara di bidang umum dan pemerintahan yang tidak normal, dan keadaan Angkatan Perang khususnya TNI-AD yang sedang membahayakan negara/pemerintahan; dengan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan September dan Munas Pembangunan (Munap). Tetapi daerah-daerah belum yakin keadaan negara dapat diselesaikan dalam Munas itu. Daerah-daerah melalui Piagam Perjuangan tanggal 8 September 1957 menuntut pada Pemerintah antara lain :

- segera digantinya pimpinan AD sebagai langkah pertama terhadap stabilisasi TNI yang akan menjadi landasan mutlak stabilisasi negara.
- dilaksanakannya desentralisasi dengan otonomi yang luas dalam sistim pemerintahan.
- pembentukan Senat, yang akan mewakili suara-suara daerah.
- melarang komunisme.
- pulihnya kembali Dwi Tunggal.

Kemudian juga dituntut digantinya Presiden.
Kemudian usaha-usaha Pemerintah itu ternyata tidak memberikan

hasil-hasil yang secara definitif dapat menyalurkan perkembangan-perkembangan extra-parlementer itu.

Daerah-daerah melalui piagam tanggal 5 Oktober, memandang hasil Munas sebagai suatu kegagalan, bahkan Pusat dituduh telah membiarkan berkembangnya pengaruh PKI yang akan menyeret Indonesia ke arah tragedi nasional. Di daerah-daerah muncul issue anti komunisme, sehingga menarik perhatian dan simpati di luar negeri. Waktu itu timbullah usaha-usaha dari golongan tertentu untuk menyingkirkan pimpinan AD dan Presiden antara lain dengan Peristiwa Cikini (Penggranatan terhadap Presiden).

Akhirnya tanggal 10 Februari 1958, Dewan Banteng memberi ultimatum pada Pemerintah Pusat bahwa jika dalam lima hari tidak dibentuk suatu kabinet baru yang dipimpin oleh Hatta atau Sri Sultan Hamengkubuwono, maka daerah akan membentuk sebuah pemerintah sendiri. Ketika waktu ultimatum lewat tanpa jawaban dari Pusat, di Padang diumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dalam usaha menormalisasikan negara dan untuk menghindari desintegrasi nasional, tidak ada jalan lain bagi Pemerintah selain menindak tegas PRRI. Dengan mengerahkan segenap kekuatan bersenjata akhirnya PRRI dapat dihancurkan dalam waktu yang singkat.

Dari sini ternyata bahwa walaupun sudah diadakan pemilihan umum sesuai dengan aturan permainan Demokrasi Barat yang menurut peninjau-peninjau luar negeri berjalan dengan bersih, namun pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. Terbuktilah bahwa demokrasi liberal memang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi di Indonesia.

B. MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS NASIONAL

1. Menghadapi bom-waktu kolonial.

Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Pada masa RIS ini tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh Pemerintah dan juga oleh rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatan-

nya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan kehilangan hak-haknya bila Belanda meninggalkan Indonesia.

Yang pertama yalah yang dikenal dengan gerakan "Angkatan Perang Ratu Adil" (APRA) di bawah pimpinan Kapten Raymond ("Turk") Westerling. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Salahsatu landasan bagi gerakannya adalah kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Tujuan APRA yalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Sedang pada Konferensi Antar Indonesia di Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Gerakan APRA yang terdiri dari kurang lebih 800 orang di antaranya kira-kira 300 anggota KL bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950. Sejak tanggal 22 Januari 1950 sebetulnya pimpinan Divisi Siliwangi telah mensinyalir adanya suatu gerakan dari sekelompok orang bersenjata di luar kota Bandung. Tetapi rupanya Westerling menjalankan taktik gerak-cepat sebab pagi-pagi buta keesokan harinya mereka telah memasuki kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota APRIS yang mereka jumpai. Gerombolan APRA juga berhasil menduduki staf Divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang serta seorang perwira menengah yaitu Letkol Lembong, sedang jumlah gerombolan yang menyerbu lebih dari 150 orang. Hanya 3 orang yang berhasil selamat karena dapat meloloskan diri dari pengepungan itu. Dalam gerakan APRA di kota Bandung ini lebih dari 79 anggota APRIS tewas dan juga banyak rakyat biasa yang menjadi korban.

Pada hari itu juga diadakan pertemuan antara Kepala Staf

Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Dr. Eri Sudewo dengan Panglima Divisi C Tentara Belanda Mayor Jenderal Engels. Sementara itu untuk memperkuat pertahanan Bandung, didatangkan balabantuan antara lain dari kesatuan-kesatuan Polisi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang pada waktu itu sedang berada di Jakarta. Pada hari itu juga Westerling, pimpinan APRA, dipaksa meninggalkan Bandung dan diadakan razia secara intensif. Terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu diadakan penangkapan. Mereka itu antara lain Perdana Menteri Negara Pasundan Anwar Tjokroaminoto, Komisaris Besar Polisi R. Jusuf, Komisaris Besar Polisi Janakum, Suriakartalegawa dan Male Wiranatakusuma. Operasi-operasi penumpasan diadakan di Bandung dan kemudian dilanjutkan dengan operasi pengejaran terhadap pasukan APRA yang berhasil melarikan diri. Sisa-sisa pasukan ini berhasil dihancurkan dalam operasi yang dilakukan di daerah Pacet.

Ternyata otak gerakan APRA ini berada di Jakarta, dalam diri Sultan Hamid II, seorang Menteri tanpa portofolio dalam Kabinet RIS. Menurut rencananya gerombolan APRA ini akan menyerang gedung kabinet di mana pada hari itu akan diadakan sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri serta membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Berkat operasi intelijen, rencana itu dapat diketahui sebelumnya dan oleh karena itu dapat dilakukan tindakan preventif. Sultan Hamid II ditangkap pada tanggal 5 April 1950, sedangkan Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri (Malaya) dengan menumpang pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda pada tanggal 22 Februari 1950.

Dengan adanya gerakan APRA yang gagal itu maka di negara-negara bagian RIS perasaan anti federal semakin meningkat. Usaha untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah RIS semakin keras. Begitu juga gerakan untuk melaksanakan ide kesatuan juga meluas ke daerah-daerah. Misalnya pemerintah Sumatra Selatan memutuskan pada tanggal 10 Februari akan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah RIS.

Rongrongan kedua yang dialami RIS adalah dari petualangan yang dijalankan oleh Kapten Andi Azis di Makasar (Ujung

Pandang). Di Makasar pada tanggal 30 Maret 1950 dilangsungkan upacara peleburan anggota Kompi KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis ke dalam APRIS. Pada hakekatnya Kapten Andi Azis beserta pasukannya menentang peleburan yang demikian. Oleh karena itu pada tanggal 5 April 1950 anggota-anggota bekas KNIL itu mulai mengadakan gerakan dengan mengadakan serangan terhadap pos Polisi Militer dan menangkap Pejabat Panglima Tentara dan Territorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Karena kekuatan yang tidak berimbang, APRIS mengundurkan diri dan kemudian mengadakan konsolidasi di Pandan-pandan.

Ketika berita itu sampai di Jakarta, Pemerintah segera bertindak. Pada tanggal 8 April 1950 Andi Azis diultimatum supaya dalam waktu 4 x 24 jam menghadap ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Selain itu ia juga diharuskan menkonsinyasi pasukannya, membebaskan para tawanan dan mengembalikan senjata-senjata yang dirampas. Sewaktu batas waktu itu habis sedangkan Andi Azis tidak muncul di Jakarta, Presiden/Panglima Tertinggi APRIS mengumumkan bahwa di daerah Indonesia bagian Timur berlaku keadaan bahaya. Pengumuman itu diiringi dengan pengiriman pasukan expedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Ikut dalam pasukan itu kesatuan Brigade Mobil Divisi I Jawa Timur, Brigade Mobil Divisi II Jawa Tengah, Brigade Mobil Divisi IV Jawa Barat ditambah 1 Batalyon di bawah pimpinan Mayor Andi Matalata. Sementara itu Batalyon Worang sudah berada di perairan Makasar dan sedianya sudah akan mendarat waktu Andi Azis melakukan pemberontakannya. Pasukan Worang adalah pasukan APRIS yang pertama kali dikirim ke Negara Indonesia Timur dalam rangka mengambil alih tugas-tugas KNIL.

Pada tanggal 18 April 1950 Batalyon Worang dan Brigade Mobil Divisi I dengan dikawal oleh korvet *Banteng* dan korvet *Hang Tuah* mendarat di Jeneponto. Dalam perjalanan menuju Makasar, di Sungguminasa bertemu dengan rombongan Kolonel Schotborg, Komandan Territorium KNIL Indonesia Timur yang disertai oleh dua orang perwira UNCI yang sengaja datang untuk berunding. Dalam perundingan itu Schotborg bersedia mengizinkan Batalyon Worang memasuki Makasar dengan syarat bahwa

keamanan dalam kota tetap di tangan KNIL. Usul itu ditolak dan akhirnya Schotborg menyerah kepada kehendak Worang, yakni pasukan Worang memasuki Makasar sedangkan pasukan KNIL dikonsinyasi. Pada tanggal 21 April 1950 pasukan Worang memasuki Makasar dan tanggal 26 April 1950 seluruh pasukan expedisi di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Makasar.

Sebelum itu Andi Azis walaupun sudah terlambat telah menyerahkan diri kepada Pejabat Panglima TT Indonesia Timur dan kemudian diangkut ke Jakarta. Sekalipun Kapten Andi Azis telah menyerah, tetapi keamanan tidak berlangsung lama karena di Makasar masih ada pasukan KL dan KNIL. Pasukan KL–KNIL ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan senjata antara APRIS/TNI dengan KL–KNIL. Pada tanggal 15 Mei 1950 terjadilah bentrokan senjata antara APRIS/TNI dengan KL–KNIL. Tetapi sore harinya dapat dihentikan setelah KL–KNIL menyadari akan kuatnya pertahanan APRIS/TNI. Walaupun demikian bentrokan senjata masih juga terjadi sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus pihak KNIL minta berunding. Perundingan diadakan antara Jenderal Scheffelaar dari KL–KNIL dengan Kolonel Kawilarang. Hasil perundingan ini yalah bahwa kedua belah pihak setuju dihentikannya tembak-menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL–KNIL akan meninggalkan Makasar. Dengan adanya persetujuan itu maka keamanan di Makasar pulih kembali.

Bom waktu yang ketiga meledak di Maluku Selatan di mana APRIS diharuskan pula mencurahkan kekuatannya ke sana. Tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS), di bawah pimpinan Dr. Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemerintah mencoba menyelesaikan peristiwa ini secara damai dan untuk itu dikirim missi Dr. Leimena. Tetapi missi ini tidak berhasil karena pihak RMS menolak untuk berunding, bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari luar terutama dari Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Komisi PBB untuk Indonesia. Karena itu maka Pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan Soumokil itu dengan kekuatan senjata.

Pada tanggal 14 Juli pagi hari tahun 1950, pasukan expedisi

APRIS sebanyak 850 orang di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Laha, pulau Buru. Dengan susah payah karena belum mengenal medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di pulau Buru. Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kolonel Kawilarang. Setelah pulau Buru dikuasai maka pasukan APRIS menuju ke Seram. Pendaratan dilakukan di Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram Barat dikuasai APRIS pada hari itu juga. Dari sini gerakan pasukan APRIS dilanjutkan ke bagian lain dari pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di pulau Seram dan Ambon. Operasi pasukan APRIS mengalami kesulitan sehingga baru pada bulan Desember 1950 setelah menderita banyak korban, pantai utara Seram dan seluruh pulau Ambon dikuasai. Dan ketika RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dilebur menjadi negara kesatuan RI, petualangan RMS belum dapat ditumpas seluruhnya.

Setelah kota Ambon jatuh, maka perlawanan pokok RMS telah dapat dipatahkan. Tokoh-tokoh pemberontak melarikan diri ke pedalaman dan beberapa tahun lamanya mereka mengadakan pengacauan-pengacauan. Barulah setelah Soumokil tertangkap di akhir tahun 1963 (tanggal 2 Desember 1963) gerakan RMS di dalam negeri berakhir samasekali.

2. *Menumpas DI/TII.*

Persoalan Darul Islam (DI) pada hakekatnya adalah persoalan politik militer, ditimbulkan oleh golongan extrim Islam yang menginginkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Benih-benihnya sudah terlihat dalam Komite Pembela Kebenaran Partai Islam Indonesia (PSII). Komite ini lahir sebagai akibat terjadinya perpecahan dalam tubuh PSII dalam zaman Hindia Belanda antara golongan Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dengan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam rapat yang diadakan di Malangbong, Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1942, telah tumbuh konsepsi-konsepsi yang akan menjadi dasar lahirnya DI di kemudian hari. Pusatnya berada di Jawa Barat, namun pengaruhnya tersebar sampai Jawa Tengah, Aceh dan Sulawesi Selatan. Perguruan *Sufah* yang didirikan Kartosuwirjo dalam zaman Jepang dipergunakan pula sebagai

pusat latihan kemiliteran bagi pemuda-pemuda Islam, khususnya Hizbullah dan Sabillilah. Ketika dalam tahun 1947 Kartosuwirjo terpilih sebagai komisaris Masyumi Jawa Barat merangkap Sekretaris I Masyumi, jalan ke arah realisasi cita-citanya semakin terbuka. Ia pernah diangkat oleh Pemerintah sebagai Wakil Menteri Pertahanan, akan tetapi karena sudah mempunyai gagasan sendiri maka jabatan itu tidak dipangkunya.

Perjanjian Renville yang diterima oleh Pemerintah pada tahun 1948, ditolak oleh Kartosuwirjo. Begitu pula ia menolak politik hijrah sebagai salahsatu ketentuan dari Renville. Politik yang demikian dianggapnya merugikan perjuangan dan karena itu ia tidak mengijinkan pasukan Hizbullah dan Sabillillah yang ada di bawah pengaruhnya meninggalkan Jawa Barat. Setelah Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwirjo lebih bebas melaksanakan rencananya. Dalam konferensi Cisayong yang diadakan pada bulan Februari 1948 diputuskan untuk merubah ideologi Islam dari bentuk kepartaian ke bentuk kenegaraan, membekukan Masyumi Jawa Barat dan mengangkat Kartosuwirjo menjadi imam seluruh umat Islam Jawa Barat. Dalam bulan itu juga dibentuk TII (Tentara Islam Indonesia).

Sikap bermusuhan terhadap RI terlihat dengan tegas dalam Maklumat Militer DI No. 1 yaitu tentang Tentara Liar Gerombolan Gabungan yang ada di Jawa Barat sebelah barat. Mereka menganggap bahwa seluruh Jawa Barat sudah berada di bawah kekuasaannya.

Setelah merasa kuat maka pada tanggal 7 Agustus 1949 diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Dalam usaha untuk memperkuat gerakannya, Kartosuwirjo tidak berdiri sendiri. Ia mendapat bantuan dari Belanda. Dalam bulan Maret 1949 diadakan perundingan dengan Letnan Kolonel Cassa dan dekat sebelum pengakuan kedaulatan RI diadakan pula perundingan antara lain dengan Westerling, Wiranatakusumah dan Anwar Tjokroaminoto. Dalam bulan Januari 1950 diadakan pula pertemuan dengan Kapten Schmidt di Bandung. Bahkan Kartosuwirjo juga pernah bertemu dengan Komisaris Tinggi Nederland H. Lampingh. Sebagai pelaksana keputusan pertemuan tersebut maka ditunjuk Mayor Jenderal Peraira yang akan menggerakkan orang-orangnya masuk ke dalam tubuh DI melalui agen-agennya yang

ditanam dalam perkebunan-perkebunan milik Belanda di Jawa Barat. Karena itu dalam tahun 50-an DI memiliki persenjataan yang lengkap dan dapat meluaskan pengaruhnya serta mengadakan konsentrasi di gunung-gunung di daerah Jawa Barat yang berdekatan dengan perkebunan-perkebunan milik Belanda.

Operasi Militer terhadap DI di Jawa Barat resminya telah dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949, tetapi akibat campur tangan golongan politik, pelaksanaannya tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah masih memberi kesempatan kepada Kartosuwirjo untuk mengakhiri petualangannya secara baik, namun kesempatan itu tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan. Pemerintah baru bertindak tegas pada bulan Oktober 1961 ketika Presiden memerintahkan untuk menangkap hidup atau mati Kartosuwirjo dan menghancurkan gerombolannya.

Dalam operasi DI ini dipergunakan taktik pagarbetis yang dilaksanakan oleh ABRI bersama rakyat, dengan tujuan memperkecil ruang gerak DI. Basis-basis DI dikepung, garis supplynya dipotong dalam daerah yang luas. Sementara itu ABRI melaksanakan operasi langsung menuju basis-basis DI. Untuk itu dibentuk Komando Operasi BRATAYUDHA, dipimpin oleh Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi Kolonel Ibrahim Adjie. Bagian dari Operasi BRATAYUDHA yalah KURUSETRA I, KURUSETRA II dan KURUSETRA III. Akibat operasi yang terus menerus dengan dibantu oleh tembakan-tembakan dari udara, kekuatan DI menjadi lemah. Pada tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo berhasil ditangkap di gunung Geber daerah Majalaya oleh pasukan KURUSETRA II yang dipimpin oleh Letnan Dua Suhanda.

Dengan tertangkapnya Kartosuwirjo, berakhirlah persoalan DI di Jawa Barat. Untuk mengadakan rehabilitasi dan normalisasi di daerah-daerah yang menderita akibat gangguan DI, ABRI melancarkan Operasi Bhakti, sedang Operasi Budhi dilancarkan untuk menertibkan mental alat negara dan masyarakat.

Gerakan DI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan Subchi. Daerah operasinya terutama daerah Pekalongan dan daerah perbatasan Jawa Tengah — Jawa Barat. Dalam rangka penumpasan DI Jawa Tengah oleh Divisi Diponegoro dibentuk

Gerakan Banteng Nasional. Daerah operasinya disebut daerah GBN. Pimpinan operasi yalah Letnan Kolonel Sarbini, kemudian dilanjutkan oleh Letnan Kolonel Bachrum, dan yang terkahir oleh Letnan Kolonel Achmad Yani. Untuk menumpas DI ini Achmad Yani membentuk pasukan khusus yang disebut Banteng Raiders. Daerah GBN berhasil diamankan pada tahun 1957.

Soal otonomi daerah, pertentangan antara golongan "teuku" dan "teungku", tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah, merupakan sumbu pembakar yang menjadi sebab meletusnya pemberontakan DI daerah Aceh. Walaupun latar belakang berbeda dengan Jawa Barat, namun gerakan di Aceh menyesuaikan diri dengan langkah Kartosuwirjo.

Gerakan ini dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh. Selama Perang Kemerdekaan ia menjadi Gubernur Militer. Ketika Pemerintah membentuk provinsi Sumatra Utara dan Aceh dijadikan satu keresidenan dalam provinsi itu, Daud Beureuh mulai memperlihatkan rasa tidak puasnya. Karena ia adalah seorang tokoh dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dan bekas Gubernur Militer, tidaklah sulit baginya untuk mencari pengikut. Selama hampir tiga tahun ia dan kawan-kawannya mempersiapkan diri dan pada tanggal 20 September 1953 ia memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia — Kartosuwirjo. Proklamasi itu diperjelas dengan "Piagam Batoe Karang." Pada waktu itu ia berhasil mempengaruhi pejabat Pemerintah Daerah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Kemudian Daud Beureuh menggerakkan pengikutnya menduduki kota-kota di seluruh Aceh seperti Tapak Tuan, Meulaboh, Kotaraja, Sigli dan Bireuen.

Meskipun telah bertahan dengan gigih, namun karena kekuatan yang tidak berimbang, ABRI terpaksa mengundurkan diri ke daerah-daerah yang aman. Sesudah bantuan datang dari Sumatra Utara dan Tengah, operasi pembalasan segera dimulai. Satu demi satu kota-kota yang dikuasai pemberontak direbut kembali. Mula-mula Peureula, menyusul Tapak Tuan (3 Oktober 1953) dan kemudian Meureudu yang direbut dengan serangan darat, laut dan udara. Perebutan yang terlama yalah perebutan Takengon oleh Letnan Kolonel Ibrahim Adjie yang bergerak dari Blang Kajeren bersama-sama dengan pasukan yang dipimpin oleh Kapten N.H. Sitorus. Kota ini jatuh pada tanggal 24 November

1953. Kota terkahir yang berhasil direbut yalah Geumpang.

Dengan jatuhnya kota-kota ini kembali ke tangan ABRI, maka hampir seluruh kekuatan Daud Beureuh dapat dipatahkan. Persoalan-persoalan yang timbul kemudian yalah gangguan keamanan, teror, penculikan dan perampokan. Untuk mengatasi soal keamanan, atas inisiatif Panglima Kodam I/Iskandar Muda Kolonel M. Jasin diadakanlah musyawarah kerukunan Aceh. Musyawarah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh daerah dan dilangsungkan pada tanggal 17 — 28 Desember 1962. Hasil nyata dari musyawarah ini yalah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.

"Anak" yang lain dari Kartosuwirjo yalah Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Selama Perang Kemerdekaan, Kahar berjuang di Jawa dalam Brigade XVI. Sesudah pengakuan kedaulatan ia kembali ke daerah asalnya Sulawesi Selatan dengan tugas menyelesaikan masalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dibentuk waktu Perang Kemerdekaan. Pemerintah membubarkan kesatuan ini dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Pembubaran itu dinyatakan dengan Dekrit Kawilarang (Panglima TT VII) tanggal 1 Juli 1950 dan kegiatan KGSS selanjutnya dilarang. Kahar menantang keputusan itu dan menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu Brigade yang disebut Brigade Hasannuddin. Tuntutan ditolak. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Sebagian anggota gerilyawan setuju dan pada tanggal 24 Maret 1950 beberapa batalyon CTN secara resmi dilantik, tetapi Kahar sendiri tidak mau menyetujui kebijaksanaan itu.

Pendekatan-pendekatan yang diadakan sesudah itu kelihatannya akan membawa hasil, ketika Kahar menyatakan bersedia dilantik sebagai acting Wakil Panglima TT VII. Tetapi pada saat pelantikan akan dilakukan, Kahar Muzakar dengan para pengikutnya melarikan diri ke hutan dan mulai sejak itu selalu mengadakan pengacauan. Pada tanggal 7 Agustus 1953 ia merubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari DI Kartosuwirjo.

Untuk menumpas gerakan Kahar Muzakar ini mula-mula dibentuk Operasi MERDEKA, kemudian Operasi HALILINTAR

di bawah pimpinan Letnan Kolonel Warrouw. Kahar bisa bertahan karena medan di daerah Sulawesi Selatan memungkinkan untuk berkucing-kucingan. Operasi Halilintar berakhir, dilanjutkan dengan operasi GUNTUR dengan menggunakan Resimen Team Pertempuran Guntur. Operasi ini dibagi menjadi Batalyon Team Pertempuran (BTP) I, II, III, IV dan BTP V. Gerakan operasi ini dipusatkan di daerah Palopo Selatan, karena daerah Sengkang — Palopo Selatan merupakan daerah strategis yang masih berada di bawah kekuasaan Kahar Muzakar. Karena tekanan yang dilancarkan ABRI, beberapa tokoh pemberontak menyerahkan diri, antara lain Bahar Mattaliu. Operasi ini juga berhasil merebut benteng Kahar yang terkuat di Lanuru.

Operasi GUNTUR kemudian dilanjutkan dengan operasi KILAT. Operasi KILAT ini dipimpin oleh Kolonel Andi Sose berkekuatan tiga batalyon BTP yaitu BTP Merah, Kuning dan Hijau. Sasaran pokok operasi ini yalah daerah Sengkang — Siwa yang merupakan pusat konsolidasi pasukan Kahar Muzakar, dan markas divisi Momoc. Di daerah ini terletak markas Menteri Pertahanan TII Kahar Muzakar. Pada tanggal 7 Mei 1961 daerah yang dianggap Kahar Muzakar tak mungkin disentuh ABRI ini, berhasil diterobos oleh satuan operasi KILAT.

Berkat operasi-operasi itu secara berangsur-angsur keadaan keamanan Sulawesi Selatan pulih kembali. Tetapi pada tanggal 18 April 1964 Letnan Kolonel Andi Selle mengadakan pengkhianatan di Pinreng. Ia adalah seorang anak buah Kahar Muzakar yang memihak ABRI. Dalam Kodam, Andi Selle pernah menduduki jabatan komandan batalyon dan kemudian komandan resimen.

Berhubung dengan gangguan keamanan yang semakin bertambah itu, Presiden dalam rapat panglima-panglima pada tanggal 18 April 1964 memerintahkan supaya keamanan di Sulawesi segera dipulihkan. Atas dasar perintah ini operasi KILAT ditingkatkan. Operasi dipimpin oleh Panglima Kodam Hasannuddin Brigjen M. Jusuf, dengan Ka Stafnya Kolonel Solichin Gautama Purwanegara. Pasukan yang dikerahkan terdiri dari RPKAD, KKo/AL, Kujang/Siliwangi, Raiders/Merdeka, Raiders/Hasannuddin. Operasi ini dibagi atas TEKAD I, II, III dan IV. Sasaran operasi yalah

pencarian dan penangkapan Kahar Muzakar.

Ruang gerak gerombolan semakin sempit dan sesudah 17 Agustus 1964 didapat informasi bahwa Kahar berada di daerah sekitar Sihu Uha. Pencarian diintensifkan. Dalam penggerebekan tanggal 3 Februari 1965 oleh pasukan Peltu Umar dari Kujang, Kahar tertembak mati oleh peluru Kopral II Sadeli. Dengan tertembaknya Kahar Muzakar maka berakhir pula gangguan keamanan di Sulawesi Selatan.

3. Menumpas PRRI/Permesta.

Demokrasi Liberal ditahun 1950-an menimbulkan anarki. Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidak-adilan politik. Daerah-daerah merasa dianak-tirikan oleh Pemerintah Pusat, terutama dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu dari beberapa daerah muncul suara-suara menuntut otonomi yang luas. Keseimbangan antara Pusat dan Daerah menjadi berkurang ketika Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Dengan demikian berakhirlah mitos Dwitunggal Sukarno — Hatta, yang kemudian akan dijadikan salahsatu alasan oleh daerah untuk menentang Pemerintah Pusat.

Dalam keadaan yang demikian itu, bekas anggota Divisi Banteng mengadakan reuni di Padang pada tanggal 20 — 24 November 1956, dipimpin oleh Kolonel Pensiun Ismail Lengah, bekas komandan Divisi Banteng. Dari reuni itu lahir Dewan Banteng yang diketuai oleh Komandan Resimen IV TT I, Letnan Kolonel Achmad Husein. Di bidang pemerintahan Dewan Banteng menuntut supaya kepada daerah Sumatra Tengah diberikan otonomi yang luas. Di bidang pembangunan agar Pemerintah melakukan perbaikan yang radikal di segala lapangan, sedangkan di bidang militer diajukan tuntutan supaya dibentuk Komando Pertahanan Sumatra Tengah yang merupakan sebuah komando utama dalam Angkatan Darat. Karena terlihat tanda-tanda, bahwa Dewan Banteng bertendensi politik, maka pada tanggal 9 Desember 1956 KSAD mengeluarkan pengumuman melarang perwira-perwira Angkatan Darat melakukan kegiatan di bidang politik. Sementara Pemerintah Pusat sedang mempelajari warna yang sesungguhnya dari kegiatan Dewan Banteng, maka Dewan Banteng

mengambil-alih pemerintahan Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo dengan alasan gubernur kurang mampu melaksanakan pembangunan daerah. Dengan demikian terlihat dengan nyata bahwa gerakan itu bersifat politik.

Kegiatan Sumatra Tengah itu diikuti pula oleh Sumatra Timur. Pada tanggal 22 Desember 1956, Panglima TTI Kolonel Simbolon sebagai Ketua Dewan Gajah mengumumkan mengambil-alih semua kekuasaan yang ada dalam wilayah TTI serta tidak mengakui Kabinet Ali Sastroamidjojo. Tindakan Simbolon berlatar belakang keterlibatannya dalam peristiwa penyelundupan di Teluk Nibung yang telah dilarang KSAD sejak tanggal 30 Juni 1956.

Sebagai Panglima TT I, seharusnya ia telah melakukan serah terima jabatan dengan penggantinya Kolonel Zulkifli Lubis. Tetapi Simbolon mengulur-ulur waktu sampai terjadinya peristiwa 22 Desember 1956 itu.

Sementara itu di Sumatra Selatan terjadi pula kegiatan-kegiatan yang serupa. Pada tanggal 18 — 19 Desember 1956 diadakan Konferensi Dinas Pemerintahan Sumatra Selatan yang membahas masalah pembangunan daerah. Sesudah itu pada tanggal 15 — 17 Januari 1957 dilangsungkan Kongres Adat Sumatra Selatan. Dari Kongres ini lahir Dewan Garuda yang kelak melahirkan "Piagam Perjuangan Sumatra Selatan." Dewan Garuda menuntut antara lain supaya masalah Sumatra diselesaikan secara bijaksana. Ketika Gubernur Sumatra Selatan, Winarno, mendapat mosi tidak percaya dari DPRD, maka Panglima TT II Letnan Kolonel Barlian dengan alasan untuk menjaga keamanan daerah dan menjaga kestabilan pemerintahan, mengambil-alih pemerintahan dari tangan Gubernur.

Kericuhan yang terjadi tidak hanya terbatas di Sumatra, tetapi juga pada daerah-daerah lain, umumnya di luar Jawa. Pertentangan politik di Pusat yang kemudian menjadi bertambah tajam dengan lahirnya Konsepsi Presiden, berpengaruh pula di Indonesia bahagian Timur. Akhirnya bulan Februari 1957, Panglima TT VII, Letnan Kolonel H.N.V.Sumual mengadakan *meeting of minds and ideas* dengan staf dan perwira-perwira TT VII. Pertemuan itu melahirkan konsepsi mengenai cara-cara untuk mengatasi ketegangan yang terdapat dalam kehidupan kenegaraan pada

waktu itu. Antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan, agar dengan demikian dapat dimulai pembangunan semesta. Untuk menyelesaikan soal-soal keamanan itu, maka tanggungjawab wilayah dan pasukan harus berada dalam satu tangan yaitu Panglima TT. Kegiatan selanjutnya yalah pertemuan yang diadakan pada tanggal 1 menjelang 2 Maret 1957 di kantor Gubernur di Makasar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sipil dan militer. Pertemuan itu melahirkan "Piagam Perjuangan Semesta" yang dikenal dengan singkatan Permesta. Keesokan harinya tanggal 2 Maret 1957, Panglima TT VII mengumumkan, bahwa di daerahnya berlaku keadaan perang dan mengangkat Gubernur Militer untuk Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Barat. Berhubungan dengan kejadian itu KSAD memerintahkan Komandan Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk tidak melakukan perubahan organisatoris dan menghindarkan terjadinya pertempuran. Langkah-langkah Sumatra dan Sulawesi Utara itu diikuti pula oleh Kalimantan. Di daerah ini lahir Dewan Lambung Mangkurat yang kegiatannya dapat dikatakan tidak berbeda dengan Dewan Banteng ataupun Permesta.

Antara Dewan-dewan daerah ini terdapat kerjasama dan saling hubungan satu dengan yang lainnya. Dewan Banteng menempatkan seorang wakilnya dalam Dewan Garuda, yakni Sidi Bakaruddin yang waktu itu memegang jabatan Kepala Exploitasi DKA Sumatra Selatan. Sementara itu dengan beberapa orang tokoh politik tertentu terjalin pula kerjasama, begitu pula dengan beberapa orang tokoh-tokoh militer dari Pusat, seperti Kolonel Zulkifli Lubis. Pertemuan Sungai Dareh pada tanggal 9 Januari 1958 lebih lagi menunjukkan hal itu. Dalam pertemuan itu hadir Achmad Husein, Simbolon, Sumual, Dahlan Djambek, Zulkifli Lubis dari pihak militer dan Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Sjafruddin Prawiranegara dari pihak politik. Dalam pertemuan itu dimatangkan rencana untuk membentuk pemerintahan baru.

Untuk menyelesaikan persoalan daerah itu, khususnya bidang militer, di Jakarta pada tanggal 15 – 20 Maret 1957 diadakan konferensi Panglima TT seluruh Indonesia termasuk panglima-panglima dari daerah yang sedang bergolak. KSAD menyatakan

bahwa pada pokoknya pimpinan Angkatan Darat dapat memahami tuntutan-tuntutan daerah, tetapi menolak cara-cara yang dipakai. Pemerintahpun melakukan pendekatan secara bijaksana. Ke Sumatra dikirimkan misi mula-mula dipimpin oleh kolonel Dahlan Djambek (ternyata kemudian ikut memberontak). Kemudian oleh Zainal Abidin Achmad (anggota Parlemen) dan terakhir Menteri Eni Karim. Ke Sumatra Selatan dikirimkan misi Sumarman SH, sedangkan ke Sulawesi Utara misi Maengkom. Ternyata misi-misi itu tidak berhasil mencapai titik pertemuan pendapat antara Pusat dan Daerah. Dalam langkah selanjutnya, pada tanggal 10 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri pula oleh Sukarno — Hatta, dan kemudian Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Sebenarnya kedua musyawarah itu menghasilkan hal-hal yang baik, tetapi kemudian daerah membuat penafsiran sendiri-sendiri.

Pergolakan daerah itu menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo, diganti oleh Kabinet Djuanda. Komposisi kabinet ini tidak didasarkan pada perimbangan partai politik, tetapi didasarkan pada kemampuan anggota kabinet.

Pendekatan-pendekatan secara bijaksana yang ditempuh baik oleh Pemerintah maupun oleh pimpinan Angkatan Darat, ternyata tidak berhasil. Pada tanggal 10 Februari 1958 Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah supaya dalam waktu 5 x 24 jam kabinet Djuanda membubarkan diri. Dengan tegas ultimatum itu ditolak, dan perwira yang terlibat (Simbolon, Lubis, Achmad Husein, Dahlan Djambek) dipecat. Pada tanggal 12 Februari 1958 KSAD membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah (KDMST) dan menempatkan seluruh dinas dan jawatannya langsung di bawah KSAD.

Ketika batas waktu ultimatum itu habis, pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang diproklamasikan berdirinya "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)" dengan Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Dengan demikian jalan diplomasi tertutup dan jalan militer terbuka.

ABRI menyiapkan operasi gabungan terdiri dari unsur-unsur darat, laut, udara dan kepolisian. Untuk daerah Sumatra dilancarkan Operasi TEGAS (untuk Riau), Operasi 17 AGUSTUS (untuk Sumatra Barat), Operasi SAPTAMARGA (untuk Sumatra Timur)

dan Operasi SADAR (untuk Sumatra Selatan). Untuk Sulawesi dan Indonesia bagian timur umumnya dilancarkan operasi SAPTA-MARGA dan Operasi MERDEKA.

Perlu diketahui bahwa dalam daerah-daerah yang bergolak itu masih terdapat kekuatan-kekuatan yang memihak Pusat dan menentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan olen dewan-dewan tersebut. Tenaga-tenaga penentang dalam Dewan Banteng terutama yalah kelompok yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Kaharuddin Dt. Rangkajo Basa. Termasuk dalam kelompok ini yalah Mayor Nurmathias, Komandan Batalyon 140. Di Sumatra Timur Simbolon ditentang oleh Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel Wahab Makmur, di Sumatra Selatan Letnan Kolonel Barlian ditentang oleh Letnan Kolonel Harun Sohar. Permestapun mempunyai lawan-lawan dalam daerahnya, yakni Kapten Frans Karangan, Inspektur Polisi Suaeb dan Residen Nani Wartabone. Dengan adanya kekuatan-kekuatan ini, maka ABRI telah mempunyai pancangan kaki yang akan mempermudah operasi yang akan dilancarkan.

Operasi TEGAS dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution dengan sasaran daerah Riau. Yang dipentingkan dalam operasi ini yalah unsur pendadakan. Untuk mengamankan operasi ini dilakukan gerak tipu, yaitu mengirimkan kapal-kapal perang ke perairan Padang, sehingga menimbulkan kesan bahwa Sumatra Baratlah yang pertama-tama akan diserang. Pada tanggal 12 Maret 1958 kota Pekanbaru berhasil dikuasai. Penguasaan kota ini mempunyai dua arti penting, yaitu pertama menghindarkan kemungkinan intervensi Amerika Serikat dengan dalih untuk melindungi warganegaranya dan instalasi minyak mereka, dan kedua menutup pintu bagi larinya tokoh-tokoh PRRI bila operasi ke Sumatra Barat dilancarkan.

Operasi 17 AGUSTUS dipimpin oleh Kolonel Achmad Yani ditujukan ke daerah Sumatra Barat dengan sasaran merebut pusat militer lawan (Padang) dan pusat pemerintahan (Bukittinggi). Sejak tanggal 16 April 1958 perairan Padang telah diblokade oleh kapal-kapal ALRI dipimpin oleh KRI *Gajah Mada* dan dibantu oleh beberapa kapal Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia). Sesuai dengan rencana, maka pada tanggal 17 April jam 06.30 pendaratan dilangsungkan di suatu tempat kira-kira 6 Km. di sebelah utara

Padang, sementara pesawat-pesawat AURI melakukan pemboman terhadap lapangan terbang Tabing. Pada hari itu juga kota Padang berhasil dikuasai. Gerakan selanjutnya ditujukan untuk merebut Bukittinggi. Kota itu sendiri sejak tanggal 19 April 1958 telah terkepung dari empat arah. Di sebelah utara RTP I berhasil menduduki Bangkinang, di sebelah barat RTP 0 — 1. menduduki Padangsidempuan, di sebelah timur, Sawahlunto telah diduduki oleh RTP I, sedangkan kota Padang telah pula dikuasai oleh RTP II dan RTP III. Kota ini jatuh pada tanggal 4 Mei 1958, 17 hari setelah pendaratan di Padang. Dengan jatuhnya Bukittinggi selesailah operasi ke sasaran utama dan selanjutnya dilakukan operasi-operasi pembersihan dan teritorial. Tokoh-tokoh PRRI melarikan diri ke hutan-hutan dan pada pertengahan tahun 1961 mereka menyerah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Setelah kekuasaan Simbolon dipatahkan oleh Letnan Kolonel Djamin Gintings dan Letnan Kolonel Wahab Makmur, situasi di Sumatra Timur sesungguhnya belum reda. Mendapat angin dari proklamasi PRRI, pada tanggal 16 Maret 1958 Mayor Boyke Nainggolan melancarkan operasi SABANG — MERAUKE di Medan dan menguasai kota itu selama 24 jam. Operasi penumpasan digerakkan dari Belawan dipimpin oleh Brig. Jen. Djatikusumo dengan menggunakan kekuatan Batalyon 322/Siliwangi dan RPKAD, sedangkan dari Brastagi diadakan pula gerakan dipimpin oleh Panglima TT I Letkol. Djamin Gintings. Dalam pengunduran diri, Nainggolan membagi dua pasukannya. Satu pasukan di bawah pimpinan Mayor Said Usman bergerak ke Aceh, tetapi dihancurkan oleh pasukan Kapten Maliki di Pangkalan Brandan. Pasukan Nainggolan sendiri bergerak ke arah Tapanuli dan di sepanjang jalan ditembaki oleh pesawat-pesawat AURI. Semula operasi tidak dilanjutkan ke Tapanuli, tetapi ketika ternyata bahwa daerah itu dijadikan basis kekuatan oleh Nainggolan dan Sinta Pohan sedangkan Komandan Resimen 3 Mayor Sahala Hutabarat karena kekuatan yang tidak seimbang tidak dapat berbuat apa-apa, maka dikirimkanlah Operasi SAPTAMARGA. Operasi ini berhasil merebut Sibolga pada tanggal 24 April dan Tarutung pada tanggal 27 April 1958. Dengan demikian berakhirlah persoalan yang dimulai oleh Nainggolan. Bagi PRRI, lepasnya daerah Tapanuli merupakan pukulan kedua setelah Riau.

Agak berbeda dengan operasi-operasi tersebut di atas, Operasi SADAR ditujukan ke daerah yang kurang tegas sikapnya. Ketika Sumatra Barat, Sumatra Timur, dan Tapanuli nyata-nyata melibatkan diri dalam PRRI, Sumatra Selatan tidak menunjukkan sikap yang jelas. Tetapi dari kenyataan bahwa dalam bulan September 1957 Letkol. Barlian pernah mengadakan pertemuan dengan Achmad Husein di Padang, Pemerintah mempunyai cukup alasan untuk mencurigainya. Barlian dipanggil ke Jakarta, tetapi tidak datang. Ia mengirimkan Wakil Kepala Stafnya Mayor Nawawi untuk memenuhi panggilan itu. Tetapi Nawawi bukannya pergi ke Jakarta. Bersama pasukannya ia berangkat ke Prabumulih dan menentang siapa saja yang melawannya. Atas insubordinasi yang dilakukan Nawawi itu, Barlian tidak mengambil tindakan apa-apa.

Untuk menyelesaikan peristiwa Sumatra Selatan itu dikirimkan Operasi SADAR di bawah pimpinan Letnan Kolonel dr. Ibnu Sutowo. Operasi ini lebih banyak bersifat operasi intelijen daripada operasi tempur. Pada tanggal 26 Juni 1958 Barlian dinonaktifkan dan diganti dengan Letnan Kolonel Harun Sohar. Sesudah itu penumpasan terhadap Nawawi dapat dilakukan.

Dari segi intensitas, perlawanan yang dilakukan oleh Permesta di Sulawesi Utara lebih tinggi daripada perlawanan yang dilakukan oleh PRRI di Sumatra. Selain itu mereka juga mempunyai kelebihan yakni memiliki pesawat terbang. Ketika kekuatan ABRI dipusatkan ke Sumatra, "Angkatan Udara Permesta" (Aurev = "Angkatan Udara Revolusioner") merajai udara di bahagian timur Indonesia dan melakukan pemboman terhadap beberapa kota, seperti Ambon.

Operasi yang ditujukan ke Sulawesi Utara yalah Operasi MERDEKA dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat.

Bahagian-bahagian daripada operasi ini yalah :

1. Operasi SAPTAMARGA I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarsono dengan daerah sasaran Sulawesi Tengah.
2. Operasi SAPTAMARGA II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.

Operasi SAPTAMARGA III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Magenda dengan daerah sasaran kepulauan sebelah utara Menado.

4. Operasi SAPTAMARGA IV di bawah pimpinan langsung Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat dengan daerah sasaran Sulawesi Utara.
5. Operasi MENA I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dengan sasaran Jailolo.
6. Operasi MENA II di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKo Hunholz.

Sebelum operasi pokok itu dilancarkan, di Sulawesi tengah telah bergerak kesatuan-kesatuan yang tergabung dalam Operasi INSYAF yang dikoordinasi oleh Komando Antar Daerah Indonesia Bagian Timur (Koandait). Termasuk ke dalam operasi ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kesatuan yang dipimpin oleh Kapten Frans Karangan dan kesatuan Polisi di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Suaeb. Operasi ini berhasil menguasai kota-kota Donggala dan Parigi, sedangkan kesatuan yang dipimpin oleh Nani Wartabone (Pasukan Rimba) berhasil menyiapkan pancangankaki bagi pendaratan pasukan-pasukan operasi SAPTAMARGA II di Gorontalo.

Sesudah masing-masing Komando operasi berhasil menguasai daerah sasarannya (Jailolo direbut pada tanggal 3 Mei 1958, Mapanget pada tanggal 15 Mei 1958 dan Morotai pada tanggal 20 Mei 1958), dimulailah gerakan ke sasaran utama, yakni Menado. Serangan gabungan mulai dilancarkan pada tanggal 16 Juni 1958 dan sepuluh hari kemudian yaitu pada tanggal 26 Juni 1958 kota Menado jatuh ke tangan ABRI. Pada hari itu juga Komandan ATF 25 (Kesatuan Angkatan Laut yang diikutkan dalam operasi ini) Letnan Kolonel John Lie melaporkan kepada atasannya di Surabaya; Menado telah diduduki, Tuhan beserta kita.

Operasi selanjutnya ditujukan ke daerah lain seperti Tondano dan Tomohon. Pada pertengahan bulan Agustus 1958 kekuatan pokok Permesta dapat dikatakan telah lumpuh. Untuk mengamankan daerah Sulawesi Utara dilancarkan operasi pembersihan dan teritorial. Dalam operasi-operasi ini banyak tokoh-tokoh Permesta yang tertangkap atau terbunuh. Akhirnya pada per-

tengahan tahun 1961 sisa-sisa Permesta yang masih ada menyerahkan diri sesuai dengan seruan Pemerintah.

C. KITA DAN DUNIA

1. Melaksanakan politik bebas-aktif.

Sesudah Perang Dunia ke-II timbullah pergolakan-pergolakan dari negara-negara yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan, seperti halnya yang terjadi di Vietnam dan Tunisia yang ingin melepaskan diri dari Perancis, serta Irak dan Mesir dari Inggris. Di samping itu terjadi pula persengketaan antara Amerika Serikat dan sekutunya di satu pihak dengan Uni Sovyet serta RRC di lain pihak. Hal ini sangat membahayakan perdamaian dunia.

Indonesia sebagai negara muda yang baru saja menyelesaikan Perang Kemerdekaan, berusaha untuk tidak berpihak pada salah-satu Blok. Hal ini penting supaya Indonesia tidak mudah terbawa oleh arus pertikaian internasional sebagai akibat pertentangan ideologi dua Blok raksasa itu. Cara yang ditempuh Indonesia yalah menyokong penuh setiap usaha PBB untuk mengurangi ketegangan internasional, yang dilakukan melalui meja perundingan.

Landasan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas-aktif telah dicanangkan oleh Kabinet Hatta sejak tahun 1948. Prinsip yang ditekankan oleh Kabinet Hatta yalah "Agar Indonesia selalu bertindak sebagai subyek dalam percaturan dunia internasional dan mampu mempertahankan prinsip-prinsip pendiriannya sesuai dengan situasi dan kondisinya sendiri."

Walaupun dalam periode tahun 1950 – 1959 Indonesia mengalami banyak pergantian kabinet, namun program kabinet-kabinet tentang pelaksanaan politik luar negeri tetap tidak berubah. Atas persetujuan DPRS maka Kabinet Natsir telah mengirim Missi Parlemen yang terdiri dari 9 orang ke luar negeri (Belanda) dengan tujuan untuk memperkenalkan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya perjuangan mengenai Irian Barat. Dalam Kabinet Sukiman diadakan kerjasama dalam bidang ekonomi dan tehnik dengan Amerika Serikat. Sedangkan dalam Kabinet Wilopo dirintis perluasan hubungan persahabatan dengan berbagai-bagai negara di antaranya dengan India, Uni Sovyet,

Birma, Filipina, Suriah, Thailand dan Afganistan. Di samping itu dibuka pula perwakilan Indonesia di Uni Sovyet.

Di dalam kabinet Ali I telah pula diusahakan untuk menjaga perdamaian dunia dengan cara :

a. menentang percobaan bom atom yang dilakukan oleh Inggris di pulau Christmas di samudra Pasifik.

b. menentang penggunaan tenaga atom tidak untuk maksud damai.

Puncak dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif terjadi dimasa Kabinet Ali I dengan diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap dan Ali ke II pelaksanaan politik luar negeri mengalami pasang-surut karena adanya suara pro dan kontra yang dilontarkan oleh pihak partai-partai maupun oleh Pemerintah sendiri, tentang kebijaksanaan pelaksanaannya. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Zaken Kabinet di bawah Djuanda yalah menyelesaikan perjanjian perdamaian dan persetujuan pampasan perang antara RI dengan Jepang yang ditandatangani dan disetujui DPR pada tanggal 13 Maret 1958. Di samping itu ditandatangani pula bantuan luar negeri dari Uni Sovyet untuk perbaikan bidang industri, kapal, konsumsi pangan dan sebagainya. Dengan pelaksanaan itu Indonesia telah melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dinamis yang mendekati semua negara dengan tujuan tercapainya perdamaian dunia, sesuai dengan kepentingan nasional dan Pancasila.

2. *Mengemban tugas PBB.*

Pada pertengahan tahun 1956 terjadilah pergolakan di kawasan Timur Tengah. Pergolakan itu timbul sebagai akibat dinasionalisasinya Terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956 oleh pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser. Negara-negara pemegang saham seperti Inggris dan Perancis merasa sangat dirugikan dengan adanya nasionalisasi terusan Suez itu. Secara bersama negara-negara tersebut mengadakan protes terhadap tindakan pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes itu dan tetap pada pendiriannya yaitu menguasai terusan Suez untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya.

Pertikaian antara negara-negara yang berkepentingan dengan

masalah terusan Suez timbul. Bahkan kemudian disusul dengan agresi militer yang dilancarkan oleh gabungan Inggris, Perancis dan Israel terhadap wilayah Mesir. Kota-kota sepanjang terusan Suez dibom oleh tentara gabungan itu bahkan akhirnya gurun Sinai berhasil diduduki oleh pihak agresor.

Situasi yang demikian sangat mengancam perdamaian dunia dan wilayah Timur Tengah khususnya. Sehingga Dewan Keamanan PBB berkewajiban melerai dan menyelesaikan pertikaian itu secara damai. Negara-negara yang saling bertengkar dibawa ke meja perundingan. Lahirlah 6 fasal resolusi yang antara lain berisi adanya jaminan agar terusan Suez dijadikan daerah pelayaran bebas dan adanya pembagian bea cukainya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini disambut dengan baik oleh Inggris dan Perancis. Sebaliknya pihak Mesir tak dapat menerima sepenuhnya resolusi itu. Sehingga hasil sementara resolusi tak dapat menjamin berlangsungnya perdamaian di wilayah Timur Tengah. Situasi yang gawat ini mengundang PBB untuk segera mengadakan sidang Majelis Umum. Atas anjuran Menteri Luar Negeri Canada Pearson, maka oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 5 November 1956 dibentuk Komando PBB yang bernama UNEF, (United Nations Emergency Force). Sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal ELM Burns. Tugas UNEF adalah mengorganisir anggota Dewan Keamanan PBB untuk menjadi Polisi PBB di Timur Tengah.

Dalam masalah ini Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan dan ditunjuk sebagai salahsatu anggota dari missi perdamaian PBB. Atas penunjukkan ini maka pada tanggal 8 November 1956 Pemerintah Indonesia menyatakan sanggup melaksanakan tugas dari badan internasional itu.

Pemerintah Indonesia kemudian melimpahkan tugas pembentukan pasukan PBB ini kepada KSAD. Langkah pertama yang diambil KSAD yalah menunjuk Kolonel Djatikusumo untuk memimpin missi AD Indonesia ke Mesir. Langkah selanjutnya mengadakan persiapan di dalam negeri. Dibentuklah pasukan polisi Indonesia untuk PBB, yang anggotanya berjumlah satu detasemen (550 orang), terdiri dari pasukan Territorium IV (sekarang Kodam VII/Diponegoro) dan Territorium V/Brawijaya (sekarang Kodam VII/Brawijaya).

Sebagai tindak lanjut maka pada tanggal 28 Desember 1956 pasukan Indonesia untuk polisi PBB ini diresmikan oleh KSAD dan diberi nama GARUDA. Adapun susunan Pimpinan GARUDA ini yalah :

Komandan	:	Letkol Hartojo, kemudian Letkol Suadi.
Wakil Komandan	:	Mayor Sugiarto.
Kepala Staf	:	Mayor Soedijono.
Para Komandan Kompi	:	Kapten Sukarno, Kapten Harsono dan Kapten Suprapto.

Setelah segala persiapan baik fisik maupun mental pasukan GARUDA dipandang cukup untuk mengemban tugas internasional ini, maka pada tanggal 31 Desember 1956 diadakanlah upacara pelepasan oleh Presiden di halaman Istana. Pemberangkatan gelombang I pasukan GARUDA I dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1957 yang dipimpin oleh Mayor Soetikno. Pemberangkatan gelombang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1957 dengan pesawat C 124 Globemaster dari Angkatan Udara Amerika Serikat.

Sesampainya di tempat tugas maka oleh Komandan UNEF pasukan GARUDA I ditempatkan di El Sandhura. Dari El Sandhura pasukan GARUDA I dibagi-bagi, sebagian bertugas di El Ballah dan sebagian lagi di Markas Besar UNEF yang berkedudukan di Abu Suweir.

Adapun tugas utama pasukan GARUDA I yalah mengawasi penarikan mundur tentara Israel dari Gunun Sinai. Setelah penarikan mundur pasukan Israel selesai, maka terjadilah pergeseran markas pasukan GARUDA I dari El Sandhura ke Rafah di perbatasan Mesir dengan Israel. Sedangkan Markas Besar UNEF dipindahkan dari Ballah ke Gaza.

Setelah lebih kurang setengah tahun mengemban tugas PBB di Timur Tengah, maka pada tanggal 12 September 1957 Pasukan GARUDA I pulang kembali ke tanah air. Rombongan ke I tiba di tanah air tanggal 29 September 1957. Dalam mengemban tugas ini pasukan GARUDA I kehilangan seorang anggotanya yang gugur dalam melaksanakan tugas Negara.

3. *Konferensi Asia — Afrika.*

Dalam program Kabinet Ali I tentang Politik Luar Negeri Indonesia disebutkan bahwa Indonesia akan "Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia." Sebagai pelaksanaannya Kabinet Ali cenderung mendekatkan diri pada negara-negara Asia Afrika dan negara Sosialis, serta berusaha menggalang kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika.

Timbullah gagasan untuk menyelenggarakan suatu konferensi antar negara Asia-Afrika. Gagasan ini secara terperinci dilaporkan oleh Pemerintah di hadapan DPR pada tanggal 14 Juni 1954. Bersama-sama dengan Birma, Srilangka, India dan Pakistan diadakanlah konferensi pendahuluan. Konferensi Panca Negara ini diselenggarakan berturut-turut pada bulan September 1954 di Colombo dan pada tanggal 28 Desember 1954 di Bogor.

Persiapan ke arah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika semakin terang. Pada tanggal 8 Maret 1955 diadakanlah rapat Joint Secretary Conference Asia Africa di Bandung. Tepat pada tanggal 18 April 1955 dibukalah Konferensi Asia Afrika oleh Presiden Sukarno. Dalam Konferensi ini Ali Sastroamidjojo bertindak sebagai Ketua Konferensi, dan Dr. Ruslan Abdulgani sebagai Sekretarisnya. Konferensi ini berlangsung selama seminggu dari tanggal 18 s/d 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara.

Hasil maximal KAA ini kemudian dikenal dengan nama Dasa Sila Bandung, yang isinya meliputi kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan serta deklarasi bersama untuk menyelenggarakan perdamaian dunia. Dasasila Bandung sebagai hasil KAA kemudian dijadikan landasan oleh negara-negara Asia-Afrika untuk menentukan sikap dan tindakan bersama dalam soal-soal anti kolonialisme, dekolonisasi dan rasialisme.

III. DEMOKRASI TERPIMPIN

A. EXPERIMEN OTOKRASI.

1. Kembali ke UUD'45.

Pada bulan Februari 1957, Presiden Sukarno memanggil semua pejabat sipil dan militer serta semua pimpinan partai ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini Presiden Sukarno untuk pertama kalinya mengajukan konsepsinya yang berisi antara lain :

- Dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai ditambah dengan golongan fungsionil.
- Dibentuknya Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung), yang beranggotakan wakil-wakil partai dan golongan fungsionil dalam masyarakat. Fungsi dewan ini memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak konsepsi ini dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada Konstituante. Suhu politik semakin panas, Presiden kemudian mengumumkan keadaan darurat perang (SOB) untuk seluruh wilayah Indonesia. Seperti telah kita ketahui, gerakan di daerah-daerah kemudian meluas menjadi pemberontakan PRRI dan Permesta.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Sukarno atas nama Pemerintah menyampaikan amanatnya di depan sidang Konstituante dan menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD'45 menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang tetap. Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul amandemen tersebut, terlebih dahulu datang usul dari pihak Islam untuk menambahkan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" ke dalam mukadimah UUD'45. Usul amandemen tersebut ditolak oleh Konstituante dalam sidangnya tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) lawan 265 (menolak). Pada tanggal 30 Mei 1959 baru dilakukan pemungutan suara terhadap usul Pemerintah kembali kepada UUD '45 (tanpa perobahan). Hasilnya yalah 269 (setuju) lawan 199 (tidak setuju), sedangkan anggota yang hadir pada waktu

itu sebanyak 474 orang. Jadi dengan demikian tidak terdapat quorum 2/3 suara seperti yang disyaratkan UUDS 1950 pasal 37.

Sesuai dengan ketentuan tatatertib Konstituante, maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959, akan tetapi tidak tercapai quorum seperti tersebut di atas. Mulai keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya.

Menanggapi hal itu baik Presiden, Kabinet, Dewan Nasional maupun beberapa partai besar dan pimpinan TNI sama-sama bersepakat untuk segera melaksanakan "kembali kepada Undang-undang Dasar 1945". Langkah tersebut dipandang sebagai jalan untuk sama-sama mengembalikan persatuan nasional. Demikianlah, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang berisi :

1. pembubaran Konstituante.
2. berlakunya kembali UUD 1945 dan
3. tidak berlakunya lagi UUDS.

Tindakan tersebut disusul dengan pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus, yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato tersebut, kemudian terkenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), yang dalam sidang umum MPRS I/1960 ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian diperoleh suatu susunan ketatanegaraan dan garis-garis besar haluan negara yang baru, di mana kekuasaan dan peranan partai-partai politik pada waktu itu menjadi jauh berkurang. Dalam waktu singkat kemudian dibentuk kabinet baru (Kabinet Kerja) dengan Presiden Sukarno selaku Perdana Menteri dan Ir. Djuanda selaku menteri pertama. Di samping itu dibentuk pula sebuah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Alasan Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit tersebut adalah karena keadaan negara yang membahayakan persatuan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia serta timbulnya rintangan-rintangan untuk mengadakan pembangunan.

Sehubungan dengan macetnya sidang Konstituante membuat undang-undang dasar baru, ABRI mengusulkan kepada Presiden supaya kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Pada saat itu pula

Presiden Sukarno menampilkan gagasannya mengenai Demokrasi Terpimpin dan konsepsi yang mengetengahkan adanya golongan fungsionil (golongan karya) yang terdiri dari golongan pembangunan materiil dan golongan pembangunan spirituil. Hal ini ditegaskan pula dalam amanat Presiden pada sidang Konstituante tanggal 22 April 1959, bahwa ABRI adalah golongan karya yang harus ikut serta berperan dalam menentukan haluan negara dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan didekritkannya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, maka ABRI diakui dan disahkan sebagai salahsatu golongan karya yang ikut serta secara aktif dalam segenap kehidupan politik. Dengan demikian ABRI menemukan kembali identitas serta kepribadiannya sebagai pejuang yang mengemban tugas sebagai alat Hankamnas maupun sebagai golongan karya. Sejak itu peranan ABRI terus meningkat di dalam perjuangan nasional. Fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial-politik kemudian dikuatkan dalam beberapa peraturan Pemerintah dan dan dalam keputusan-keputusan MPRS. Fungsi Sosial-politik ini tidaklah lahir begitu saja, tetapi berakar pada sejarah lahirnya ABRI itu sendiri.

Tradisi melaksanakan tugas kedua bidang itulah yang kita sebut Dwi Fungsi ABRI. Akan tetapi pada masa Demokrasi Liberal fungsi kedua atau fungsi kekaryaan ini diusahakan untuk ditiadakan oleh golongan politik. Begitu juga pada masa Demokrasi Terpimpin. Golongan politik tetap berusaha untuk memojokkan fungsi sospol ini. Golongan itu terutama diwakili oleh PKI, sehingga menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan antara ABRI dengan PKI. Terutama PKI menyerang masalah pembinaan teritorial yang dilakukan ABRI di desa-desa, duduknya anggota-anggota ABRI dalam perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda dan sebagainya.

2. *Penyelewengan politik.*

Demokrasi Terpimpin yang harus mengembalikan semangat 1945 sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, ternyata semakin jauh dari sasarannya; malah oleh Presiden Sukarno telah digunakan untuk memupuk kekuasaan pada satu tangan. Akibat lebih jauh dalam pelaksanaannya, yalah telah dilakukan pe-

nyelewengan di segala bidang, dimulai dengan penyelewengan UUD 1945 disusul dengan penyelewengan dalam bidang politik luar negeri, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain. Pada kenyataan nya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, adalah pengambil-alihan oleh Presiden Sukarno daripada seluruh kekuasaan pemerintahan ke dalam tangannya. Rakyat mulai terbuka matanya dan melihat bahwa demokrasi terpimpin adalah diktatur di mana pengaruh PKI semakin lama semakin besar.

Dalam waktu singkat yaitu lebih kurang satu tahun (Juli 1959 — September 1960) perombakan atau retooling lembaga lembaga negara oleh Presiden Sukarno sebagaimana dinyatakan dalam "Manipol" hampir selesai dan hanya tinggal retooling terhadap orang-orang tertentu. Pembubaran terhadap partai-partai politik yang telah dicanangkan sejak permulaan tahun 1956 sampai saat itu tetap mendapat tentangan dari partai-partai termasuk PNI dan PKI yang paling dekat dengan Presiden Sukarno. Oleh karenanya rencana itu harus ditangguhkan. Tetapi penekanan terhadap golongan-golongan yang tidak menyetujui politiknya tetap dilancarkan.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, Masyumi dan PSI yang terlibat pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 7/1959. Dengan adanya Penetapan Presiden No. 3/1960, DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dibubarkan. Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Sukarno telah selesai menyusun komposisi DPR baru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ini yang dibentuk atas dasar penunjukan dari Presiden Sukarno sifat dan tugasnya menjadi berubah, yaitu men-ya-kan, bukan lagi tugasnya membicarakan, menolak atau menerima suatu hal yang diajukan untuk dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Memang sebelumnya pernah ada reaksi-reaksi dari partai-partai, antara lain dari pimpinan NU dan PNI. Beberapa orang pemimpin NU pernah menyatakan keberatannya terhadap pembubaran DPR lama hasil pemilihan umum dan mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggotanya untuk DPRGR. Akan tetapi karena adanya penambahan jumlah kursi untuk mereka, sikapnya berubah; pimpinan NU Rois Aam H.W Hasbullah menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk dengan PKI dalam

satu kabinet. Dari pihak PNI timbul reaksi terhadap pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955. Mr. Sartono, anggota pimpinan PNI/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955, menunjukkan dengan sikap dan kata-kata pada rapat terakhir DPR pada tanggal 17 Maret 1960, bahwa ia termasuk golongan yang merasa tidak puas dengan perkembangan keadaan. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa di kalangan partai-partai terdapat kesatuan pendapat. Tidak adanya kesatuan pendapat tersebut dapat dibuktikan dengan kenyataan adanya beberapa pemimpin dari berbagai partai yang menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama Liga Demokrasi. Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosjadi dari NU, didalamnya tergabung beberapa tokoh dari Masyumi, NU, Parkindo, partai Katholik, Liga Muslimin, PSII dan IPKI. Pada akhir bulan Maret 1960 Liga tersebut mengeluarkan suatu pernyataan yang melahirkan tuntutan, supaya untuk membentuk DPR yang demokratis, hendaknya dicari cara-cara dan jalan yang baik, demokratis dan konstitusionil. Oleh sebab itu hendaknya rencana Pemerintah untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang telah diumumkan tersebut, ditangguhkan.

Sebagai alasan dikemukakan a.l. :

a. perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPRGR, memperkuat pengaruh dan kedudukan daripada suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
b. DPRGR yang demikian, pada hakekatnya adalah DPRGR yang hanya akan meng-ya-kan saja, sehingga tidak dapat menjadi sokoguru Negara Hukum dan Demokrasi yang sehat.
c. pembaharuan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan, adalah bertentangan dengan azas-azas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Perkembangan keadaan selanjutnya memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut tidak memperoleh perhatian dari Presiden Sukarno.

Kegiatan Liga Demokrasi akhirnya terhenti pada saat Presiden Sukarno pulang kembali ke tanah air dari perjalanannya ke luar negeri. Kegiatan Liga tersebut hanya nampak sewaktu Presiden Sukarno berada di luar negeri. Dalam hal ini Perdana Menteri Djuanda, selaku Pejabat Presiden selama Presiden berada di luar negeri, bersikap lebih toleran.

Setibanya di tanah air Presiden Sukarno segera memerintahkan untuk menindak dengan tegas Liga Demokrasi tersebut, sebagaimana telah diucapkan di Tokyo. Perlu pula disebutkan tentang adanya reaksi terhadap langkah-langkah Presiden Sukarno yang datangnya dari perseorangan terutama mengenai masalah pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan juga reaksi terhadap pembentukan DPRGR. Reaksi itu antara lain datangnya dari 2 orang teman lama Presiden Sukarno, yakni Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo dan dari Mr. Sartono yang selain menjabat sebagai pimpinan PNI juga menjabat sebagai Ketua DPR hasil pemilihan umum tahun 1955. Reaksi juga datang dari Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi dan Sutomo (Bung Tomo) tokoh Partai Rakyat Indonesia. Dalam pernyataan yang ditujukan kepada partainya, Mr. Iskaq menyatakan bahwa mereka yang duduk dalam DPRGR bukanlah sebagai wakil dari PNI; hubungan antara mereka dengan PNI tidak ada lagi, sebab mereka duduk dalam DPRGR itu atas hasil penunjukan.

Demikian juga Mr. Sartono berpendapat dan menolak penetapan mereka dalam DPRGR. Sedangkan Sutomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 22 Juni 1960. Pengaduan yang ditujukan pada Kabinet Sukarno berbunyi antara lain sebagai berikut :

"Mengadukan Kabinet yang dipimpin oleh Dr. Ir. Sukarno atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kabinet tersebut atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dengan tindakan-tindakan Kabinet tersebut membubarkan parlemen Republik Indonesia hasil pemilihan rakyat .....".

Selanjutnya Sutomo menuduh kabinet bertindak sewenang-wenang dan mengemukakan beberapa fakta sbb :

a. Paksaan untuk menerima Manipol dan Usdek, tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.

b. Paksaan supaya diadakan kerjasama antara Nasionalis-Agama-Komunis.

c. Paksaan pembongkaran tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Prawoto Mangkusasmito memajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta supaya Pengadilan tersebut membatalkan, setidak-tidaknya menyatakan batal karena hukum, Keputusan Presiden No. 200/1960 yaitu membubarkan Masyumi.

Presiden Sukarno sebetulnya telah meninggalkan partai-partai politik dengan pernyataannya menjelang pembentukan kabinet baru yakni Kabinet Kerja, bahwa dalam mengadakan pengangkatan menteri-menteri baru tidak akan mengadakan hearing dengan partai-partai. Kabinet Gotong Royong yang dimaksudkan itu adalah gotong royong atau kerjasama antara golongan Nasionalis, Islam dan Komunis. Beliau dalam hal ini mengetahui bahwa untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah, terutama karena hal itu ditolak oleh NU. Sebagaimana disebutkan di muka, NU dengan tegas telah menyatakan tidak dapat bekerja-sama dengan PKI; oleh karena itulah Presiden Sukarno mengambil langkah untuk tidak melakukan hearing dulu dengan partai-partai politik dalam mempersiapkan pengangkatan menteri-menteri baru. Dalam keadaan demikian PKI-lah yang dapat mengambil suatu keuntungan, karena paling dekat dengan Presiden Sukarno.

Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPRS dan Ketua DPRGR diangkat menjadi menteri, dan tidak berapa lama kemudian para Panglima Angkatan diangkat pula menjadi menteri, Menteri/Panglima AD, AL, AU, dan AK. Para menteri Kabinet Kerja dinyatakan semata-mata sebagai pembantu Presiden, tidak ada pertanggungjawaban politik seorang menteri.

Demikianlah pengangkatan sebagai menteri terhadap Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, para ketua MPRS dan DPRGR merupakan perkembangan baru dalam tata-negara kita. Prinsip Trias Politica samasekali ditinggalkan dengan adanya pengangkatan seseorang untuk jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berlainan, yakni memegang pula lembaga-legislatif atau yudikatif dengan status exekutif. Dengan demikian langkah-langkah yang ditempuh oleh Presiden Sukarno dengan sistim

Demokrasi Terpimpin telah banyak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Kenyataan selanjutnya, menunjukkan bahwa sistim Demokrasi Terpimpin ternyata tidak dipergunakan untuk secepat-cepatnya memperbaiki taraf penghidupan rakyat melainkan kemudian disalahgunakan untuk penyelewengan-penyelewengan politik, ekonomi dan sosial-budaya.

3. Salah urus dan kemerosotan sosial-ekonomi.

Strategi dasar ekonomi terpimpin yang ditempuh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahap pertama berusaha menciptakan susunan ekonomi yang bersifat demokratis serta bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama sebenarnya merupakan persiapan menuju keadaan di mana setiap orang akan dijamin hidupnya secara layak. Dalam prakteknya ekonomi terpimpin berubah menjadi sistim lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang dekat dengan Istana.

Ekonomi diatur tanpa menghiraukan pengawasan efektif dari DPR (melalui budget dan perundang-undangan), sedangkan hukum-hukum ekonomi tidak dipercaya. Sarjana-sarjana dituduh textbook-thinking. Prinsip anggaran belanja berimbang tidak pernah dijalankan, begitu juga prinsip keseimbangan antara export dan import, antara arus barang dan uang, antara persediaan dan kesempatan kerja dengan pertambahan penduduk. Juga azas efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi, perlunya azas investasi bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya azas keadilan tidak dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja negara masih tetap merupakan sumber terbesar bagi timbulnya inflasi. Karenanya sangat sulit untuk merealisasi Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang telah disusun. Untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi ini, Pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) pada bulan April 1962. Akan tetapi dengan adanya pengeluaran belanja negara yang jauh lebih besar daripada penerimaan, menyebabkan inflasi terus meningkat yang memberi akibat pula bagi kehidupan dan perkembangan ekonomi dan sosial-budaya yang menjadi bertambah kalut. Ternyata KOTOE tidak berhasil mengatasi keadaan ini. Sekali lagi Pemerintah berusaha menjalankan perbaikan ekonomi

dengan jalan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada bulan Mei 1963, namun Dekon pun ternyata gagal tidak terlaksana.

Yang amat menyolok dalam periode Demokrasi Terpimpin yalah penyelewengan-penyelewengan yang menyangkut pemberian deferred payment untuk "Dana Revolusi" yang telah mengacaukan samasekali keuangan kita; demikian pula proyek-proyek mercusuar membuat inflasi melonjak dengan curam ke atas.

B. DIPLOMASI DAN KONFRONTASI.

1. *Politik Luar Negeri Nefo.*

Adanya konfrontasi dengan Malaysia tidak membawa keuntungan karena Indonesia makin diasingkan dari pergaulan bangsa-bangsa dan kehilangan goodwill dari tetangga-tetangganya yang terdekat. Pada waktu itu PKI telah berhasil membelokkan politik luar negeri Indonesia dari politik bebas-aktif ke politik luar negeri yang paralel dengan politik luar negeri RRC, sehingga tercipta poros Jakarta — Peking. Karena itu kita makin terikat pada RRC. Timbulnya gagasan politik yang ingin menciptakan suatu dunia baru (New Emerging Forces) sebagai tandingan terhadap dunia lama (Old Established Forces) kenyataannya sejalan dengan apa yang dikehendaki PKI.

Dalam bidang sosial-budaya nampak kegiatan PKI untuk mempengaruhi kehidupan sosial-budaya dengan ciri-ciri budaya asing komunis. Buku-buku, majalah-majalah serta film-film yang berasal dari Barat dikatakan merusak jiwa masyarakat karenanya harus dilarang. Selain terjadi pendekatan dengan RRC diadakan pula pendekatan dengan Uni Sovyet dan sekutu-sekutunya. Bantuan kredit jangka panjang yang diterima dari Uni Sovyet terutama untuk membeli peralatan Angkatan Perang, dalam perkembangan selanjutnya berpengaruh besar bagi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia.

Misi-misi dan pertukaran kebudayaan lebih banyak dilakukan dengan negara-negara komunis, terutama RRC. Diselenggarakannya Ganefo di Jakarta pada bulan November 1963 yang diikuti oleh negara Asia-Afrika dan Amerika Latin, di antaranya : RRC, Vietnam Utara, Korea Utara, Mesir dan Mexico, tidak

lepas dari adanya pengaruh RRC.

2. *Pembebasan Irian Barat.*

Usaha-usaha secara diplomasi yang dimulai sejak kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 untuk menyelesaikan masalah Irian Barat selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini adalah akibat daripada sikap pihak Belanda yang berusaha untuk terus menduduki Irian Barat. Bahkan pada bulan Agustus 1952 Pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara unilateral memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya. Pihak Indonesia membalas tindakan itu dengan menghapuskan Misi Militer Belanda pada bulan April 1953. Usaha yang dirintis sejak kabinet Natsir, kabinet RI yang pertama sesudah likwidasi RIS, tetap diteruskan oleh kabinet-kabinet penggantinya. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1954 untuk pertama kalinya masalah Irian Barat dibawa ke sidang Majelis Umum PBB. Namun usaha inipun tidak berhasil. Kabinet Burhanuddin Harahap meneruskan usaha kabinet yang digantinya, memperjuangkan kembalinya Irian Barat melalui sidang Majelis Umum PBB yang ke X. Pihak Belanda menanggapinya dengan kesediaan berunding dengan pihak Indonesia dengan syarat-syarat yang kurang jelas. Perundingan dilaksanakan tidak secara bersungguh-sungguh oleh pihak Belanda dan akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap secara unilateral membatalkan perjanjian KMB. Sesudah pemilihan umum tahun 1955 Kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan keseluruhan keputusan-keputusan KMB. Karena jalan diplomasi telah dilaksanakan beberapa kali tidak berhasil, maka pihak Indonesia meningkatkan perjuangannya. Pada akhir tahun 1957 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, yang semula adalah Front Buruh-Pemuda-Tani-Militer atau Front Perjuangan dengan persetujuan KSAD selaku penguasa Perang Pusat. Dewan Pertahanan Nasional menegaskan bahwa perjuangan harus ditingkatkan menjadi konfrontasi langsung dengan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1960 hubungan diplomatik dengan Belanda diputuskan. Untuk lebih meningkatkan perjuangan, maka Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang diucapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Tri Komando Rakyat lengkapnya adalah :

1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Selanjutnya diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan Gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang memutuskan untuk membentuk :

a. provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian Barat sebagai gubernurnya.
b. membentuk Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam tugas merebut Irian Barat.

Pembentukan provinsi Irian Barat gaya baru ditetapkan dengan penetapan Presiden No. 1/1962 dengan ibukota Kotabaru (sekarang Jayapura). Sesuai dengan Trikora itu kesiap-siagaan di semua bidang diperhebat. Sistim Gabungan Kepala Staf dirubah dan pimpinan Angkatan Bersenjata langsung di bawah Panglima Tertinggi. Angkatan Udara RI meresmikan pembentukan-pembentukan Komando Regional Udara (Korud) I-VI pada tanggal 10 Januari 1962.

Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadir Jenderal Soeharto (kemudian Presiden) dan Komando Mandala berkedudukan di Makasar. Pada tanggal 13 Januari 1962 Brigadir Jenderal Soeharto dilantik sebagai Panglima Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Di samping sebagai Panglima Mandala, Mayjen. Soeharto juga merangkap sebagai Deputy KASAD untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Pada bulan Januari itu juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala.

1. Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat : Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno.
2. Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution.
3. Kepala Staf : Mayor Jenderal Achmad Yani.

Sedangkan susunan Komando Mandala adalah :

Panglima Mandala	:	Mayor Jenderal Soeharto.
Wakil Panglima I	:	Kolonel Laut Subono.
Wakil Panglima II	:	Letkol Udara Leo Wattimena.
Kepala Staf Umum	:	Kolonel Achmad Tahir.

Sementara itu pada tanggal 15 Januari 1962 terjadilah peristiwa tragis, yakni pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB ALRI melawan destroyer dan fregat Belanda,gugur Deputy KSAL, Komodor Yos Sudarso.

Sesuai dengan perkembangan situasi, Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 1 kepada Panglima Mandala yang isinya :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan untuk mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara RI.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.
   a. Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomatik.
   b. Supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas/atau didudukkan unsur kekuasaan/ pemerintah daerah RI.

Untuk melaksanakan instruksi itu, Panglima Mandala menyusun strategi yang kita kenal dengan Strategi Panglima Mandala. Untuk mencapai strategi itu setelah memperhitungkan kemampuan Angkatan Bersenjata pada umumnya, sesuai dengan telaahan staf Gabungan Kepala Staf, maka pelaksanaan penyelesaian tugas adalah sebagai berikut :

1. Sampai akhir 1962.
   Dengan jalan infiltrasi memasukkan 10 kompi sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto, dan cukup ulet untuk tidak dapat dihancurkan secara bagian demi bagian oleh musuh. Malah kesatuan-kesatuan ini harus dapat mendudukan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.

2. Awal 1963.
   Mulai fase exploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.

3. Awal 1964.
   Fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Tetapi pada triwulan ketiga tahun 1962, terdapat perkembangan baru dalam bidang diplomasi, sehingga jadwal penyelesaian tugas tersebut tidak dapat diikuti dan harus dipercepat enam bulan. Infiltrasi melalui laut sebagian telah tercium oleh musuh dan mengalami rintangan dari mereka maupun oleh ombak yang besar. Pada bulan April 1962 ditambah dengan infiltrasi dari udara dengan menggunakan pasukan lintas udara dan raiders. Dengan cara demikian sampai tanggal 15 Agustus 1962 telah diinfiltrasikan 10 kompi. Sementara itu telah dipersiapkan pula operasi penentuan yang bernama Operasi JAYA WIJAYA dengan target pada bagian pertama bulan Agustus 1962.

Tahap infiltrasi merupakan peristiwa yang paling dramatis di dalam kehidupan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dan yang paling bersejarah di dalam riwayat perkembangan Angkatan Bersenjata kita. Operasi infiltrasi ini berhasil menembus dinding radar pertahanan Belanda yang sangat diandalkan oleh mereka. Dalam rangka operasi tersebut, pada tanggal 18 Maret dan 20 Maret didaratkan 4 peleton sukarelawan di pulau-pulau Gag, Waigeo dan Sansapor. Pada tanggal 23 Maret 1962 didaratkan Sukarelawan-sukarelawan di sungai Yera. Pada tanggal 24 April dilakukan operasi Banteng Ketaton dengan menerjunkan Team Garuda Merah di sekitar Fak-Fak dan Garuda Putih di sekitar Kaimana. Sedang Operasi SERIGALA mendaratkan pasukan di sekitar Sorong dan di sekitar Teminabuan. Selanjutnya pasukan Detasemen Pelopor Brigade Mobil pada tanggal 15 Mei didaratkan di sekitar Fak-fak. Operasi NAGA menerjunkan sejumlah 214 orang. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1962 dilancarkan Operasi JATAYU yang bertugas menerjunkan pasukan-pasukan untuk memperkuat kesatuan-kesatuan yang telah terlebih dahulu didaratkan, yang terdiri atas pasukan Elang,

pasukan Gagak dan pasukan Alap-alap. Pasukan Elang diterjunkan di Sorong, pasukan Gagak di sekitar Kaimana dan pasukan Alap-alap di sekitar Merauke.

Melalui laut pada tanggal 7 Agustus 1962 didaratkan kesatuan dari Detasemen Pelopor 1232. Pada tanggal 9 Agustus menyusul pasukan raiders dari Kodam XV dan pada tanggal 12 Agustus disusul dengan pendaratan pasukan raiders dari kesatuan yang sama. Sasaran pendaratan adalah pulau Misool.

Operasi JAYA WIJAYA direncanakan untuk melaksanakan serangan terbuka merebut daratan Irian Barat. Operasi itu dibagi atas : Operasi JAYA WIJAYA I untuk merebut keunggulan di udara dan di laut, Operasi JAYA WIJAYA II bertujuan merebut Biak, Operasi JAYA WIJAYA. III bertujuan merebut Hollandia (Jayapura), Operasi JAYA WIJAYA IV bertujuan merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakan operasi tersebut Angkatan Laut Mandala di bawah pimpinan Kolonel Laut Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17, terdiri atas tujuh gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.

Tetapi sebelum operasi JAYA WIJAYA ini dilaksanakan datanglah perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 18 Agustus 1962 jam 09.31 waktu Irian Barat. Perintah Presiden itu disusuli dengan Surat Perintah Panglima Mandala yang ditujukan kepada seluruh pasukan slagorde Mandala yang berada di daerah Irian. Isi Perintah Panglima Mandala itu adalah : agar semua pasukan mentaati perintah penghentian tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB yang disertai perwira-perwira penghubung pihak Indonesia yang terdiri atas Brigjen Achmad Wiranatakusumah, Kolonel Udara I. Dewanto, dan Letnan Kolonel Laut Nizam Zachman.

Surat Perintah Presiden tersebut dikeluarkan karena telah ditandatanganinya persetujuan antara Pemerintah RI dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasilnya Tri Komando Rakyat ini adalah berkat kerjasama bidang militer

dan diplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan sia-sia, sebagai telah dialami sebelum masa Trikora.

Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi WISNU-MURTI yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 tugas Komando Mandala telah selesai dan pada hari itu juga Komando Mandala dinyatakan secara resmi dibubarkan.

3. *DWIKORA.*

Dwi Komando Rakyat adalah penegasan daripada politik konfrontasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1961 — 1966 terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang dimaksud adalah penggabungan antara negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Gagasan untuk membentuk federasi ini pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961 di depan *The Foreign Correspondents Association of South East Asia.*

Gagasan Tengku Abdul Rachman ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak Inggris, berdasar atas kepentingan ekonomi dan strategi. Pada bulan Oktober 1961 di London diadakan perundingan mengenai rencana realisasi. Perundingan itu menghasilkan joint statement yang antara lain berbunyi :

1. Federasi Malaysia yang akan dibentuk terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak Brunei dan Sabah.
2. Sebelum rencana dilaksanakan akan diadakan penelitian untuk memastikan pendapat rakyat Sabah dan Serawak yang ketika itu masih menjadi jajahan Inggris apakah menyetujui Federasi Malaysia. Untuk melaksanakan penelitian ini dibentuk komisi yang diketuai oleh Lord Cobbald dengan anggota-anggotanya A. Abell, D.C. Watherston, Wong Pew Nee dan Gazali Shafie.

Hasil daripada penelitian menunjukkan bahwa, sepertiga dari pada rakyat Sabah dan Serawak menghendaki federasi tanpa syarat apapun. Sepertiga lainnya menghendaki federasi dengan

syarat-syarat yakni beberapa kepentingan mereka dijamin, sedang sepertiga sisanya mempunyai pendapat lain. Yang 20% menghendaki kemerdekaan dulu, baru membicarakan masalah federasi. Yang 10% menghendaki tetap di bawah naungan Inggris. Dengan hasil ini maka Persekutuan Tanah Melayu dan Inggris akan membentuk Federasi Malaysia. Setelah mempertimbangkan hasil Komisi Cobbald, Pemerintah Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu memutuskan akan membentuk Federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963. Terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia ini Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno pada waktu itu bersikap menentang. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Indonesia adalah :

1. Prinsipiil : bertentangan dengan politik Indonesia yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.
2. Proseduril : tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh PBB [resolusi 1514 (XV) dan Resolusi 1541 (XV)].
3. Keamanan : pembentukan Federasi Malaysia membahayakan Revolusi Indonesia.

Kecuali Indonesia, Filipina juga bertindak sebagai penentang. Alasan Filipina adalah bahwa secara historis dan juridis daerah Sabah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia itu adalah milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris.

Penolakan ini oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina telah disampaikan kepada Pemerintah Inggris pada akhir tahun 1962. Namun gagal menemukan perumusannya. Tindakan Filipina yang bermaksud meng-claim Sabah itu oleh Persekutuan Tanah Melayu dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat, dan menghalang-halangi terbentuknya Federasi Malaysia. Timbullah ketegangan antara ketiga negara tersebut. Dengan adanya ketegangan itu diadakan pertemuan antara ketiga negara, Indonesia, Persekutuan Tanah Melayu dan Filipina. Pada bulan Mei 1963 diadakan pertemuan antara Presiden Sukarno dan PM Tengku Abdul Rachman dari Persekutuan Tanah Melayu. Hasil pertemuan yang dicapai adalah :

1. Akan menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat dua negara yang bertetangga baik dengan penuh goodwill dan secara bersahabat.

2. Kedua Pemerintah akan membatasi diri untuk tidak saling mengadakan serangan kata.

Untuk sementara waktu ketegangan mereda. Kemudian diadakan serangkaian pertemuan antara Indonesia, Persekutuan Tanah Melayu dan Filipina pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus 1963 yang menghasilkan Manila Accord, Manila Declaration dan Joint Statement.

Sesuai dengan hasil KTT Manila, Sekretaris Jenderal PBB membentuk Misi Malaysia, yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan di Serawak dan Sabah untuk memastikan kehendak rakyat di kedua daerah itu mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Misi ini bekerja dari tanggal 22 Agustus sampai 15 September 1963. Sesuai dengan ketentuan PBB setiap negara berhak mengirimkan peninjaunya. Tetapi kedatangan peninjau di daerah itu dipersulit oleh Pemerintah Inggris. Akhirnya diperkenankan bahwa setiap negara diperbolehkan mengirimkan empat orang peninjau. Dari Indonesia yang dikirim sebagai peninjau adalah Nugroho SH, Otto Abdurrahman, Teuku Hasan dan Rudy Gontha. Hasil dari pada Misi Malaysia itu dilaporkan kepada Sekjen PBB pada tanggal 14 September 1963. Berdasarkan hasil laporan ini Sekjen PBB menyatakan bahwa sebagian dari rakyat Sabah dan Serawak menyetujui pembentukan Federasi Malaysia. Pada tanggal 16 September 1963 diproklamasikan pembentukan Federasi Malaysia.

Pihak Indonesia menentang pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dan menyatakan bahwa laporan Misi PBB itu tidak sah, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Konferensi Tingkat Tinggi di Manila. Kalau benar rakyat Sabah dan Serawak setuju dengan pembentukan Federasi itu maka Indonesia juga akan setuju.

Sehari setelah proklamasi Federasi Malaysia, pada tanggal 17 September 1963 Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaya. Pemutusan hubungan itu disusul dengan tindakan pemutusan hubungan lalulintas ekonomi dengan daerah Malaya dan Singapura. Tindakan di bidang perekonomian selanjutnya adalah tindakan dedolarisasi kepulauan Riau, membuka pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok sebagai free trade zone dan Sabang dijadikan free port.

Kesempatan ini digunakan oleh PKI untuk mendorong pemerintah melakukan politik konfrontasi total. Tujuannya agar tercipta situasi kacau, sehingga PKI bisa menanamkan ideologi serta meluaskan pengaruhnya kepada masyarakat. Sehingga didapat suatu pendapat bahwa politik konfrontasi dianggap sebagai masalah yang prinsip bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pada bulan Januari 1964 Presiden Sukarno mengadakan kunjungan kerja ke Filipina khususnya untuk membicarakan masalah Malaysia. Hasil pembicaraan Sukarno — Macapagal di Filipina adalah untuk menyusun strategi bersama. Sebaliknya pihak Malaysia menentang politik konfrontasi Indonesia.

Sebagian pemimpin partai-politik di Malaysia menentang rencana pembentukan federasi. Pada tanggal 8 Desember 1962 diproklamasikan Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU). Proklamasi dilakukan oleh A.M. Azahari, Pemimpin rakyat Brunei dan Serawak. Pemerintah Indonesia dalam hubungan peristiwa ini terang-terangan menyokong Azahari. Di depan appel sukarelawan pada tanggal 13 April 1964 di Jakarta, Presiden Sukarno menyatakan akan membantu rakyat Kalimantan Utara. Pada tanggal 3 Mei 1964 sekali lagi diadakan appel besar sukarelawan berhubung dengan semakin meruncingnya pertentangan kedua negara itu. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno mengucapkan Komando Aksi Sukarelawan yang terkenal dengan sebutan Dwi Komando Rakyat. Isi Dwi Komando Rakyat adalah :

"Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia."

Pada tanggal 20 Mei 1964, tujuhbelas hari setelah Dwikora, disahkan pembentukan Brigade Sukarelawan Tempur Dwikora yang dipimpin oleh Kolonel Sabirin Mochtar.

Di dalam rangka politik konfrontasi dengan Malaysia ini, pada tingkat pusat dibentuk Komando Operasi Tertinggi disingkat Koti, dengan tugas melakukan operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program Pemerintah. Untuk wilayah Indonesia bagian barat dibentuk komando gabungan yang bernama Komando Siaga pada tanggal 16 Mei 1964 dengan tugas menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam rangka mempertahankan wilayah RI dan

membantu perjuangan rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Komando Siaga ini kemudian disempurnakan berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 2 Juni 1964 dengan tugas-tugas : Merencanakan, mempersiapkan pada waktunya dan menyelenggarakan operasi-operasi serangbalas terhadap wilayah lawan dan unsur-unsur lawan dan menempatkan potensi nasional lainnya ke dalam Komando Siaga. Panglima Siaga adalah Laksamana Madya Udara Omar Dhani. Para Wakil Panglima adalah Laksamana Muda Laut Muljadi dan Brigjen Achmad Wiranatakusumah sebagai Wakil Panglima II dan Kolonel Udara Leo Wattimena sebagai Kepala Staf.

Dengan meningkatnya operasi militer sekali lagi Komando Siaga disempurnakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 2/KOTI/1965 tanggal 28 Pebruari 1965 menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Pangkolaga membawahi dua Komando Mandala yakni : Komando Mandala I dan Komando Mandala II.

Di samping konfrontasi di bidang militer usaha-usaha penyelesaian secara diplomasi juga dilakukan. Pada bulan Januari 1964 Presiden Sukarno mengadakan anjangkarya ke Filipina, Kamboja dan Jepang. Ketika Presiden berada di Jepang, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson mengirimkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk mengadakan pembicaraan mengenai beberapa hal yang menyangkut masalah Malaysia. Pembicaraan kedua tokoh ini berlangsung di Tokyo. Hasil daripada pembicaraan kedua tokoh tu adalah pernyataan bersama yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah Malaysia sebaiknya dengan cara musyawarah antara tiga negara yang bersengketa.Pada tanggal 23 Januari 1964 dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak yang berlaku sejak tanggal 23 Januari 1964. Tetapi perundingan yang diadakan mengalami jalan buntu. Akhirnya Pemerintah Indonesia mengumumkan Dwi Komando Rakyat sebagaimana disebut di atas.

Pendekatan baru di bidang diplomasi terus diusahakan sampai dilangsungkannya Konferensi Tingkat Tinggi Tiga Negara yang dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Dalam KTT di Tokyo ini Presiden Filipina Macapagal mengusulkan agar dibentuk komisi pendamai Asia-Afrika yang terdiri atas empat negara. Tiga negara masing-masing dipilih sendiri oleh Indonesia,

Malaysia dan Filipina sedang negara yang keempat dipilih bersama. Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut. Perdana Menteri Abdul Rachman setuju dengan syarat, permusuhan terhadap Malaysia harus dihentikan. Ketiga kepala Pemerintah telah sepakat untuk menginstruksikan kepada menteri luar negeri masing-masing untuk mempelajari usul-usul itu dan akan mengadakan pertemuan kembali pada waktu yang baik. Konferensi Tingkat Tinggi Tokyo ini akhirnya tidak menghasilkan perdamaian dalam penyelesaian masalah Malaysia.

Sementara itu di Indonesia pecah pemberontakan G.30.S./ PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Pemberontakan berhasil ditumpas dan lahirlah Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru politik konfrontasi ditinjau kembali dan selanjutnya diadakan kontak-kontak diplomatik dengan Malaysia.

C. DOMINASI PKI.

1. Memberi angin kepada PKI.

Penyelewengan politik lainnya adalah bahwa Presiden Sukarno telah banyak memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengembangkan dirinya, meskipun komunisme bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini Presiden Sukarno tidak bersedia untuk diyakinkan akan bahaya komunisme bahkan sebaliknya, beliaulah yang selalu memaksakan kerjasama dengan komunis. Timbulnya Demokrasi Terpimpin telah memberi sandaran yang kuat bagi PKI dalam usahanya untuk merebut kedudukannya yang paling kuat dalam bidang politik di Indonesia. Oleh karena melihat banyak keuntungan dengan adanya Manipol (Manifesto Politik) dan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme a la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia), PKI berusaha sekuat-kuatnya untuk membelanya dan menjadikan suatu ajaran resmi negara. Kesempatan pertama digunakan dengan mendesak Presiden untuk membubarkan partai-partai lawannya terberat yaitu Masyumi dan PSI, yang menolak Demokrasi Terpimpin dan terlibat "PRRI/Permesta." Dibentuknya DPR-GR, MPRS, Front Nasional dan Lembaga-lembaga Negara lainnya menguntungkan PKI di mana ormasnya seperti : Pemuda Rakyat, Gerwani (Gerakan Wanita Indone-

sia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), mendudukkan wakil-wakilnya di sana. Begitu juga dengan masalah retooling aparatur Negara di segala bidang yang diperintahkan Presiden, dengan gigih diperjuangkan oleh PKI untuk kepentingannya sendiri; yang diretool adalah orang-orang yang tidak mereka sukai.

Dalam perselisihan antara Moskwa dan Peking mengenai pelaksanaan perjuangan komunis, PKI telah cenderung ke Peking. Sebab hanya dengan kekerasanlah PKI akan berhasil menghadapi rakyat yang beragama. Karena itulah waktu Pemerintah mengeluarkan PP No. 10 tahun 1959, yang melarang Cina Asing berdagang dan tinggal di luar ibukota Kabupaten, PKI membela Cina Asing itu, yang waktu pemilihan umum menyokong PKI. Semenjak itu pengaruh Peking makin kuat terhadap PKI.

Landasan politik dari semua gerakan PKI adalah terutama dengan adanya pernyataan, bahwa Republik Indonesia sedang menyelesaikan Revolusinya, atau lebih populer : revolusi belum selesai. Dengan dalih ini PKI mengajak Rakyat untuk menyelesaikan Revolusi menurut garis yang telah ditentukannya.

Untuk mengaburkan tuduhan, bahwa PKI itu lebih bersifat internasional dan anti agama, PKI menyatakan diri patuh pada filsafat negara Pancasila. Dan menerangkan bahwa Marxisme yang dijalankan di Indonesia adalah Marxisme yang ditrapkan dalam iklim Indonesia. Bahwa persatuan dan kesatuan Nasakom sebagai satu-satunya prinsip perjuangan untuk mewujudkan ketiga kerangka tujuan Revolusi Indonesia, digunakan oleh PKI dengan sebaik-baiknya. Apa lagi dengan adanya anjuran Presiden supaya kita jangan komunistofobi. Pada awal tahun 1964, adanya maksud PKI untuk merebut kekuasaan di Indonesia, terbongkar dengan ditemukannya dokumen-dokumen berupa rencana 4 tahun PKI. PKI menyatakan bahwa dokumen itu palsu.

Sesuai dengan rencana 4 tahunnya, PKI dan ormasnya melakukan intimidasi dan teror politik dengan menyatakan siapa saja yang menentang Nasakom berarti kontra Revolusi. Ini berarti pula menentang Pemimpin Besar Revolusi; untuk itu perlu diganyang habis-habisan. Akibatnya banyak pemimpin-pemimpin yang anti-komunis ketakutan, sehingga banyak pula

yang mencari jalan selamat untuk diri sendiri.

Dalam saat-saat berkembangnya PKI itu, timbul "Manifes Kebudayaan" (yang oleh PKI dicemoohkan sebagai "Manikebu") dan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS), yang merupakan lawan dari PKI. Manifes Kebudayaan dikeluarkan oleh kelompok orang yang menolak "realisme sosialis", menolak "politik sebagai panglima," menolak kultus-individu dan menolak pendewaan "revolusi;" tidak berarti bahwa Manifes Kebudayaan merupakan pernyataan dari mereka yang ingin melakukan perlawanan terhadap penguasa. Bahkan Manifes Kebudayaan juga bukan satu manifes anti-Sukarno. Beberapa pikiran serta kalimat dari faham resmi masa itu diterima dan dipergunakannya. Kedua kelompok dengan caranya sendiri bermaksud memecahkan belenggu absolutisme PKI yang mengekang kegiatan kreatif mereka.

Dalam persoalan Manikebu, yang ditakutkan sesungguhnya adalah Konperensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang diduga akan membentuk organisasi yang akan merupakan senjata di tangan kaum budayawan Pancasilais untuk menghadapi ofensif PKI. Tetapi karena KKPI telah mempersiapkan diri dengan seksama, maka tidak ada yang dapat digugat oleh PKI yang kemudian "Manikebu" diganyang. Baik "Manikebu" maupun BPS kemudian dilarang. Guna keperluan dan kampanye menguasai massa, PKI berusaha menguasai alat mass media, terutama RRI dan kantor berita Antara. Sebab menguasai kedua alat vital ini, berarti menguasai politik pemberitaan. Kesempatan untuk itu terbuka dengan didirikannya BPS, yang dalam waktu singkat memperoleh dukungan sebahagian terbesar pers Indonesia. Dengan mengexploatasi informan koresponden *New York Times* tentang peranan CIA di Indonesia dan dengan jalan memalsukan dokumen, seolah-olah BPS dibiayai oleh CIA, berhasillah PKI mendesak Presiden untuk membubarkan BPS dalam bulan Desember 1964. Suratkabar pendukung BPS dilarang dalam bulan Februari 1965, dan Partai Murba dalam bulan September 1965.

Sejak itu dengan mudah PKI melancarkan kampanyenya untuk menguasai pendapat rakyat dengan memutar-balikkan fakta-fakta. Bertubi-tubi fitnah anti Nasakom dan sebagainya dilancarkan. Yang mencoba-coba menghalanginya dituntut untuk diretool atau ditangkap setelah diganyang habis-habisan dengan

suatu kampanye pers dan kampanye demonstrasi. Keadaan ekonomi yang buruk pada waktu itu, digunakan oleh PKI untuk propagandanya membangun masyarakat adil dan makmur. Dokumen PKI yang akan mengadakan kudeta dalam waktu yang singkat di mana segala sesuatunya untuk persediaan kudeta tersebut sedang dirampungkan, disiarkan oleh Partai Murba pada bulan April 1965. PKI berhasil mendiamkan persoalan ini, dengan menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Sebaliknya untuk cuci tangan PKI menyerang Murba habis-habisan. Tetapi ABRI yang mengetahui persoalan yang sebenarnya, makin waspada.

Sesuai dengan ajaran Lenin, bahwa tidak ada gunanya meretul alat-alat, apabila tidak mampu menguasai mekanisme negara yang terpenting, yaitu Angkatan Bersenjata, maka setelah berhasil memecah-belah partai-partai lawan (seperti PNI) dan penyusupan pada partai-partai lainnya yang membubarkan beberapa organisasi lawan, PKI menyempurnakan usaha untuk menguasai ABRI. Antara lain dilakukanlah usaha-usaha untuk memecah belah kekuatan ABRI dengan tuntutan pe-Nasakom-an ABRI. Gagal, karena pimpinan ABRI menyatakan bahwa sesungguhnya setiap anggota ABRI sekarang ini adalah sudah Nasakom-is dalam jiwanya.

Menurut Presiden Sukarno, Pancasila selain menjadi Dasar Falsafah Negara, juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu dan sekaligus sebagai landasan perjuangan Bangsa, sedangkan PKI hanya menerima Pancasila sebagai kenyataan obyektif yang harus diterimanya dalam satu bagian tahap perjuangan dan hanya dipakai sebagai landasan dan alat memperkuat diri, selama PKI belum merasa kuat untuk memaksakan ideologi dan konsepsi politiknya.

Dalam pengamalan Dasar Falsafah Negara Pancasila untuk mencapai cita-cita Revolusi Indonesia yalah masyarakat adil-makmur, Presiden Sukarno menggunakan konsepsi Nasakom secara mental-ideologis, yang diharapkannya dapat mempersatukan Rakyat Indonesia, yang terdiri dari berbagai aliran dan faham politik, termasuk PKI. Tetapi bagi PKI, konsepsi Nasakom diterima sebagai pengertian strukturil/kompartimensi, pengertian fisik yang akan dimanfaatkan sebagai legalitas dalam usaha memegang fungsi kepeloporan menuju tujuan Revolusi

menurut konsepsinya.

Implementasi dari pada faham politik Bung Karno itu, bertolak dari keyakinan politik pribadinya bahwa antara tiga faham, antara tiga golongan yaitu Nasionalis, Agama dan Marxis harus dan memang dapat bersatu; maka kita melihat, bahwa gagasan-gagasannya itu lebih dipertegas lagi sesudah "Dekrit Presiden tahun 1959" dengan semboyan yang dikumandangkan : "Persatuan dan Kesatuan seluruh kekuatan Progresif-revolusioner berporos Nasakom," pembentukan Kabinet, di mana tokoh PKI didudukkan di dalamnya dan sebagainya. Presiden Sukarno mengemukakan, bahwa salahsatu aspek daripada Pancasila alat pemersatu, adalah Nasakom ini. Bahkan dalilnya ini ditarik lebih jauh lagi, dengan menyatakan "barang siapa menerima Pancasila harus menerima Nasakom" dan "barang siapa menolak Nasakom berarti menolak Pancasila."

Pendirian Presiden Sukarno ini didukung dan diekploitasi dengan hebat oleh PKI; sehingga kita pernah mengalami suatu masa di mana "cap komunistofobi" benar-benar merupakan ancaman yang paling berbahaya bagi nasib seseorang. Sebab "anti komunis," "tidak setuju komunis," "anti Nasakom" dapat mengakibatkan seseorang dituduh "kontra-revolusi," benar-benar merupakan satu tuduhan yang mematikan.

Di sini pulalah kesalahan politik pokok Presiden Sukarno, yaitu kegagalannya mem-Pancasilakan PKI yang secara prinsipiil memang tidak mungkin dilakukannya. Beliau mengorbankan Pancasilais sejati untuk merangkul PKI dengan pengamanan daripada Pancasila itu sendiri diabaikan. Hasilnya adalah Lubang Buaya.

2. *Kampanye (PKI dan Pendukungnya) mempersiapkan G.30.S./PKI.*

Setidak-tidaknya sejak bulan Agustus 1965, PKI secara sistematis mengadakan "build-up" mental, terutama di kalangan ormas-ormas serta simpatisan-simpatisannya. Dalam hal ini mereka menggunakan media komunikasi-massa yang boleh dikatakan telah dapat menduduki posisi-posisi menentukan di dalam Kantor-Berita Antara, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), sebagaimana yang telah dikemukakan

di atas.

Instruksi pimpinan PKI dalam rangka "build-up" itu adalah : "Mengembangkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya, dengan memperhebat persatuan dan aksi-aksi massa mengganyang kabir, pencoleng dan koruptor, melawan tuan tanah jahat serta imperialisme AS," seperti yang misalnya termaktub di dalam instruksi bersama berkenaan dengan ulangtahun BTI-SOBSI-PR. (*Harian Rakyat*, Senin, 27 September 1965). Juga dalam sambutan tertulis CC PKI kepada Sidang Pleno ke-III Pengurus Besar Gerakan Pemuda Indonesia di Surabaya, terdapat pernyataan, bahwa "Kewajiban setiap revolusioner di dalam negeri kita dewasa ini memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang untuk mengembangkan situasi revolusioner sampai ke puncaknya, yaitu sampai kepada dibersihkannya samasekali kaum kabir, pencoleng dan koruptor dari semua pimpinan aparatur politik, ekonomi dan keuangan."

Sebagai contoh daripada "build-up" mental itu dapat dikemukakan cukilan-cukilan daripada pidato pemimpin-pemimpin PKI beserta ormas-ormas serta simpatisan-simpatisan serta tulisan-tulisan di dalam pers yang mereka kuasai atau pengaruhi. Tajuk *Harian Rakyat*, 4 September 1965 berbunyi sebagai berikut : " ..... Mereka menyebarkan kampanye-kampanye seakan-akan PKI mau coup. Sesungguhnya mereka sendirilah yang menyiapkan coup itu." D.N. Aidit di depan sukarelawati Departemen Penerangan pada tanggal 9 September 1965 antara lain mengatakan : " ..... Kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi pasti lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar." Dan di depan sidang Dewan Nasional SOBSI tanggal 14 September 1965 D.N. Aidit mengatakan : " ..... Yang paling penting sekarang ini, bagaimana kita memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita, yaitu setan kota" ..... "Kalau revolusi mau tumbuh dengan subur, kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi/kabir dan setan kota dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara." Dan di hadapan Sidang II Dewan Nasional SOBSI dikatakannya : "Daerah-daerah siap melancarkan aksi terhadap setan-setan kota." Pada tanggal 22 September 1965

di hadapan karyawan BNI dikatakan oleh Aidit : " ..... Kabinet sekarang belum Nasakom, hanya mambu Nasakom."

Dan pada tanggal 26 September 1965 dikatakannya kepada SARBUPRI : ..... "Jangan hanya berjuang untuk catu ikan asin, tetapi berjuang juga "naar de politieke macht," jangan mau jadi landasan, jadilah palu godam" ..... "Perjuangan untuk Kabinet Nasakom dengan menteri-menteri yang kenal dan dicintai dan didukung rakyat" ..... "Mereka hidup dari distribusi kewibawaan dari Bung Karno" ..... "Kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apapun kecuali belenggu mereka.

Moh. Munir, Ketua Umum SOBSI pada tanggal 26 September 1965 berkata pada SARBUPRI : "Jadikanlah kebun-kebun untuk markas pertahanan." Dan pada tanggal 27 September 1965 D.N. Aidit berkata kepada anggota-anggota IPPI : "Hati kita lebih daripada lapar, kita tidak akan menyerahkan nasib kita kepada setan kota. Kita akan ganyang dan kalahkan "Setan kota." Dan A. Karim D.P. pada tanggal 29 September 1965 berkata : " ..... Juga di tanah air kita, jika ada kekuatan yang coba-coba ingin mengalahkan kekuatan rakyat dengan coup atau cara apapun juga pasti akan mengalami kegagalan." Dan tajuk *Harian Rakyat* tanggal 30 September 1965 dengan penuh ancaman berbunyi antara lain : " ..... Dengan menggaruk kekayaan Negara, setan-setan kota ini mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap Pemerintah dan Revolusi." ..... Mereka harus dijatuhi hukuman mati di muka umum. Soalnya tinggal pelaksanaan. Tuntutan adil Rakyat pasti berhasil." Pada tanggal 29 September 1965 di hadapan para peserta Kongres III CGMI, D.N. Aidit antara lain berseru : Mahasiswa komunis harus berani berfikir dan berani berbuat. Berbuat — berbuat — berbuat. Bertindak dan berbuat dengan berani — berani. Sekali lagi berani." Anwar Sanusi, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Front Nasional dan seorang pemimpin PKI, dalam pidatonya di hadapan para sukarelawan BNI pada tanggal 29 September 1965 antara lain berkata : "Kita sedang berada dalam situasi di mana Ibu Pertiwi berada dalam hamil tua." Sang bidan siap dengan alat yang diperlukan untuk menyelamatkan sang bayi yang sudah lama dinanti-nantikan. Sang bayi adalah kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam Manipol. Sang bidan adalah massa Rakyat Manipolis.

Sukwan adalah salahsatu alat penting di tangan sang bidan. Ada segelintir setan yang mengancam keselamatan Ibu Pertiwi dan sang bayi yang akan dilahirkan."

Dalam rangka "build-up" itu dapatlah di sini dikemukakan berbagai contoh kegiatan agresif dan negatif yang dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya yaitu : Spontanitas Rakyat dalam pembentukan pasukan sukarelawan dalam rangka Dwikora, dimanfaatkan oleh PKI dengan tuntutan-tuntutan dipersenjatainya buruh dan tani. Di lain pihak, Presiden Sukarno kemudian melemparkan gagasan tentang pembentukan Angkatan ke-V, yaitu Angkatan yang terdiri dari sukarelawan ini.

Presiden sendiri mengakui bahwa gagasan pembentukan Angkatan ke-V ini diperolehnya dari pendapat yang dikemukakan oleh tokoh RRC kepadanya. Dengan dalih pembentukan dan latihan sukarelawan inilah, seperti yang kemudian terbukti dalam sidang MAHMILUB, PKI telah berlindung dan menggunakan kesempatan untuk memberi latihan kemiliteran kepada anggota-anggotanya yang kemudian ternyata digunakan dalam rangka pembentukan fisik untuk pemberontakan G.30.S.

Dengan dalih untuk mengintensifkan pelaksanaan landreform dan bagi hasil, maka PKI meningkatkan kegiatan-kegiatan yang terkenal dengan "aksi-aksi sefihak." Rangkaian aksi sefihak ini sangat terasa di beberapa daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan memuncak pada peristiwa "Bandar Betsy" yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI-AD, Peltu Sudjono, pada tanggal 14 Mei 1965.

Pada tahun sebelumnya, terjadi serangkaian pemogokan besar-besaran yang dilancarkan oleh SOBSI, terutama di Jawa Timur dan Sumatra Utara dalam waktu yang bersamaan. Sengketa masalah tanah yang sampai mengakibatkan jatuhnya korban terjadi di Jengkol, Kediri dan ternyata didalangi oleh BTI dan Pemuda Rakyat.

PKI juga menyebarkan fitnah yang kemudian dikemukakan selaku dalih bagi percobaan kudeta "Gerakan 30 September." Yakni fitnah bahwa dalam lingkungan Angkatan Darat terdapat sebuah "Dewan Jenderal." Apa yang dinamakan "Dewan Jenderal" itu digambarkan sebagai gerakan subversi yang disponsori oleh CIA (Central Intelligence Agency, Amerika Serikat).

Hingga saat ini, tidak pernah dapat diajukan bukti-bukti bahwa "Dewan Jenderal" itu memang pernah ada, baik berupa keterangan saksi maupun berupa dokumen-dokumen. Tidak pula pernah diajukan bukti-bukti yang membenarkan bahwa setidak-tidaknya ada sekelompok jenderal yang bermaksud jahat ter-hadap Republik Indonesia dan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Kampanye mengenai "mengembangkan situasi revolusioner" dan mengenai "Dewan Jenderal" itu ternyata juga dilancarkan di daerah-daerah pada waktu yang bersamaan. Terbukti dari laporan 5 partai politik (PNI, NU, Partai Katolik, Parkindo dan IP-KI) di Bali ke hadapan Presiden Sukarno mengenai persiapan dan kegiatan petualangan G.30.S./PKI. Tertulis antara lain di dalam laporan itu : " ..... mulai dilancarkan kampanye tentang "Dewan Jenderal" dan keharusan lahirnya bayi dari Revolusi yang sudah hamil tua, dan secara terang-terangan sudah memacan-kertaskan Pemerintah dan menteri-menteri yang dianggap sebagai distribusi kekuasaan dan wewenang Bung Karno."

Sungguhnya "build-up" mental itu sudah dimulai agak lama sebelum bulan September 1965. Laporan Politik D.N. Aidit ke-pada Sidang Pleno ke-IV CC PKI yang diperluas tanggal 11 Mei 1965, merupakan bukti yang nyata. Judul laporan itu adalah : "Perhebat ofensif revolusioner di segala bidang."

3. . Pengkhianatan G.30.S./PKI.

Pada hari Kamis malam tanggal 30 September jam 22.00 Lettu Dul Arief, seorang kader PKI, memerintahkan anggota-anggota Cakrabirawa di Asrama Tanah Abang II untuk berpakaian PDLT dan menyiapkan senjata. Anggota-anggota Cakrabirawa ini dibawa olehnya ke Lubang Buaya. Di sana sudah berkumpul anggota-anggota dari Yon 454/Diponegoro, Yon 530/Brawijaya, PGT/AURI, Brigif-I Kodam V Jaya dan Sukwan/Sukwati PR dan Gerwani. Jam 02.30 pagi tanggal 1 Oktober seluruh pasukan yang diberinya nama Pasopati itu diperintahkan berkumpul. Lettu Dul Arief yang bertindak sebagai pimpinan memberikan briefing kepada komandan-komandan peleton.

Pasukan dibagi sebagai berikut :

1. Pasukan yang akan menculik Jenderal Nasution dipimpin oleh Pelda Djahurub dari Men Cakrabirawa.
2. Pasukan yang bertugas menculik Letjen A. Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan dari Brigade Infantri-I/Jaya.
3. Pasukan yang bertugas menculik May. Jen. Suprapto sebanyak satu peleton dari Ton-I Kawal Kehormatan Men Cakrabirawa.
4. Pasukan yang menculik May.Jen. S. Parman dipimpin oleh Serma Satar dari Men Cakrabirawa.
5. Pasukan yang akan menculik Brig. Jen. Sutojo dengan kekuatan 1 peleton Men Cakrabirawa, dipimpin oleh Serma Surono.
6. Pasukan yang bertugas menculik May.Jen. Harjono M.T. dengan kekuatan 1 peleton Men Cakrabirawa dipimpin oleh Serka Bungkus.
7. Pasukan yang bertugas menculik Brig.Jen. D.I. Pandjaitan dipimpin oleh Serma Sukardjo dari Jon 454/Diponegoro.

Kopda Dikin dari Men Cakrabirawa bertindak sebagai penunjuk jalan. Dalam briefing yang diberikan oleh Lettu Dul Arief dikatakan bahwa Jenderal yang akan diculik itu akan mengadakan coup. Mereka harus dibawa hidup atau mati. Taktik menculik yalah dengan mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menghadap.

Pasukan yang akan menculik Jenderal Nasution berangkat dari basis di Lubang Buaya ± jam 03.00 pagi tanggal 1 Oktober dengan mempergunakan 3 buah truck dari AURI dan 2 buah Web dari Cakrabirawa. Seluruh pasukan berkekuatan 100 orang.

Pasukan yang akan menculik Jenderal Achmad Yani berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 03.30 pagi dengan kendaraan dua buah truck dan dua buah bus. Kekuatan pasukan kira-kira ½ kompi.

Karena Serda Sulaiman yang mengepalai pasukan yang akan menculik Jenderal Suprapto belum mengetahui sasarannya, tengah malam tanggal 30 September diantar oleh Lettu Dularief ke Jalan Besuki dengan memakai kendaraan Jeep Toyota No. 205. Kepadanya ditunjukkan rumah Jenderal Suprapto. Pasukan ini

berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 03.00 pagi dengan mempergunakan 1 truck Toyota.

Pasukan yang akan menculik Jenderal S. Parman berangkat dari Lubang Buaya kira-kira jam 03.15 pagi menuju Jalan Serang. Kendaraan yang dipakai yalah 1 bus preman No. B 1840 R. Sampai di tempat sasaran kira-kira jam 04.00.

Pasukan yang akan menculik Jenderal Sutojo berangkat jam 03.15 pagi dengan kendaraan 1 truck Toyota No. 645 yang dikemudikan oleh Gana.

Pasukan yang akan menculik Jenderal Harjono berangkat dari Lubang Buaya jam 03.00 pagi dengan 1 truck Cakrabirawa dikemudikan oleh Kopda Sukit.

Pasukan yang akan menculik Jenderal Pandjaitan berangkat dari Lubang Buaya jam 03.00 pagi. Kendaraan yang dipakai yalah 1 truck umum "Tirtajasa," 1 bus Ikarus dan 1 bus PPD.

Di rumah Mayor Jenderal Harjono M.T., para penculik mengadakan pembagian tugas mulai masuk pekarangan sebelah kiri rumah. Mereka sampai pintu pavilyun. Serda Bungkus mengetuk pintu. Ibu Harjono terbangun, membuka pintu kamar dan terus ke ruang tengah. Sesudah itu beliau membuka pintu samping. Beliau melihat beberapa orang berpakaian seragam Cakrabirawa. Di pekarangan terlihat beberapa orang sedang steling. Serka Bungkus menanyakan Jenderal Harjono. Ibu menjawab bahwa Jenderal sedang tidur dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Serka Bungkus mengatakan bahwa Jenderal Harjono diperintahkan Presiden untuk menghadap segera.

Ibu Harjono kembali ke kamarnya dan membiarkan pintu samping terbuka. Beliau menceritakan kepada Jenderal Harjono apa yang dibicarakan dan dilihatnya di luar. Jenderal Harjono curiga dan tidak mau ke luar. Kepada Ibu beliau katakan supaya menyuruh mereka pergi dan kembali besok pagi jam 08.00. Ibu Harjono ke luar lagi dan menyampaikan pesan suaminya. Penculik-penculik ini tetap berkeras untuk membawa Jenderal Harjono. Ibu masuk kembali dan merekapun ikut masuk ke ruangan tengah. Setelah sampai di kamar Ibu Harjono mengunci pintu. Beliau menceritakan kepada Pak Harjono bahwa orang-orang yang di luar itu tak mau pergi dan tetap mendesak agar Jenderal Harjono ikut dengan mereka sekarang juga. Jenderal

Harjono bertambah curiga dan kepada Ibu Harjono beliau katakan bahwa rupanya beliau mau dibunuh. Selanjutnya Jenderal Harjono menyuruh isteri dan anak-anaknya ke kamar sebelah.

Pada saat itu Serka Bungkus berteriak dan menyuruh Jenderal Harjono ke luar. Sesudah itu ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak pintu. Pintu ditembak oleh Sersan Arlian dengan sten, oleh Pratu Subakir dengan sten rentetan dan oleh Serka Bungkus dengan pistol.

Mendengar tembakan-tembakan ini Ibu Harjono dan anak-anaknya berteriak dari kamar sebelah meminta pertolongan. Teriakan tersebut dijawab oleh penculik-penculik dengan ancaman dan tembakan-tembakan ke arah kamar. Yang di dalam kamar bertiarap untuk menghindari peluru.

Sesudah pintu kamar Jenderal Harjono terbuka karena tembakan-tembakan tadi, Pratu Wagirem, Pratu Kamis dan Pratu Subakir menyerbu masuk kamar. Karena lampu mati, sehingga suasana gelap, seorang di antara mereka membakar koran untuk sekedar memperoleh cahaya.

Dalam suasana yang tidak begitu terang itu, Jenderal Harjono berusaha merebut senjata dari tangan salah seorang penculik tersebut. Usaha ini tidak berhasil. Jenderal Harjono berusaha untuk ke luar ke belakang melalui sebuah pintu di luar kamarnya yang terletak di samping lemari. Ketika beliau sedang berusaha mencapai gagang pintu, beliau ditembak oleh Pratu Subakir dengan senjata sten. Tembakan ini disusul oleh tembakan Pratu Wagirem dengan senjata Cung. Peluru-peluru maut itu mengenai dada Jenderal Harjono. Beliau terhuyung. Dalam keadaan bermandikan darah dan hanya berpakaian celana pendek dan baju singlet, Jenderal Harjono terjatuh. Beliau diseret terus ke pekarangan dan ke jalan, kemudian dilemparkan ke atas sebuah truk. Darah berserakan dari kamar sampai pekarangan. Seorang putera pak Harjono yang mengikuti dari belakang karena cemas melihat nasib ayahnya, memperoleh pukulan popor senjata hingga jatuh tersungkur. Sesudah itu rombongan penculik kembali ke Lubang Buaya. Sepeninggal mereka, Ibu Harjono buru-buru pergi ke rumah Jenderal Parman dan Jenderal Suprapto.

Di rumah Mayor Jenderal S. Parman, para penculik menemukan pintu pagar terkunci, karenanya mereka masuk pekarangan

dengan jalan meloncat. Mereka sampai di pekarangan sebelah kanan rumah di samping kamar Mayor Jenderal Parman. Loncatan tersebut dan suara-suara sepatu, menyebabkan Jenderal Parman terbangun. Beliau membangunkan Ibu Parman. Keduanya menduga bahwa ada perampokan di rumah tetangganya. Pak Parman keluar dari kamar dengan tujuan melihat situasi dan kalau perlu memberikan bantuan. Ketika sampai di ruangan tengah terdengar ketokan pintu. Jenderal Parman menanyakan siapa yang mengetuk. Dari luar terdengar jawaban : "Cakra."

Pak Parman membuka pintu dan agak sedikit heran melihat anggota Cakrabirawa sudah banyak di halaman rumahnya. Serma Satar maju ke depan dan melaporkan bahwa Jenderal Parman diperintahkan Presiden untuk menghadap dengan segera. Ia selanjutnya mengatakan bahwa situasi negara sangat genting. Perkataan genting ini ditanyakan Jenderal Parman sampai dua kali dan selalu mendapat jawaban yang meyakinkan.

Jenderal Parman yang sudah biasa menerima panggilan mendadak sehubungan dengan tugasnya sebagai Perwira Intelijen dan selalu bersikap loyal kepada Presiden dan Negara, tidak menaruh curiga apa-apa. Jenderal Parman kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Dua orang Cakrabirawa mengikutinya ke ruangan tengah dengan bayonet terhunus. Ketika Jenderal Parman masuk kamar, mereka ikut pula masuk. Di ruangan tengahpun sudah ada pula beberapa orang dengan senjata terhunus. Ibu Parman merasa tak senang ketika dua orang tadi masuk kamar. Beliau minta agar mereka menunggu saja di ruangan tengah, tetapi larangan itu tidak diindahkan. Ibu Parman mulai curiga melihat tingkah laku orang-orang itu. Beliau menanyakan surat perintah. Seorang di antaranya menjawab, surat perintah itu ada pada Pelda Janto di luar. Kecurigaan Ibu Parman menjadi bertambah ketika mendapat jawaban bahwa Nomor NRP. Pelda Janto hanya 4 angka. Ibu Parman cukup tahu bahwa NRP. biasanya 5 atau 6 angka. Usaha selanjutnya untuk melihat surat perintah itu tidak pula berhasil. Malahan Ibu Parmanpun ditodong dengan bayonet. Gerak-geriknya diawasi dan kemanapun beliau pergi selalu diikuti. Pada waktu Jenderal Parman mencuci muka dan mengambil rokok beliaupun terus diikuti. Pada waktu itu beliau mulai curiga. Selesai berpakaian lengkap, Jenderal Parman dibawa

ke luar. Di pintu depan Pak Parman menoleh ke belakang dan menyuruh Ibu Parman menelpon Jenderal Yani untuk melaporkan kejadian tersebut. Ibu Parman segera menuju ke tempat pesawat telpon. Tetapi beliau didahului oleh Kopda Charuman, yang mencabut kabel telepon itu hingga putus.

Pak Parman dimasukkan ke kendaraan dan rombongan berangkat ke Lubang Buaya. Tak lama kemudian datang Ibu Harjono MT yang menceritakan bahwa suaminya telah ditembak dan dibawa pergi.

Di rumah Jenderal Suprapto, kejadiannya tidak berbeda dengan yang dialami keluarga Pak Parman. Karena siangnya baru habis mencabut gigi, malamnya tanggal 30 September Jenderal Suprapto agak meriang. Namun begitu beliau masih membuat sebuah lukisan yang akan disumbangkan kepada Museum Perjuangan di Yogyakarta.

Pratu Buang yang termasuk regu yang harus memasuki rumah membuka pintu pagar. Waktu itu kira-kira jam 04.30. Anjing yang tidur di sebelah kiri rumah terbangun dan menggonggong. Jenderal Suprapto terbangun pula dan menanyakan siapa di luar. Anggota-anggota rombongan penculik itu menjawab bahwa mereka anggota Cakrabirawa. Mendengar jawaban dari luar, Jenderal Suprapto dan Ibu tidak menaruh curiga apa-apa. Jenderal Suprapto ke luar dari kamarnya ke ruangan tengah. Beliau terus menuju pintu depan dan membukanya. Di teras sudah ada beberapa orang anggota rombongan penculik itu. Serda Sulaiman maju ke depan dan mengatakan bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan Presiden untuk menghadap dengan segera. Sebagai seorang yang patuh kepada Panglima Tertinggi, Jenderal Suprapto bersedia pergi. Beliau minta menukar pakaian lebih dahulu. Tetapi para penculik tidak mengizinkannya. Beliau ditodong dengan senjata dan dipaksa ke luar ke pekarangan. Beberapa orang memegang tangannya. Sampai di jalan beliau dinaikkan ke atas truk.

Ibu Suprapto ke luar dari kamar. Ketika beliau sampai di ruangan tengah, Pak Prapto sudah tidak ada lagi. Karena pintu depan terbuka beliau mau menutupnya. Tetapi para penculik tidak mengizinkan. Seorang di antara mereka memaksa Ibu Suprapto masuk kamar dengan diancam todongan senjata. Dari kamarnya Ibu Suprapto masuk ke kamar yang satu lagi dan dari

sini beliau ke ruangan tengah. Beliau ingin menelepon. Sementara itu beberapa orang penculik sudah ada di ruangan tengah. Semuanya dengan senjata yang siap untuk ditembakkan dan dengan air muka yang bengis. Ibu Suprapto menuju pesawat telepon. Seorang dari penculik itu melarangnya dan memaksa beliau untuk kembali ke kamarnya. Ibu Suprapto masih sempat melihat pesawat telepon dicabut kabelnya.

Sesudah masuk kamar dan mengunci pintu, Ibu Suprapto melihat ke luar liwat jendela. Di pekarangan nampak beberapa orang memakai Baret Merah Cakrabirawa. Namun ia tidak lagi melihat Pak Prapto. Waktu itu ia menjadi lebih sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik dengan Pak Prapto.

Segera setelah para penculik pergi, Ibu Suprapto ke luar dari kamarnya dan menutup pintu depan. Kemudian beliau dengan bergegas-gegas menulis surat kepada Jenderal Parman. Ia menceritakan apa yang terjadi dan menanyakan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi surat tersebut tak jadi diantarkan, sebab Ibu Harjono telah datang. Ibu Haryono menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya dan yang terjadi di rumah Pak Parman.

Sementara itu team penculik telah pula mendatangi Brigadir Jenderal Sutojo Siswomihardjo. Kira-kira jam 04.00 pagi tanggal 1 Oktober terdengar ada orang mengetuk pintu beliau. Jenderal Sutojo terbangun dan ke luar dari kamar. Beliau langsung menuju pintu depan dan membukanya. Sebelumnya, beliau menanyakan siapa yang mengetuk dan mendapat jawaban dari seorang yang mengaku bernama "Gondo datang dari Malang."

Sementara itu anggota-anggota penculik yang lain dengan melalui garasi sebelah kanan rumah telah masuk ke belakang. Dengan menodongkan bayonet, mereka memaksa pembantu Jenderal Sutojo untuk menyerahkan kunci pintu yang menuju ke ruang tengah. Sesudah pintu dibuka oleh Jenderal Sutojo, Pratu Sujadi dan Praka Sumadi masuk ke dalam rumah. Mereka mengatakan bahwa Jenderal Sutojo dipanggil Presiden. Kedua orang ini membawa Jenderal Sutojo ke luar. Sampai di pintu diserahkan pada Serda Sudibjo. Dengan diapit oleh Serda Sudibjo dan Pratu Sumadi, Pak Sutojo dibawa ke luar pekarangan. Sampai di jalan beliau diserahkan kepada Komandan Peleton.

Setelah berhasil membuka pintu yang menuju ke ruang

tengah, penculik-penculik tersebut lantas masuk. Di ruangan ini mereka merusak semua barang yang mereka temui. Pecahan-pecahan gelas, piring dan sebagainya bertebaran di lantai. Telepon yang ada di ruangan itupun mereka rusak. Karena ribut itu, Ibu Sutojo terbangun. Beliau semalaman itu memang dalam keadaan tidak enak badan. Ibu Sutojo menduga bahwa yang datang itu gerombolan perampok. Beliau terus ke luar dan masih sempat melihat Pak Sutojo dibawa oleh penculik-penculik itu.

Di ruangan tengah masih ada beberapa orang dengan bayonet-bayonet terhunus. Beliau tak dapat melihat dengan jelas tanda yang dipakai mereka, karena ketika itu beliau sedang sakit kepala. Apa yang beliau ingat yalah seorang di antaranya memakai ikat leher berwarna kuning.

Melihat perabot-perabot rumahnya berantakan dan mengetahui bahwa suaminya sudah dibawa orang yang tidak dikenal, Ibu Sutojo ke luar dari rumahnya pergi ke rumah tetangga. Di rumah ini Ibu Sutojo menelepon Brigjen Suthardio, Menteri/Jaksa Agung. Beliau baru sempat menceritakan kejadian di rumahnya, ketika tiba-tiba telpon diputuskan. Pada waktu itulah Ibu Sutojo mulai merasakan sesuatu ketakutan yang mendalam. Perasaan demikian belum timbul pada waktu beliau berangkat dari rumah.

Kemudian Ibu Sutojo membawa anak-anak beliau ke rumah Jenderal Suthardio. Atas nasehat Pak Tardio beliau pulang. Sesudah itu beliau pergi ke rumah Jenderal Parman. Di sana beliau mendengar bahwa Pak Parmanpun telah diculik.

Di rumah Jenderal Pandjaitan gerombolan penculik memasuki pekarangan rumah dengan meloncat pintu pagar. Kemudian terus bergerak menuju pintu pavilyun. Karena pintu terkunci, mereka melepaskan tembakan sampai pintu terbuka. Bersamaan dengan itu, dari pekarangan tembakan-tembakan ditujukan pula ke tingkat atas (rumah tersebut bertingkat dua). Tembakan ini mengenai kamar Jenderal Pandjaitan. Kaca-kaca jendela pecah, kain jendela robek-robek. Sebutir peluru mengenai lampu, sehingga kamar menjadi gelap. Serentetan tembakan berikutnya mengenai lemari pakaian. Setelah pintu pavilyun terbuka, mereka terus masuk ke dalam. Di sebuah kamar di tingkat bawah tidur tiga orang kemenakan Jenderal Pandjaitan. Dua orang tidur di

tempat tidur bahagian bawah dan seorang di tingkat atas. Mereka terbangun ketika mendengar suara-suara tembakan dan mengira ada perampokan. Yang tidur di tingkat bawah segera berdiri. Seorang di antaranya membuka pintu, sedang yang lain mengambil pistol yang terletak di atas lemari. Ketika pintu baru saja terbuka, Serda Asmun dan Pratu Herwanto telah berdiri di depan pintu. Kedua orang ini segera melepaskan serentetan tembakan. Kedua orang kemenakan Jenderal Pandjaitan itu kena dan rubuh sebelum sempat menembak. Yang tidur di tingkat atas bertiarap di kasurnya sehingga tidak terlihat dan karena itu selamat.

Sesudah menembak kemenakan-kemenakan Jenderal Pandjaitan, penculik-penculik terus masuk ke ruang tengah. Barang-barang yang terdapat di ruangan tersebut mereka banting dan mereka tembaki. Setelah mengetahui dari seorang pembantu rumah tangga bahwa kamar Jenderal Pandjaitan terletak di atas, Serda Sukardjo berteriak menyuruh Jenderal Pandjaitan turun. Ia mengancam Jenderal Pandjaitan kalau melawan, seluruh keluarganya akan dibunuh.

Jenderal Pandjaitan menjengukkan kepalanya dari atas dan menanyakan siapa mereka dan apa maksud kedatangan mereka. Mereka menjawab bahwa mereka dari Cakrabirawa disuruh Presiden untuk menjemput Jenderal Pandjaitan. Sekali lagi mereka mengancam akan membunuh anak-isteri beliau, jika Jenderal Pandjaitan tidak mau segera turun. Atas permintaan Ibu Pandjaitan, dan demi keselamatan anak-anak, Jenderal Pandjaitan memutuskan untuk turun. Beliau ke bawah berpakaian lengkap dengan tanda-tanda jasa.

Setelah sampai di ruang bawah, Jenderal Pandjaitan digiring oleh Serda Sukardjo dan Kopda Dikin. Sampai di luar, beliau berhenti untuk berdoa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pada saat itu beliau dipukul oleh Kopda Dikin sehingga terjatuh. Segera Serda Sukardjo dan Kopda Dikin menembaknya secara membabi buta dengan Thomson dan sten. Peluru-peluru maut itu mengenai kepala beliau sehingga benaknya bertaburan di pekarangan.

Kemudian tubuh Pak Pandjaitan diangkat dan dilemparkan ke luar pagar, dan selanjutnya dilemparkan ke atas sebuah truck dan dibawa ke Lobang Buaya.

Sesampai di rumah Letjen Yani, di Jalan Lembang, Serda Kaswad dengan beberapa anggota Cakrabirawa dan Peltu Mukidjan dari Brigade Infantri I Kodam V/Jaya masuk ke pekarangan. Regu pengawal samasekali tidak menaruh kecurigaan terhadap pasukan yang datang, karena berpakaian seragam Cakrabirawa, suatu unit yang terpercaya selaku pengawal Presiden. Tetapi pasukan pendatang itu ternyata menodong dan melucuti mereka. Sebagian di antara gerombolan itu terus menuju rumah dan Sersan Tumiran mengetuk pintu yang kemudian dibukakan oleh seorang pembantu rumah tangga. Mereka masuk dan di dalam mereka bertemu dengan putera Pak Yani yang berusia 7 tahun. Kebetulan ia terbangun dan mencari ibunya ke belakang. Tetapi tidak bertemu karena Ibu Yani malam itu sedang tirakatan di tempat kediaman resmi Men/Pangad di Taman Surapati, karena keesokan harinya, tanggal 1 Oktober adalah hari ulangtahun beliau.

Salah seorang di antara mereka bertanya kepada anak itu : "Bapak ada ?" Kemudian : "Tolong bangunkan Bapak dan katakan dipanggil Presiden."

Sementara itu putri pak Yani yang kedua mendengar ributribut juga bangun tetapi tidak keluar dari kamarnya. Yang keluar dari kamarnya adalah putra Pak Yani yang lain, berusia 11 tahun. Mereka membangunkan ayahnya dan Pak Yani ke luar dengan mengenakan pyama.

Anggota gerombolan mengatakan, bahwa Pak Yani dipanggil Presiden. Pak Yani mengatakan hendak mandi dan berpakaian sebentar. Dijawab oleh anggota gerombolan itu : "Tidak usah," sambil menodongkan senjatanya.

Pak Yani sangat marah mendengar dan melihat sikap yang kurang ajar itu. Orang itu dipukul Pak Yani sehingga jatuh. Kemudian Pak Yani membalikkan diri dan hendak menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan kamar makan. Pada saat itu Serda Raswad memerintahkan Serda Gijadi untuk menembak Pak Yani. Pak Yani ditembak dari belakang dengan senjata Thomson, sebanyak 7 peluru menembus tubuh beliau dan beliau terjatuh. Segera Praka Wagimin menyeret beliau ke luar rumah dengan memegang kaki beliau sehingga kepala Pak Yani terbentur-bentur di atas tanah. Di luar beliau disambut oleh

anggota-anggota Pemuda Rakyat yang melemparkan Pak Yani ke dalam salahsatu kendaraan. Selanjutnya gerombolan itu berangkat menuju ke Lubang Buaya.

Sampailah kita kepada usaha penculikan-penganiayaan terhadap Menko Hankam/KASAB Jenderal Dr.A.H. Nasution. Beliau, karena tangan Tuhan telah terhindar dari pengkhianatan gerombolan "G.30.S.; tetapi ajudan beliau Lettu (kemudian Kapten Anumerta) Pierre Andries Tendean serta puteri bungsu beliau Irma Suryani (Adik) telah gugur sebagai perisai.

Seperti yang telah kita ketahui, team yang menculik Jenderal Nasution adalah yang terbesar jumlahnya, yakni 1 (satu) Kompi plus. Sebelum sampai ke rumah Pak Nas, team penculik ini telah meng-"amankan" pengawal-pengawal di rumah Wakil Perdana Menteri II dr.J.Leimena. Pengawal-pengawal Pak Leimena mengadakan perlawanan, sehingga gugurlah Brigadir (kemudian AIP II Anumerta) Polisi Karel Satsuit Tubun. Dalam gerakan ini pasukan Pemuda Rakyat sangat aktif, sebagaimana terbukti dari pengakuan Djakiardi, salah seorang anggota team.

Yang menyerbu rumah Pak Nas adalah anggota-anggota Cakrabirawa. Mereka langsung menuju kamar kerja beliau, kemudian berusaha memasuki kamar tidur; karena ketabahan Ibu Nas, pintu dapat ditutup dan dikunci tepat pada waktunya, meskipun daun pintu itu dihujani peluru oleh kaum durjana. Pak Nas segera mengundurkan diri ke belakang rumah atas dorongan Ibu Nas dan berhasil berlindung di balik dinding. Karena lindungan Tuhan YME dua kali rangkaian tembakan yang dilepaskan oleh kaum pemberontak G.30.S./PKI tidak kena. Tetapi Irma Suryani (Adik), gadis cilik berusia 5 tahun, yang digendong oleh pengasuhnya dan hendak diselamatkan ke belakang, ditembak oleh Kopda Hargijono dan kena 3 butir peluru yang menembus punggungnya, sedangkan pengasuhnya kena 2 butir di tangannya.

Dalam pada itu dua orang ajudan yang tidur di pavilyun, yakni Lettu P.A.Tendean dan Ajun Komisaris Polisi Hamdan terbangun karena keributan di sekitar mereka. Lettu Tendean dengan membawa senjatanya segera berlari ke luar untuk menanyakan apa yang telah terjadi, tanpa menyadari, bahwa pasukan yang banyak di depan rumah adalah lawan.

Oleh pihak pemberontak G.30.S./PKI, Lettu Tendean di-

tangkap. Mereka mengira bahwa Lettu Tendean itu adalah Pak Nas. Ia diseret ke salahsatu kendaraan lalu disuruh meniarap di lantainya. Karena mengira mereka telah mencapai tujuannya, gerombolan itu lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke Lubang Buaya.

Di Lubang Buaya para perwira yang masih hidup dianiaya dengan ditusuk-tusuk senjata tajam dan dipukul dengan popor senapan dengan keji dan kejam di luar batas-batas prikemanusiaan oleh para Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Pemuda Rakyat yang sudah histeris. Setelah para perwira tersebut disiksa kemudian dibrondong dengan tembakan, lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di tempat itu dan selanjutnya ditimbun dengan sampah.

Kesemuanya itu disaksikan oleh seorang anggota polisi, yaitu Abripda Sukitman yang diculik oleh pemberontak G.30.S./ PKI di tengah jalan yang mereka liwati dan mereka tawan di Lubang Buaya. Abripda Sukitmanlah yang kemudian berhasil meloloskan diri dan menunjukkan tempat sumur tua itu kepada pasukan-pasukan yang mencarinya.

Di Jawa Tengah, pemberontak G.30.S./ PKI merebut kekuasaan di Markas Kodam VII Diponegoro dan Markas Korem 072 di Yogyakarta. Komandan Korem 072 Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Sugijono mereka bunuh.

IV. ORDE BARU

A. DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU

1. Kesaktian Pancasila.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memperoleh laporan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pagi hari tersebut. Beliau segera berangkat ke Markas Kostrad dan di sana mengadakan perkiraan keadaan. Menyadari bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat telah lumpuh karena pembunuhan-pembunuhan dan penculikan-penculikan yang telah dilakukan oleh Gestapu/PKI beliau untuk sementara waktu memegang pimpinan TNI AD sesuai dengan suatu tatacara tetap bahwa jika Menteri Panglima Angkatan Darat berhalangan, maka Panglima Kostradlah yang mewakilinya. Beliau juga menyadari bahwa juga pimpinan Negara tidak berfungsi karena Presiden/ Panglima Tertinggi berada di daerah yang dikuasai pemberontak di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena itu tidak ada seorangpun atasan yang dapat dimintai petunjuk atau perintah. Tetapi karena berpegang pada Pancasila, beliau memperoleh keyakinan bahwa kaum pemberontak adalah pihak musuh Pancasila dan karenanya harus segera ditumpas.

Maka hari itu juga beliau mengambil serangkaian langkah-langkah untuk mematahkan kekuatan pemberontak di Ibukota dimulai dengan mengkoordinasi satuan-satuan yang ada di Jakarta dengan jalan mengkonsinyir segenap anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian melalui Panglimanya masing-masing kecuali Angkatan Udara, yang ternyata kemudian Panglimanya mendukung kaum pemberontak. Kemudian diusahakan untuk menetralisasi pasukan-pasukan pemberontak yang menguasai Medan Merdeka di pusat kota yang berhasil dengan melapornya satu di antara dua batalyon yang terdapat di sana dan mundurnya batalyon yang lain ke Pangkalan Udara Halim. Kemudian beliau menggerakkan unsur-unsur RPKAD untuk membebaskan Studio RRI dan Pusat Telekomunikasi dari tangan pemberontak. Malam hari itu Jenderal Soeharto menyampaikan pesan kepada ajudan Presiden, supaya Presiden Sukarno meninggalkan lapangan Halim

karena akan diserbu oleh pasukan-pasukan yang setia. Pesan itu berhasil dilaksanakan dan mendekati tengah malam Presiden Sukarno meninggalkan Pangkalan Halim menuju Istana Bogor. Beberapa jam kemudian, pada waktu itu sudah memasuki tanggal 2 Oktober, Jenderal Soeharto memerintahkan unsur-unsur RPKAD dan Batalyon 328/Kujang dengan dukungan dua kompi pasukan berlapis baja untuk merebut Pangkalan Halim. Menjelang subuh pasukan-pasukan itu memasuki Halim dan pada waktu matahari terbit sudah menduduki seluruh pangkalan. Pada tengah hari seluruh Ibukota telah berhasil dikuasai kembali oleh pasukan-pasukan Pemerintah di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.

Peristiwa yang tidak kalah pentingnya dengan usaha menguasai keadaan di Jakarta adalah pidato radio Jenderal Soeharto pada jam tujuh malam pada tanggal 1 Oktober, yang menegaskan bahwa G.30.S./PKI merupakan suatu percobaan kudeta yang telah mengambil alih kekuasaan Negara, bahwa situasi di Pusat maupun di daerah dapat dikuasai kembali, bahwa untuk sementara pimpinan AD beliau pegang dan bahwa antara AD dan AL dan Kepolisian telah terdapat saling pengertian, kerja sama dan kebulatan tekad untuk menumpas Gerakan Tigapuluh September. Pidato radio itulah yang sangat besar pengaruhnya di dalam membangkitkan semangat kekuatan-kekuatan Pancasila dan meruntuhkan semangat unsur-unsur G.30.S./PKI di luar Ibukota.

Juga di Jawa Tengah yang sejak tahun duapuluhan dikenal sebagai tempat kelahiran dan basis kekuatan PKI, kekuatan kaum pemberontak dapat dipatahkan oleh dua batalyon RPKAD yang diperintahkan membantu Pangdam VII/Diponegoro di dalam usaha menguasai keadaan kembali.

Berita mengenai pembunuhan-pembunuhan sebelum dan di Lubang Buaya tersebar di seluruh Indonesia disusuli oleh berita-berita bahwa pelaksana pembunuhan tersebut adalah ormas-ormas PKI Pemuda Rakyat dan Gerwani. Rakyat Indonesia merasa dikhianati oleh golongan yang selama jaman Orde Lama menggembor-gemborkan dirinya sebagai pembela Pancasila, sebagai Pembela Negara yang paling setia, paling progressif, revolusioner dan paling patriotik, sedangkan golongan-golongan lain dimaki-maki sebagai pengkhianat, reaksioner dan antek kaum imperialis. Gelombang amarah menyaput seluruh Bangsa yang

menuntut supaya PKI dihukum untuk kejahatannya terhadap Negara dan Bangsa. Secara spontan rakyat bangkit untuk membela Pancasila daripada ancaman PKI. Dan nampak kesaktian Pancasila yang dapat memberikan pegangan kepada Rakyat dan Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Jenderal Soeharto dalam saat-saat yang kritis dan situasi yang tidak menentu.

Kehendak rakyat itu ternyata tidak ditanggapi secara wajar oleh Presiden Sukarno. Beliau samasekali tidak mengambil langkah-langkah untuk menyalahkan gerakan tersebut dan selanjutnya tidak melakukan tindakan-tindakan untuk menghukum atau menumpasnya. Bahkan beliau melakukan tindakan yang dapat kita rasakan seperti menyetujui atau merestui G.30.S./PKI dengan penunjukan caretaker Menpangad setelah mendengarkan saran pertimbangan dari pemberontak Supardjo. Dan sebagai puncak daripada sikapnya beliau membiarkan dengan leluasa tokoh-tokoh G.30.S./PKI berkeliaran ke mana-mana dan bahkan memberikan perlindungan pada tokoh-tokoh G.30.S./PKI.

2. *Aksi-aksi Tritura.*

Setelah jelas golongan mana yang mendalangi G.30.S. yakni PKI, maka Rakyat menuntut diambilnya tindakan terhadap golongan itu. Ternyata Presiden Sukarno mengambil sikap lain sehingga timbul situasi konflik antara Pimpinan Nasional dan Rakyat. Dapat dimengerti bahwa para pemuda, khususnya mahasiswa dan pelajar mengambil sikap yang paling gigih dalam hal ini. Semangat para mahasiswa itu kemudian disalurkan melalui wadah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965. Kecuali ketidak puasan mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang politik, khususnya penyelesaian terhadap pemberontakan G.30.S./PKI timbul pula ketidak puasan mengenai kebijaksanaan di bidang ekonomi. Pada awal bulan Desember 1965 Pemerintah mengeluarkan serangkaian keputusan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga secara serentak, dirangkaikan dengan keputusan mengadakan rupiah baru dengan perbandingan nilai Rp.1,- dibandingkan dengan Rp.1.000,- uang lama. Ketidak puasan yang meningkat itu akhirnya memuncak di dalam apa yang kemudian dikenal dengan aksi-aksi Tritura yang dimulai pada tanggal 10 Januari 1966. Yang di-

namakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) adalah : 1. bubarkan PKI, 2. turunkan harga-harga dan 3. retul Kabinet Dwikora.

Tritura disusun oleh para mahasiswa pemimpin KAMI. Aksi-aksi Tritura memperoleh dukungan luas di Ibukota yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, namun Presiden Sukarno tetap bersikap melindungi PKI yang sudah jelas-jelas memberontak. Aksi-aksi Tritura difitnah sebagai suatu gerakan yang didalangi pihak-pihak asing sedangkan untuk menteror KAMI Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio melontarkan issue tentang pembentukan Barisan Sukarno. Issue itu ditanggapi oleh ABRI dengan pernyataan bahwa seluruh rakyat pada waktu itu adalah Barisan Bung Karno, sehingga tidak perlu pembentukan Barisan Sukarno secara fisik. Segalanya itu terjadi sejak diadakannya sidang Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari di Bogor. Sejak saat itu pihak orde lama mencoba melancarkan ofensif terhadap KAMI yang meliputi juga tindakan-tindakan fisik yang mencapai klimaxnya dengan gugurnya Arief Rachman Hakim pada tanggal 24 Pebruari 1965. Gugurnya Arief Rachman Hakim terjadi pada hari diresmikannya Kabinet Dwikora yang disempurnakan, yang merupakan tantangan langsung terhadap Tritura karena jangankan diretul, bahkan jumlah Menteri yang mendukung G.30.S./PKI ditambah, sedangkan menteri-menteri yang menentang G.30.S./PKI malahan dicopot. Kabinet itu kemudian memperoleh julukan Kabinet Gestapu. Keesokan harinya jenazah Arief Rachman Hakim disemayamkan di Kampus Universitas Indonesia; dan dengan iringan ratusan ribu rakyat dibawa ke pemakaman Blok P. Pada tanggal 3 Maret 1966 Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena menutup Universitas Indonesia yang dianggap menjadi markas besar bagi KAMI dengan aksi-aksi Trituranya. Satu minggu sebelumnya KAMI telah dilarang dengan surat keputusan Komando Ganyang Malaysia (yang merupakan penjelmaan Komando Operasi Tertinggi atau KOTI). Setelah KAMI dilarang dan Universitas Indonesia ditutup aksi-aksi Tritura dilanjutkan oleh para pelajar dengan wadah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Pelajar Indonesia (KAPI). Aksi-aksi Tritura terus bergelora sampai tanggal 11 Maret 1966, yakni keluarnya Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto, suatu kejadian yang dianggap sebagai titik pangkal Orde Baru.

3. *Surat Perintah 11 Maret 1966*

Situasi konflik antara Presiden Sukarno dengan Rakyat semakin berlarut-larut. Kewibawaan Pemerintah merosot sama sekali sehingga dalam kenyataannya telah timbul suatu vacum pemerintahan. Dalam situasi demikian Rakyat telah bertindak sendiri-sendiri menumpas PKI di daerahnya masing-masing. Dalam suasana yang sedemikian itu pada tanggal 11 Maret diselenggarakan sidang paripurna Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Ketika Sidang telah berjalan Presiden menerima laporan bahwa telah terlihat adanya pasukan-pasukan yang tak dikenal di sekitar Istana. Menerima laporan itu Presiden Sukarno dengan diiringi oleh Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Wakil Perdana Menteri Chairul Saleh langsung meninggalkan sidang dan berangkat ke Istana Bogor dengan helikopter. Setelah sidang ditutup oleh Wakil Perdana Menteri Leimena, tiga orang perwira tinggi, yakni Menteri Veteran Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Menteri Perindustrian Brigjen M. Jusuf dan Pangdam V/Jaya Brigjen Amir Machmud sepakat untuk mengusulkan diambilnya langkah-langkah untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu. Mereka kemudian menghadap atasan mereka yakni Letnan Jenderal Soeharto yang pada tanggal 16 Oktober 1965 telah diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Karena sakit, Jenderal Soeharto tidak menghadiri sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kepada Men/Pangad ketiga perwira tinggi itu meminta ijin untuk menghadap Presiden Sukarno dan mengusulkan supaya kepada TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto diberi kepercayaan penuh untuk mengatasi keadaan. Di Istana Bogor mereka menghadap Presiden Sukarno yang didampingi oleh para Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Chairul Saleh serta Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur. Setelah diskusi beberapa jam Presiden Sukarno menandatangani suatu surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat "untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan Pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima

Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi ....."

Keesokan harinya pada tanggal 12 Maret Jenderal Soeharto atas nama Presiden/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi memutuskan

1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke Daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya.
2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 12 Maret itu ABRI yang diwakili oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edie Wibowo dan para pemuda yang tergabung di dalam kesatuan-kesatuan aksi mengadakan pawai kemenangan Orde Baru di Jakarta. Ratusan ribu penduduk Jakarta ke luar ke jalan-jalan raya untuk ikut mengungkapkan kegembiraannya.

Pada tanggal 18 Maret 1966 Jenderal Soeharto melakukan tindakan pengamanan terhadap sejumlah menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dinilai oleh Rakyat berindikasi tersangkut di dalam G.30.S./PKI atau setidak-tidaknya diragu-ragukan akan iktikad baiknya dalam membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. Tindakan pengamanan itu dilakukan terhadap :

1. Dr. Subandrio
2. Dr. Chairul Saleh
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo
4. Sumardjo
5. Oei Tju Tat, SH.
6. Ir. Surachman
7. Jusuf Muda Dalam
8. Armunanto
9. Sutomo Martopradoto
10. Astrawinata SH.

11. Mayjen TNI Achmadi
12. Drs.Moh. Achadi
13. Letkol If. Imam Sjafei
14. J. Tumakaka
15. Mayjen TNI dr. Sumarno.

Sekaligus Jenderal Soeharto selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret mengadakan penyusunan kembali Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk mengatasi kekosongan sebagai akibat pengamanan terhadap beberapa Menteri. Jenderal Soeharto juga menyerukan kepada semua perguruan tinggi yang pada waktu yang akhir-akhir ini ditutup, untuk memulai kuliah kembali seperti biasa. Dan pada sore hari tanggal 18 Maret itu juga memberikan briefing kepada para menteri mengenai tindakan-tindakan yang telah diambilnya sebagai pengemban Surat Perintah 11 Maret.

Surat Perintah 11 Maret itu kemudian oleh Sidang Umum ke IV MPRS dengan ketetapan No. IX/MPRS/1966 telah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS dengan daya laku sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

B. MEMULAI PEMBINAAN ORDE BARU

1. Meletakkan landasan Orde Baru

Pada tanggal 17 Juni 1966 diselenggarakan Sidang Umum ke IV MPRS yang hasil-hasilnya dapat dianggap merupakan landasan konsepsionil pertama daripada Orde Baru. Ketetapannya yang paling penting adalah pertama mengenai pengukuhan Surat Perintah 11 Maret sebagaimana telah diungkapkan di atas. Kedua adalah ketetapan No. XXIII mengenai "Pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan." Ketetapan inilah yang membawa perubahan haluan 180° dari kebijaksanaan ekonomi jaman Orde Lama. Ketetapan lain yang penting adalah Ketetapan No. XX tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Kemudian yang mempunyai akibat langsung kepada pembinaan Orde Baru adalah Ketetapan No. XIII tentang Kabinet Ampera. Tugas Pembentukan Kabinet Ampera itu dilimpahkan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan No. IX MPRS.

Adapun Kabinet Ampera yang merupakan kabinet Orde Baru yang pertama mempunyai *Dwidarma* :

1. Stabilisasi Politik
2. Stabilisasi Ekonomi

dan *Caturkarya* (program) :

1. Memperbaiki perikehidupan Rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
2. Melaksanakan pemilihan umum.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
4. Melanjutkan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Sesuai dengan ketetapan tersebut Presiden Sukarno bersama-sama dengan Letnan Jenderal Soeharto membentuk suatu kabinet baru yang dinamakan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera itu terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966. Setelah terbentuknya kabinet Ampera pembinaan Orde Baru masih belum juga berjalan dengan lancar karena masih terdapatnya suatu dualisme dalam kepemimpinan nasional, yang mencerminkan masih berlangsungnya situasi konflik. Hal itu disebabkan karena masih belum dapat diselesaikannya konflik politik dalam epilog G.30.S./PKI antara pola pikiran politik Presiden Sukarno dan pola pikiran politik Rakyat yang diwakili oleh Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan pengemban Ketetapan No. IX MPRS. Berulang kali Jenderal Soeharto melakukan pendekatan kepada Presiden Sukarno agar supaya dapat menyesuaikan diri dengan pola pikiran politik rakyat, yang secara konstitusionil telah digariskan oleh MPRS dalam sidang Umum ke V. Ketidak sesuaian antara kedua pola pikiran politik tersebut antara lain terungkap dalam laporan Presiden Sukarno kepada MPRS yang bernama Nawaksara yang dianggap masih tidak memuaskan sehingga masih diberi kesempatan kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melengkapi Nawaksara. Baru pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Sukarno mengirimkan Pelengkap Nawaksara kepada pimpinan MPRS, yang diumumkan secara luas dan mendapatkan tanggapan yang sangat negatif dari masyarakat dan orpol-ormas. DPRGR menanggapi pelengkap Nawaksara dengan sebuah resolusi untuk memanggil

Sidang MPRS dengan suatu memorandum yang berisi tuntutan-tuntutan yang pokoknya adalah :

a. memberhentikan Presiden Sukarno dari jabatan Presiden/ Mandataris MPRS yang menurut pendirian DPRGR terbukti dengan nyata kesalahannya (sesudah pendirian ini dibenarkan MPRS), dan memilih/mengangkat Pejabat Presiden sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/1966;

b. memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum.

Resolusi DPRGR itu langsung ditampung oleh Badan Pekerja MPRS yang sesudah membahas Pelengkap Nawaksara, telah menolaknya. Perkembangan ini berarti memuncaknya konflik politik yaitu bahwa pimpinan MPRS dan Badan Pekerja MPRS sebagai badan yang diberi wewenang oleh Sidang Umum ke IV untuk menanggapi Pelengkap Nawaksara, telah menolak pertanggungan jawab Mandataris dan Sidang Badan Pekerja MPRS secara aklamasi telah memutuskan untuk menyelenggarakan Sidang Umum Istimewa untuk mengambil keputusan yang menyangkut kedudukan Kepresidenan daripada Presiden Sukarno. Dalam suasana yang demikian itu tiba-tiba pada tanggal 7 Februari 1967 Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto menerima surat dari Presiden Sukarno yang berisi surat penugasan kepadanya dalam rangka menghilangkan dualisme. Jenderal Soeharto setelah mengadakan musyawarah dengan para Panglima Angkatan menemui Presiden Sukarno untuk menyampaikan bahwa semuanya tidak dapat diterima karena tidak akan dapat meredakan situasi konflik, bahkan akan mempersulit keadaan; surat penugasan itu hanya sekedar formalitas belaka dari pelaksanaan tugas Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet dalam rangka membantu Presiden melakukan tugas sehari-hari, sehingga secara riil surat penugasan tersebut samasekali tidak mempunyai arti. Setelah melampaui beberapa kali lagi pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Panglima-Panglima Angkatan, akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan pengumuman tanggal 20 Februari 1967 yang berisi keputusan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengem-

ban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Jenderal TNI Soeharto.

Sidang Istimewa MPRS diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 1967 sampai tanggal 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa MPRS itu telah diambil ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yang menarik kembali Mandat MPRS dari Presiden Sukarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD '45, serta mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Pada tanggal 21 Maret 1968 s/d tanggal 30 Maret 1968 diselenggarakan Sidang Umum ke V MPRS yang mengambil beberapa keputusan penting, yakni pertama mengenai pelaksanaan pembangunan lima tahun, pelaksanaan pemilihan umum dan pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Presiden penuh. Dengan selesainya Sidang Umum ke V MPRS itu berarti bahwa perjuangan Orde Baru telah memasuki babak baru yang merupakan kelanjutan dari hasil-hasil perjuangan yang terdahulu. Bab-bab baru itu adalah bab pembangunan, bab-bab mengisi Orde Baru itu sendiri.

Pada tanggal 27 Maret 1968 Jenderal Soeharto telah diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia dan pada tanggal 10 Juni 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk sejauh mungkin memenuhi serta memungkinkan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XII, yaitu untuk melaksanakan tugas pokok yang disebut Pancakrida sebagai berikut :

1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi;
2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
3. Melaksanakan pemilihan umum;
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G.30.S./PKI dan setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur Negara.

Dengan demikian proses pembinaan Orde Baru telah mencapai peralihan dari tahap meletakkan landasan-landasan kepada tahap pengisian. Adapun Orde Baru itu adalah tatanan seluruh

kehidupan Rakyat, Bangsa dan Negara yang kita letakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang yang terjadi pada masa-masa sebelumnya; dan di lain fihak, berusaha menyusun kembali kekuatan Bangsa kita dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang, sehingga mempercepat proses pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. *Membina integrasi ABRI.*

Salahsatu prestasi penting Orde Baru adalah pelaksanaan pembinaan integrasi ABRI. Sebenarnya masalah integrasi ABRI bukanlah masalah yang baru, karena ABRI lahir secara terintegrasi dengan dasar dan tujuan serta sasaran perjuangan satu, yaitu menghadapi musuh yang hendak merongrong Kemerdekaan kita. Tentara Keamanan Rakyat yang dilahirkan di tengah-tengah perjuangan menegakkan Kemerdekaan adalah contoh daripada integrasi ABRI pada saat ia dilahirkan. Pada waktu itu terdapat TKR Darat, TKR Laut, TKR Bagian Udara, tetapi keseluruhannya satu di dalam TKR. Akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan, bahwa masing-masing bagian di dalam TKR itu berkembang menjadi kekuatan bersenjata yang cenderung kepada sikap bersaing. Usaha-usaha untuk memelihara integrasi dirasakan sangat perlu, untuk mencegah ekses yang akan timbul, sebagai akibat perasaan bersaing antar bagian ini.

Hambatan utama integrasi ABRI dalam masa Orde Lama yalah divergensi dan rivalitas antar-angkatan. Masalah pembinaan teritorial, masalah doktrin, masalah kekaryaan, masalah pressure group dan masalah intelijen merupakan bahan bagi timbulnya divergensi dan persaingan tersebut. Dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka dalam masa Orde Baru pimpinan ABRI berusaha menghilangkan divergensi itu melalui tiga macam pendekatan yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisatoris.

Sampai pada masa proloog pemberontakan G.30.S./PKI, masing-masing angkatan telah memiliki doktrin-doktrin angkatan. Angkatan Darat merumuskan doktrin "Tri Ubaya Cakti" (1965),

Angkatan Laut dengan doktrin "Eka Casana Jaya" (1965), Doktrin Angkatan Udara bernama "Swa Bhuwana Paksa" (1965) dan Angkatan Kepolisian "Tata Tentrem Kerta Raharja." Dengan doktrin itu Angkatan Darat menonjolkan wawasan benua, Angkatan Laut menitikberatkan pada wawasan bahari dan Angkatan Udara menekankan pada wawasan dirgantara.

Wawasan yang berdiri sendiri dan bersaing satu dengan yang lainnya itu, dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat dan diindoktrinasikan kepada slagorde angkatan masing-masing. Hal itu sangat membahayakan keutuhan ABRI dan kesatuan Bangsa, sebab pada hakekatnya wawasan adalah aspek daripada falsafah hidup sesuatu angkatan yang berisi dorongan dan rangsangan untuk mencari jalan dan cara guna mencapai tujuan hidup itu.

Oleh karena itu setelah pecahnya pemberontakan G.30.S./PKI, pimpinan Angkatan Bersenjata menyadari bahwa masalah doktrin dan wawasan antar angkatan menjadi salahsatu sumber persaingan antar angkatan. Atas prakarsa pimpinan Hankam, pada tanggal 21 September sampai 27 Oktober 1966 diadakan pra Seminar Hankam. Pra Seminar ini adalah langkah persiapan untuk menuju Seminar Hankam. Di dalam pra Seminar ini dibahas beberapa masalah yang menyangkut masalah doktrin Pertahanan Keamanan Nasional, Doktrin Pembinaan Pertahanan Keamanan Nasional, juga mengenai strategi dasar Hankamnas, masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan kekaryaan.

Pra Seminar ini pada bulan berikutnya ditingkatkan menjadi Seminar Hankam I, yang diselenggarakan pada tanggal 12 — 21 November 1966. Seminar dipimpin oleh Kepala Staf Hankam Mayor Jenderal M.M.Rachmat Kartakusuma sebagai Ketua Seminar dan Laksamana Muda Subijakto, Deputy Strategi Hankam sebagai Wakil Ketua.

Seminar menghasilkan Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI yang bernama Catur Darma Eka Karma. Doktrin ini adalah merupakan hasil penelitian dan penyempurnaan hasil pra Seminar sebagai usaha integrasi konsepsi dan doktrin Departemen Veteran, Lemhannas, AD, AL, AU, dan AK. Catur Darma Eka Karma berarti tugas pokok ABRI yang terdiri atas empat matra, merupakan satu perbuatan suci yang

wajib diperjuangkan bersama untuk kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Hasil Seminar ini disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Utama Pertahanan Keamanan Nomor KEP/B/177/1966, tanggal 21 November 1966.

Rumusan hasil Seminar Hankam I ini kemudian disempurnakan melalui Rapat Kerja Hankam bulan November 1967, karena rumusan Seminar ini masih mencampur-adukkan masalah doktrin dan kebijaksanaan pelaksanaan. Rumusan pertama adalah sepenuhnya termasuk doktrin, sedangkan rumusan kedua sepenuhnya terletak di bidang kebijaksanaan pelaksanaan karena rumusan itu mengatur pelaksanaan, menentukan prioritas atau sasaran yang harus dicapai pada suatu periode tertentu.

Di dalam Rapat Kerja Hankam 1967 itu ditentukan, bahwa ABRI menganut Wawasan Nusantara. Wawasan ini bukan merupakan wawasan Hankamnas saja, tetapi juga menjadi wawasan nasional. Wawasan Nusantara tidak menonjolkan kepentingan salahsatu matra, atau salahsatu kepentingan bidang perjuangan. Semua bidang perjuangan, politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam memiliki tempatnya, berhubungan satu-sama lain di dalam perjuangan nasional. Yang diutamakan adalah penentuan prioritas, titikberat sesuai dengan situasi dan kondisi dalam jangka waktu tertentu.

Integrasi ABRI ditingkatkan dengan Keputusan Presiden No. 132/1967, yang berisi tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Departemen Pertahanan Kemanaan, dan merupakan langkah pertama dalam usaha penyempurnaan strukturil organisatoris daripada integrasi ABRI. Karena masalah integrasi ABRI merupakan masalah yang luas dan komplex, maka penyempurnaan organisasi Departemen Hankam adalah pedoman utama penentuan pembagian fungsi dan prinsip bentuk organisasi. Pada masa Orde Lama, pembagian dan penentuan fungsi, baik vertikal maupun horizontal, adalah kacau, sehingga terdapat 6 badan Hankam yang menyelenggarakan fungsi yang serupa atau hampir serupa. Akibatnya terjadi kemelut yang luar biasa, hingga makin lama Pimpinan Nasional semakin keliru di dalam mengambil kebijaksanaan. Keenam badan tersebut yalah Komando Operasi Tertinggi (KOTI), Departemen Hankam, Departemen/Angkatan Darat, Departemen/

Angkatan Laut, Departemen/Angkatan Udara dan Departemen/ Angkatan Kepolisian. Fungsi tersebut dikerjakan secara melebar, tidak mendalam, sehingga nilai-nilai kemiliteran, nilai keahlian dan ketrampilan kemiliteran semakin merosot. Kompensasinya adalah pengembangan kekuatan menjadi kekuatan politik yang sedahsyat mungkin.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 132/1967 adalah untuk menertibkan pembagian fungsionil angkatan. Pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Bersenjata dan sebagai pucuk pimpinan Hankamnas adalah Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Mata rantai komando berjalan dari Presiden dengan melalui Menteri Hankam/ Pangab. Masing-masing angkatan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pembinaan Hankamnas, menurut matranya masing-masing. Dan setiap angkatan adalah bagian organik daripada Departemen Pertahanan Keamanan, bertanggungjawab untuk memberikan bantuannya dalam penyelenggaraan dan pengamanan kebijaksanaan dalam bidang Hankam sebagaimana yang telah diputuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional.

Landasan organisasi Departemen Hankam yang dituangkan di dalam Keputusan Presiden No. 132/1967, bertujuan mencapai sistim Hankamnas yang modern, sesuai dengan tuntutan situasi maupun kondisi. Landasan organisasi itu kemudian disempurnakan sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Presiden No. 79/tahun 1969. Tujuan daripada penyempurnaan ini yaiah agar pada akhir 1973 telah didapat landasan dan pangkaltolak yang pokok bagi pembangunan sistim Hankamnas dan ABRI agar dalam waktu yang tidak terlalu lama telah dapat dimiliki suatu sistim Hankamnas yang modern, baik aparatur maupun doktrinnya.

Dalam Keputusan Presiden No. 79/1969, dinyatakan bahwa ABRI merupakan unsur organik dari Departemen Hankam, juga merupakan inti kekuatan Hankamnas yang sekaligus merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Hankamnas. Oleh karena itu sasaran utama dalam penyempurnaan organisasi Hankamnas adalah integrasi ABRI. Integrasi ABRI yang dimaksud adalah kekompakan, keutuhan, kesatuan dan persatuan ABRI yang memenuhi syarat-syarat dan ciri-ciri se-

bagai berikut :

a. mempunyai satu landasan mental dan ideologi.
b. mempunyai satu doktrin, terutama doktrin dasar dan doktrin induk pelaksanaannya.
c. dikendalikan oleh satu kebijaksanaan yang terpusat.
d. strukturil tidak memberikan peluang bagi munculnya rivalitas dan kontroversi antar angkatan ataupun bagi fihak luar ABRI untuk memecah belah tubuhnya.
e. tidak menonjolkan dan mempunyai kepentingan sendiri kecuali kepentingan ABRI secara keseluruhan yang harus tetap berada di dalam dan tunduk di bawah kepentingan nasional.
f. mampu menyelesaikan tugas-tugas, baik operasionil, routine secara efisien dan efektif.
g. politik merupakan satu kekuatan yang kompak dalam fungsi kekaryaan sebagai kekuatan sosial.

Adapun prinsip dasar bagi penyempurnaan organisasi adalah penentuan dasar dan pembagian fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Refungsionalisasi sesuai dengan kemampuan dan hakekat angkatan dengan konsekwensinya pembedaan fungsi antara angkatan Perang dan Kepolisian, sehingga ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Kepolisian RI. Polri berfungsi di bidang Nasional Security/Social Approach. APRI di bidang National Security/Defensive Approach.

b. Semua fungsi yang bersifat politis dan strategis yang mempengaruhi politik dan strategi, bahkan mempengaruhi politik dan strategi nasional, harus dipusatkan dalam satu tangan yaitu Men Hankam/Pangab.

c. Semua fungsi yang bersifat umum yang berlaku bagi lebih dari satu angkatan dan tidak bersifat politis, atau strategis, diatur secara sistim pembinaan tunggal.

d. Fungsi khas angkatan diserahkan pembinaan seluruhnya kepada angkatan-angkatan, di bawah pengawasan Hankam.

3. *Memupuk persahabatan dengan semua bangsa.*

Segera setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret Jenderal Soeharto dan Menteri Luar Negeri Adam Malik mengambil langkah-langkah untuk memindahkan haluan politik luar negeri Republik Indonesia. Hal itu terutama nampak di dalam usaha-usaha untuk menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia. Pada tanggal 12 April 1966 Jenderal Soeharto menyatakan bahwa Indonesia akan menerima baik Malaysia apabila benar-benar dihendaki oleh rakyat Kalimantan Utara. Dalam bulan Mei diselenggarakan Perundingan Bangkok antara Adam Malik dan Tun Razak. Karena pada waktu itu Presiden Sukarno masih memangku jabatan Presiden, proses penghentian konfrontasi berjalan dengan perlahan-lahan. Dan baru pada tanggal 16 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan untuk menormalkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam Sidang Umum ke IV MPRS dikeluarkan Ketetapan MPRS mengenai politik luar negeri Indonesia, yang menegaskan bahwa politik luar negeri Orde Baru yalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip bebas-aktif dan selalu bertolak dari kepentingan nasional serta prioritas kebutuhan dalam tahap tertentu. Secara khusus pelaksanaan hubungan luar negeri harus dititik beratkan pada usaha-usaha untuk menunjang program ekonomi. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya Presiden Soeharto berulang kali menegaskan asas-asas politik luar negeri Indonesia. Bertolak dari Pancasila, Indonesia ingin melakukan hubungan baik dengan semua negara yang mau bersikap bersahabat dengan Indonesia, baik dengan negara-negara "Blok Barat" maupun "Blok Timur," lebih-lebih dengan negara-negara yang tergolong "non aligned."

Salahsatu aspek penting daripada politik luar negeri Orde Baru adalah bahwa untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi diperlukan bantuan luar negeri dan kerjasama luar negeri. Bantuan dan kerjasama ekonomi memang telah merupakan pola ekonomi dunia dewasa ini baik untuk kepentingan ekonomi semua negara maupun untuk kepentingan yang lebih besar, yalah perdamaian dunia sendiri. Sekarang telah makin disadari bahwa jurang pemisah yang makin dalam antara negara-negara yang telah maju dan negara-negara sedang membangun, maupun keme-

laratan yang masih diderita oleh sebagian terbesar umat manusia, merupakan benih-benih ancaman bagi perdamaian dunia yang sama besarnya dengan bahaya yang timbul karena perang nyata. Dirasakan perlu bahwa pokok-pokok pengertian, dasar-dasar dan urgensi bantuan luar negeri kepada negara-negara yang sedang membangun serta kerjasama luar negeri harus menjadi pegangan Indonesia dan harus diyakinkan kepada negara-negara lain, terutama negara-negara yang telah maju perekonomiannya.

Pengembangan kerjasama dan bantuan ekonomi dari luar negeri, tanpa memandang dari negara mana dianggap harus benar-benar punya arti strategis dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pembangunan. Hal-hal yang terpokok :

1. Penyediaan kredit-kredit baru guna pembiayaan pembangunan proyek-proyek, baik berupa bantuan BE, bantuan proyek maupun bantuan-bantuan lainnya.
2. Penundaan atau penyelesaian hutang-hutang Indonesia yang lalu, sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan arti daripada pemberian kredit baru untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya investasi-investasi baru — dengan kredit ataupun dengan penanaman modal asing — dalam bidang industri dasar (baja, aluminium, pembangkit tenaga listrik) sebagai permulaan dan persiapan dari pembangunan lima tahun tahap berikutnya.
4. Peluasan kemungkinan atau tidak mempersempit pemasaran hasil export kita, dan lain-lain.

Dengan demikian politik luar negeri Orde Baru sama sekali tidak berubah dari prinsip bebas dan aktif : tidak memihak salahsatu blok kekuatan-kekuatan dunia, juga tidak mengikatkan diri pada sesuatu negara yang memberikan bantuan ekonomi kepada kita : kita tetap konsekwen anti penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya menuju persahabatan antar bangsa dan perdamaian dunia yang sesungguhnya. Tidak benar bahwa Orde Baru lebih cenderung ke Blok Barat daripada Blok Timur; kesan itu mungkin timbul karena dulu Pemerintah Orde Lama memihak kepada Blok Timur dan memusuhi Blok Barat. Yang

terjadi pada jaman Orde Baru hanyalah meluruskan ketidakseimbangan itu sesuai dengan politik bebas aktif yang sesungguhnya.

Ada pula yang mengatakan bahwa pada jaman Orde Lama dulu Indonesia memainkan peranan politik global, sedangkan sekarang pada jaman Orde Baru jangkauan kegiatan kita hanya terbatas pada Asia Tenggara saja. Hal itu tidak benar, karena sekarang pun kita memainkan peranan politik yang mondial. Kita tidak tinggal diam menghadapi pelbagai masalah dunia seperti persoalan Timur Tengah. Tetapi peranan itu kita mainkan dengan landasan ketahanan nasional. Sedangkan pada jaman Orde Lama peranan global itu sesungguhnya kosong karena didasarkan pada kebangkrutan ekonomi di dalam negeri dan kekalutan politik domestik.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Muangtai, Indonesia membentuk Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Tujuan daripada ASEAN adalah :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di dalam kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat persamaan derajat dan partnership untuk memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai.
2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional melalui sikap hormat terhadap keadilan dan rule of law dalam saling hubungan antara negeri-negeri kawasan Asia Tenggara dan sesuai dengan azas-azas piagam Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. Memajukan kerjasama dan saling membantu secara aktip mengenai soal-soal yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administratif;
4. Memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kejuruan, teknis dan administratif;
5. Bekerja sama secara lebih efektif untuk meningkatkan kemanfaatan daripada pertanian dan industri masing-masing,

perluasan perdagangan meliputi studi terhadap masalah-masalah perdagangan komoditi - internasional, perbaikan terhadap fasilitas pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyatnya;

6. Memajukan study mengenai Asia Tenggara ;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan yang sama dan menjajagi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat lagi di antara mereka.

Dengan perkataan lain ASEAN ditujukan pada mencapai ketahanan nasional masing-masing anggotanya dan dengan demikian memperkuat ketahanan regional di Asia Tenggara. Jelas bahwa ASEAN tidak dimaksudkan untuk mengancam atau memusuhi bangsa-bangsa lain.

Adam Malik, *Riwajat dan perdjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Widjaja, Djakarta, 1962.

—, *Politik dan Ekonomi*, Departemen Perdagangan, Djakarta, 1966.

Adams, Cindy, *Soekarno, An autobiography as told to Cindy Adams*, Bob Merills, New York, 1965.

Ajip Rosidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1969.

Alfian, Dr, *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakjat*, Leknas, Djakarta, 1971.

Ali Wardhana, *Monetary Problems of an Underdeveloped Economy, with special Reference to Indonesia*, Ann, Arbor, 1962 (dissertasi).

Amin, Mr. S.M., *Indonesia dibawah rezim demokrasi terpimpin*, Tintamas, Djakarta, 1967.

Anne Marie The, *Darah tersimbah di Djawa Barat, Gerakan Operasi Militer V*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Anspach, Ralp, *The Problem of a plural Economy and its effects on Indonesia's Economy*, Ann Arbor, 1963 (dissertasi).

Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII, Penjelesaian peristiwa Atjeh*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Aroen, SH., Dj.L., *Deklarasi Ekonomi dengan Peraturan-peraturan Pelaksanaannja dan Peraturan Ekonomi Irian Barat*, Gunung Agung, Djakarta, 1963.

Atoeran-atoeran tentang Djawa Seinendan, Djawa Seinendan, Djakarta, 1945.

Azis, M.A., *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1955.

Benda, Harry J, *The Crescent and the Rising Sun, Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942 — 1945*, W. van Hoeve, The Hague, 1958.

—, *Japanese Military Administration in Indonesia*, Southeast Asian Studies, Yale University, 1965.

Biro Perantjang Nasional, *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun 1956 — 1960*, Biro Perantjang Nasional, Djakarta, 1960.

Brackman, Arnold C, *Indonesian Communism: a history*, Frederick A, Preager, New York, 1963.

Brugmans, Prof. Dr. I.J., et al, *Nederlands Indië onder de Japanse bezetting, Gegevens en Documenten over de Jaren 1942 — 1945*, Franeker, 1960.

Budiardjo, Miriam S, *Evolution toward Parliamentary Government in Indonesia; Parties and Parliament*, Georgetown, 1955.

Daska Prijadi, *Gerakan Operasi Militer II, Penumpasan APRA Westerling Bandung*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta,1965.

Departemen Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Djakarta, 1963.

Departemen Pertahanan Keamanan, *Tjatur Darma Eka Karma, Doktrin Pertahanan Keamanan dan Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia*, Djakarta, 1967.

Departemen Luarnegeri, *Duapuluh lima tahun Departemen Luarnegeri*, Djakarta, 1971.

Departement of Foreign Affairs, *Indonesia 1962*, Djakarta, 1963.

Departemen Penerangan, *Amanat dan Pendjelasan Presiden R.I. tentang tindakan-tindakan Pemerintah dibidang Keuangan dan Ekonomi*, Djakarta, 1959.

——, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, Djakarta, 1965.

——, *Buku Ringkasan Pembangunan Semesta*, Djakarta, 1961.

Elsbree, Willard H., *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements 1940 to 1945*, Havard University Press, Cambridge (Mass), 1953.

Emil Salim, *Masalah Stabilisasi Ekonomi*, Fakultas Ekonomi U.I., Djakarta, 1971.

Gandasubrata, S.M., *An Account of the Japanese Occupation of Banjumas Recidency, Java, March 1942 to August 1945*, Cornell University, Ithaca, 1953.

Geertz, Clifford, *The religion of Java*, The Free Press of Glencoe, London, 1964.

Gunseikanbu, *Orang Indonesia terkemoeka di poelaoe Djawa*, Gunseikanbu, Djakarta, 1943.

——, *Boekoe Pengoempoelan Oendang-oendang disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampai penghabisan boelan 6 tahoen Sjoowa 19 (2604)*, Djakarta, 1944.

Harahap, Parada, *Saat Bersedjarah*, Gapura, Djakarta, 1951.

——, *Serba Sedikit Tentang Pers*, Djakarta, 1952.

Harahap, Zainabun, *Operasi-operasi militer menumpas Kahar Muzakar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Henry Pratt Fairchild Ph.D., LLD (ed), *Dictionary of Sociology*, Philosophical Library, New York.

Herbert Feith, *The Indonesia Election of 1955's*, Cornell University Press, Ithaca, 1957.

——, *The decline Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1962.

Higgins, Benjamin, *Indonesia's Economy Stabilization and Development*, W.W. Norton, New York, 1968.

Hoogenband, C. van Schotborgh, Kolonel van het KNIL, *Nederlandsch Indië contra Japan*, 's Gravenhage, 1961.

Jaspan, M.A, *Social stratification and social mobility in Indonesia*, Gunung Agung, Djakarta, 1961.

Jassin, H.B., *Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan essei*, Gunung Agung, Djakarta, 1955.

——, *Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang*, Gunung Agung, Djakarta, 1969.

Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1969.

Kanahele, George S, *The Japanese Occupation of Indonesia:* Prelude to Independence. A thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for Degree of Doctor of Philosophy, 1967 (diss).

Kementerian Penerangan, Djawatan Radio Republik Indonesia,

Sedjarah Radio di Indonesia, Pertjetakan Seno N.V., Djakarta, 1955.

Kementerian Penerangan R.I., *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia*, Jogjakarta, 1949.

—, *Exim Bank*, Djakarta, 1952.

—, *Subversive activities in Indonesia. The Jungschlager and Schmidt affairs*, Djakarta, 1953.

—, *Keterangan Pemerintah tentang Peristiwa pengeluaran Schmidt*, Djakarta, 1953.

—, *Kepartaian dan Parlementaria di Indonesia*, Djakarta, 1954.

Kementerian Penerangan, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia*, Djakarta, 1957.

Keyfitz, Dr. Nathan, Widjojo Nitisastro, *Soal Penduduk dan pembangunan Indonesia*, Pembangunan, Djakarta, 1955.

Legge, J.D., *Indonesia*, New Jersey, 1964.

Leirissa, R.Z., *Bukan disiplin Kadaver melainkan disiplin berdjiwa, Gerakan Operasi-operasi Militer terhadap Permesta*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi U.I., *Beberapa masalah penduduk di Indonesia*, Djakarta, 1971 (stencil).

Lev, Daniel, *The transition to guided Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1964.

Markas Besar Angkatan Darat, *Himpunan Instruksi Pemerintah Militer dari Panglima Tentara dan Territorium Djawa, 1948 — 1949*, Djakarta, tanpa tahun (stencil).

Meek, John Paul, *The government and Economic Development In Indonesia*, Ann Arbor, 1956 (dissertasi).

—, *Menudju ke Ekonomi Marhaenis*, Jogjakarta, 1959.

—, *Mendjeladjah Tracee baru, Kebangkitan Semangat 66*, Universitas Indonesia, Djakarta, 1966.

Mohammad Hatta, *Dasar-dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Tintamas, Djakarta, 1953.

—, *Beberapa Fasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Djakarta, 1954.

—, *Ekonomi Terpimpin*, Djambatan, Djakarta, 1967.

—, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas, Djakarta, 1969.

Mook, Dr. H.J. van, *Indonesië, Nederland en de Wereld*, Vorkink, Bandung, 1949.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Djakarta, 1953.

—, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Prapantja, Djakarta, 1962.

Nasution, A.H., *Sedjarah Perdjuangan Nasional dibidang Bersendjata*, Mega Bookstore, Djakarta, 1964.

—, *Tentara Nasional Indonesia II*, Seruling Masa, Djakarta, 1968.

Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the September 30th Movement*, Pembimbing Masa, Djakarta, 1968.

Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan tentara Peta Blitar melawan Djepang 14 Februari 1945*, Lembaga Sedjarah Hankam, Djakarta, 1968.

—, *Sedjarah dan Hankam*, Lembaga Sedjarah Hankam, Djakarta, 1968.

—, *Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pantjasila jang Otentik*, Pusat Sedjarah ABRI, Djakarta, 1971.

—, *The Peta Army in Indonesia, 1943 — 1945*, Centre for Armed Forces History, Djakarta, 1971.

Ong Hok Ham, *Sapta Marga berkumandang di Sumatra; Operasi-operasi menumpas pemberontakan PRRI*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Osman Raliby, *Sedjarah Hari Pahlawan*, Tintamas, Djakarta, 1952.

Paauw, Douglas S, *Financing Economic Development; The Indonesia Case*, The Free Press, Glencoe, 1959.

Palmer, Leslie, *Indonesia and the Dutch*, Oxford University Press, London, 1962.

Peratoeran-peratoeran Himpoenan Kebaktian Rakjat, Djakarta, 1944.

Pringgodigdo, Prof, Mr. A.G., *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942*, Jajasan Fonds Universitet Gadjah Mada, Jogjakarta, 1952.

Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, *40 Hari Kegagalan G.30.S.*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1965.

—, *Pembinaan Bahasa Indonesia*, Kongres Bahasa Indonesia, Medan, 1959.

Quispel, Lt ter Zee K.M.R., *Nederlandsch India in den tweede Wereld Oorlog*, London, 1945.

Redmana, Hans, R, *Beberapa Persoalan Penduduk di Indonesia*, LIPI, Djakarta, 1970.

Regeering Voorlichting Dienst, *Indonesia's Toekomst*, Batavia, 1946.

Rochmani Santoso, *Bom waktu kolonialis Belanda meledak di Makasar*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Roeslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia — PBB*, Gunung Agung, Djakarta, 1971.

Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Pembaharuan, 1964.

Simatupang, Djenderal Major T.B., *Laporan dari Banaran*, Pembangunan, Djakarta, 1960.

Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan RMS, Gerakan Operasi Militer IV*, Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1965.

Soedjito Sosrodihardjo, SH, M.A., Prof., *Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa, suatu analisa*, Fakultas Sosial Politik Univ. Gadjah Mada, Jogjakarta, 1968.

Soedradjat Djiwandono, J., *Masalah-masalah Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan*, Leknas, Djakarta, 1970.

Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa soal Keoeangan*, Poestaka Rakjat, Djakarta, 1947.

—, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*, Pembangunan, Djakarta, 1953.

Sugarda Purbakawatja, Prof., *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Djakarta, 1970.

Soekarno, Presiden, *Menjelamatkan Indonesia*, Kementerian Penerangan, Djakarta, 1957.

—, *Res Publica, sekali lagi Res Publica*, Departemen Penerangan, Djakarta, 1959.

—, *Susunlah konstitusi jang benar-benar konstitusi Res Publica*, Kementerian Penerangan, Djakarta, 1959.

—, *Ekonomi Pembangunan*, Pembangunan, Djakarta, 1955.

Susanto Tirtoprodjo, SH., Drs., *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, Pembangunan, Djakarta, 1963.

Sutan Sjahrir, *Out of Exile*, New York, 1959.

Sutter, John O, *Indonesianisasi*, Cornell University, Ithaca, 1962.

Takdir Alisjahbana, Sutan, *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1957.

Tan Goan Po, Drs., *Faktor-faktor strategis dalam kebidjaksanaan Ekonomi ditindjau dari sudut Pembangunan*, Pembangunan, Djakarta, 1955.

Taylor, Alastair, M., *Indonesian Independence and the United Nations*, Stevens dan Sons, London, 1960.

Teeuw, Prof. Dr. A., *Pokok dan Tokoh*, Pembangunan, Djakarta, 1958.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Djakarta, 1966.

Urusan Pendidikan SMP, Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.D. dan K, *Rentjana Peladjaran dan Pendidikan SMP Gaja Baru*, Balai Pustaka, Djakarta, 1964.

Urusan Pendidikan SMA, Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.D. dan K, *Rentjana Peladjaran dan Pendidikan SMA Gaja Baru*, Balai Pustaka, Djakarta, 1964.

Weerd, K.A. de, *The Japanese Occupation of Netherlands Indies*, 1946.

Wertheim, W.F., *Indonesian Society in transition*, W van Hoeve, 's Gravenhage, 1959.

Widjojo Nitisastro, *Hakekat dan konsekwensi Ketetapan MPRS dibidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*, Leknas, Djakarta, 1966.